



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 7 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2012-2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kabupaten sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, rencana pembangunan daerah dapat diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 11);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 66);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES**

dan


BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

Ketentuan 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

Pasal 4

- (2) Uraian lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Qanun ini.

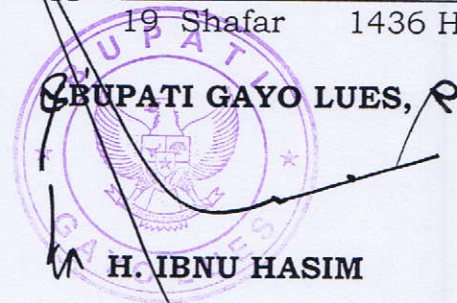
Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 30 November 2015 M
19 Shafar 1436 H

 **KABUPATEN GAYO LUES,**
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 30 November 2015 M
19 Shafar 1436 H

 **SEKRETARIS DAERAH,**
H. THALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR...78

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN DAN AKRONIM		
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKAP	:	Antar Kota Antar Provinsi
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANC	:	Ante Natal Care
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	:	Association of South East Asia Nation
ASI	:	Air Susu Ibu
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/TB	:	Berat Badan per Tinggi Badan
BB/U	:	Berat Badan per Umur
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN-KB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BCG	:	Bacillus Calmette-Guerin
BIBD	:	Balai Inseminasi Buatan Daerah
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesenambungan Rekonstruksi Aceh
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP3K	:	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTA	:	Basil TaKan Asam
BUMK	:	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	Capital Adequasy Ratio
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CDR	:	Case Detection Rate
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue

DI	:	Daerah Irigasi
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DM	:	Diabetes Mellitus
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HDI	:	Human Development Index
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HL	:	Hutan Lindung
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hand Phone
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKK	:	Ibukota Kecamatan
IPHP	:	Industri Pengolahan Hasil Hutan
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMP	:	Industri Pengolahan Mesin Pertanian
IPTEK	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Atas
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	:	Kepala Keluarga
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kajian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KSP/USG	:	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
LH	:	Lahir Hidup
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	Millenium Development Goals
MoU	:	Memorandum of Understanding
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NBM	:	Neraca Bahan Makanan

NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDRB	:	Product Domestic Regional Bruto
PER	:	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan sehat
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKN	:	Pusat kegiatan Nasional
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Listrik Nasional
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	:	Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayahul Hisbah
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Perguruan Tinggi
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
Riskedes	:	Riset Kesehatan Dasar
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSH	:	Rumah Siap Huni
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
	1.4. Sistematika Penulisan	9
	1.5. Maksud Dan Tujuan	11
BAB II	Gambaran umum kondisi daerah.....	13
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	13
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	28
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	44
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	55
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan	74
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Proyeksi	75
	3.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan	92
	3.3. Kebijakan Umum Anggaran.....	94
BAB IV	Analisis isu-isu strategis	96
	4.1 Permasalahan Pembangunan	96
	4.2 Isu Strategis	107
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	110
	5.1 Visi.....	110
	5.2. Misi.....	111
	5.3. Tujuan dan Sasaran.....	111
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan	118
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.....	128
BAB VIII	Rencana Program Prioritas dan Pendanaan	145
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	159
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	172
BAB XI	Penutup	174

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.....	13
Tabel 2.2 Ketinggian Tempat, Luas Wilayah dan Prosentase Kabupaten Gayo Lues	15
Tabel 2.3 Kemiringan Lahan, Bentuk dan Luas Wilayah Serta Prosentasi Kabupaten Gayo Lues	16
Tabel 2.4 Formasi Geologi, Luasan Kabupaten Gayo Lues	17
Tabel 2.5 Jenis Tanah, Luasan dan Presentasinya di Kabupaten Gayo Lues	18
Tabel 2.6 Luas Areal Pertanian dan Jenis Pengairan Kabupaten Gayo Lues	20
Tabel 2.7 Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Gayo Lues	21
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gayo Lues	22
Tabel 2.9 Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)	24
Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014	25
Tabel 2.11 Distribusi penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2011	26
Tabel 2.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020	27
Tabel 2.13 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014	27
Tabel 2.14 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014..	28
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010- 2014 (%).....	29
Tabel 2.16 Pendapatan Perkapita Aceh 2007-2013.....	31
Tabel 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues	34
Tabel 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gayo Lues	35
Tabel 2.19 Angka Harapan Hidup Tahun 2005-2011.....	35

Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia	39
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gayo Lues	44
Tabel 2.22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s.d 2014 Kabupaten Gayo Lues	46
Tabel 2.23	Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA Tahun 2007-2014 Kabupaten Gayo Lues	47
Tabel 2.24	Perbandingan jumlah aseptor KB Tahun 2013 dan 2014	50
Tabel 2.25	Panjang dan jumlah Jembatan Kabupaten Gayo Lues.....	64
Tabel 2.26	Panjang jaringan irigasi di kabupaten Gayo lues	65
Tabel 3.1	Rata - rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2011	76
Tabel 3.2	Rata - rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2015	77
Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues.....	81
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja APBK Gayo Lues 2007-2011	83
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Belanja APBK Gayo Lues 2012-2015	84
Tabel 3.6	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Pendanaan Pembangunan Pada Tahun 2013-2017	86
Tabel 3.7	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	87
Tabel 3.8	Alokasi Pendanaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah	88
Tabel 3.9	Realisasi Penerimaan dan Pembayaran Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2010	90
Tabel 3.10	Realisasi Penerimaan dan Pembayaran Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2015	91
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017	112

Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	119
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017	129
Tabel 8.1	Indikasi Program yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Gayo Lues tahun 2013-2017.....	146
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gayo Lues ...	159

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan antara RPJM dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gayo Lues	14
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Gayo Lues	15
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Gayo Lues	16
Gambar 2.4 Peta Geologi	18
Gambar 2.5 Peta Jenis tanah	19
Gambar 2.6 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues	20
Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues	23
Gambar 2.8 Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh dan Nasional	31
Gambar 2.9 Persentase penduduk Miskin Gayo lues dan Aceh	33
Gambar 2.10 Persentase Imunisasi Tahun 2014	37
Gambar 2.11 Tingkat TPAK dan TPT Kabupaten Gayo Lues	41
Gambar 2.12 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010	45
Gambar 2.13 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014	53
Gambar 2.14 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2014	53
Gambar 2.15 Pengeluaran Perkapita Gayo Lues dan Aceh	56
Gambar 2.16 Nilai Pengeluaran Perkapita Makanan Sebulan	57
Gambar 2.17 Perkembangan IKM di Kab. Gayo Lues	62
Gambar 2.18 Jumlah IKM Kabupaten Gayo Lues	63

Gambar 2.19 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Gayo Lues	66
Gambar 2.20 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum	68
Gambar 2.21 Realisasi PAD dari PLTMH Gayo Lues	71
Gambar 3.1 Proporsi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.....	79
Gambar 3.2 Perkembangan Anggaran PAD Kabupaten Gayo Lues	80
Gambar 3.3 Besaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2015	85

Lampiran : Qanun Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 7 Tahun 2015

Tanggal : 30 November 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJM Kabupaten Gayo Lues periode 2012-2017, merupakan kelanjutan dari RPJM Kabupaten Gayo Lues periode 2007-2012, dengan lebih memfokuskan kepada isu-isu strategis yang berkembang selama periode 5 tahun yang lalu, dan RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasar hasil Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) pada 09 April 2012, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJM tersebut harus menggambarkan rencana pembangunan yang terukur baik anggaran maupun target capaian yang diinginkan dalam rangka menjawab isu-isu strategis Kabupaten Gayo Lues.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJM disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, yaitu RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, Provinsi dan Kabupaten; RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional, Provinsi dan Kabupaten; RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun Gayo Lues Nomor 14 tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013, namun dalam pelaksanaan belum semua program dan kegiatan yang direncanakan belum semuanya dapat menghasilkan perubahan yang signifikan khususnya pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan indek pembangunan manusia menyebabkan rencana tersebut harus direvisi tanpa mengubah visi dan misi pembangunan yaitu mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai, Bertaqwa, dan Bermartabat.

RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 telah melewati separuh waktu pelaksanaannya atau memasuki tahun ketiga. Evaluasi paruh waktu RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 untuk Tahun 2013 dan 2014 telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kinerja pembangunan, kesesuaian arah pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada sisa waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Gayo Lues. Hasil evaluasi paruh waktu tersebut memberikan kesimpulan bahwa : 1). Pemerintah Gayo Lues sudah berupaya melaksanakan RPJM Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 melalui 11 prioritas pembangunan dan telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi indikator kinerja yang ada, namun beberapa indikator makro masih perlu usaha keras dalam mencapai target RPJM Kabupaten Gayo Lues yang bersisa 2 tahun lagi, dan 2) Sasaran pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan perlu dirumuskan kembali karena masih bersifat kualitatif dan tidak didukung oleh data pada Kondisi Umum Daerah dan indikator kinerja daerah di dalam RPJM Kabupaten Gayo Lues.

Hasil evaluasi paruh waktu tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) RPJM Kabupaten Gayo Lues perlu untuk direvisi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM selama 2 (dua) tahun (2013

dan 2014), 2) Perlu untuk mengelompokkan secara tegas program-program yang mendukung prioritas pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah pada tahun sisa pelaksanaan RPJM Gayo Lues (di dalam dokumen Review RPJM Kabuten Gayo Lues) yang disertai oleh SKPK penanggungjawab, 3) Dalam mencapai visi, misi dan prioritas pembangunan daerah perlu didukung oleh indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur, 4) Perlu untuk menghapus penyebutan Visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bagian Kebijakan Umum dan Program Pembangunan) karena setelah RPJM Kabupaten Gayo Lues menjadi Qanun maka Visi tersebut menjadi Visi Kabupaten Gayo Lues, dan 4). Analisis secara lebih dalam terhadap program-program prioritas yang didukung oleh program pembangunan (program spesifik SKPK) yang dapat menjadi daya ungkit perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Gayo Lues. Demikian juga menghilangkan ego sektoral dalam pengalokasian anggaran pembangunan penting untuk dimplementasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJM Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 untuk tahun 2013 dan 2014 maka disusunlah Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya, Revisi RPJM Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 dijadikan sebagai acuan untuk pembangunan pada tahun sisa pelaksanaan RPJM Kabupaten Gayo Lues sampai Tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
22. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65)
23. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 66).
24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67)

1.3. Hubungan antar Dokumen

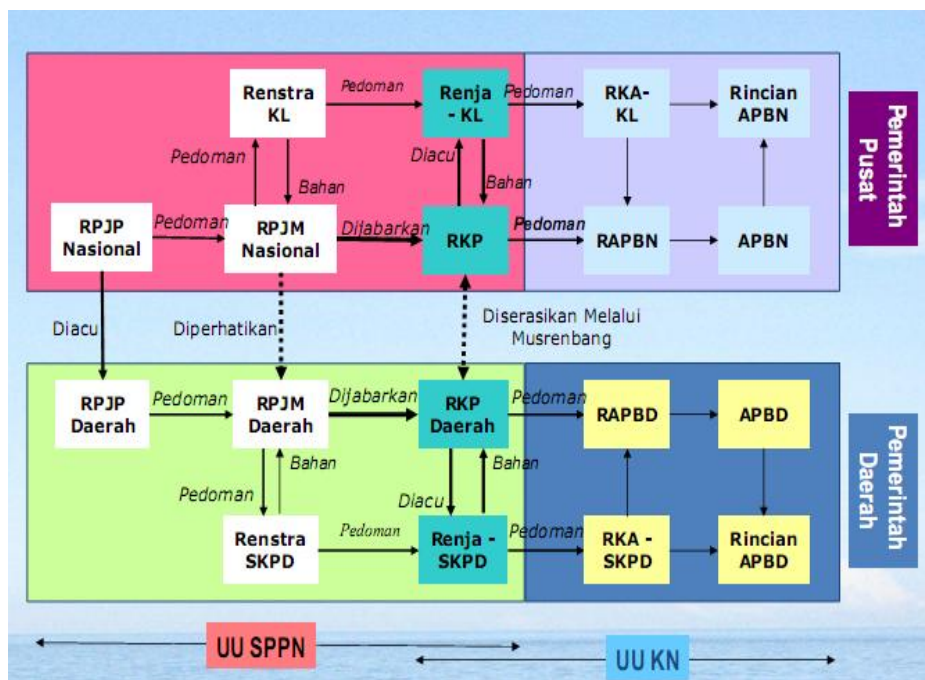
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan menjawab isu-isu strategis serta menjabarkan visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

RPJM Kabupaten Gayo Lues ini menjadi pedoman untuk membuat:

- Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues. untuk periode 5 (lima) tahun;
- RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Suatu dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, untuk periode satu tahun.

Dengan demikian kegiatan program yang akan dijalankan 5 (lima) tahun mendatang selaras dan terarah untuk merespon isu-isu strategis yang diidentifikasi melalui analisa situasi dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang tersedia serta analisa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan Ancaman atau SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats).

Keterkaitan antara RPJM dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJP, RPJM, Renstra SKPK, Renja SKPK, RKPD dan APBD disajikan di Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan antara RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan dengan RPJM Kabupaten Gayo Lues dengan dokumen perencanaan yang lain adalah sebagai berikut:

1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia,
2. Qanun Aceh Nomor tahun tahun 2012 tentang RPJP Aceh 2005-2025. RPJP Aceh Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan makro dan berwawasan dua puluh tahun yang memuat maksud dan tujuan, gambaran kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) untuk setiap jangka waktu lima tahunan
3. Qanun Gayo Lues Nomor 13 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues tahun 2005-2025
4. RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025
5. RPJM Aceh tahun 2012-2017 yang telah diqanunkan melalui Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2013.
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 - 2032

RPJM Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017 telah memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas dan mensinkronkan visi dan misi pembangunan Nasional dan visi misi pembangunan Aceh, sehingga RPJM Kabupaten Gayo Lues ini merupakan bagian dari

RPJMN dan RPJMA 2012-2017, dengan lebih spesifik merespon kepada isu-isu strategis dan visi misi Bupati/wakil bupati terpilih.

Oleh karena itu RPJM Kabupaten Gayo Lues menjadi pedoman dalam membuat dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti:

- a. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPK;
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian semua dokumen perencanaan pembangunan Gayo Lues, dengan pelaksanaan program yang berkualitas akan mampu mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 perubahan disusun berdasarkan parameter, indikator dan sistematika sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, bab ini berisikan tentang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan,** bab ini menjelaskan kecenderungan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta bagian penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta pola-pola alokasi belanja untuk setiap bidang pemerintahan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis,** pada bab ini akan memaparkan analisis regional Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Potensi dan Permasalahan dalam lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dijabarkan dalam isu-isu strategis untuk mendukung penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gayo Lues
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,** berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017 beserta penjelasannya, keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan strategis dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan,** bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,** berisi kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi program pembangunan daerah, Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan oleh SKPK sesuai dengan fungsinya
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan,** berisi tentang sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Program Prioritas SKPK disertai dengan kebutuhan pendanaannya
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah,** berisikan uraian tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai ke depan
- BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,** bab ini berisi program transisi dan kaidah pelaksanaannya

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 adalah:

1. Melakukan penyesuaian terhadap Qanun No 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 dengan visi, misi, kebijakan, program pokok serta prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah termasuk kemampuan keuangan dengan memperhatikan aspirasi pihak legislative dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan daerah.
3. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangkamembangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues.
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.
5. Memberikan tolok ukur dan mempermudah untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPK.

Tujuan penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMKabupaten Gayo Lues perubahan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

2. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas;
3. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan;
4. Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN GAYO LUES

2.1. Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi garis lintang 03° 40'26" - 04° 16'55" LU dan garis bujur 96° 43' 24" - 97° 55' 24" BT. Secara administrasi Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tabel 2.1.
Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS	
			Ha	%
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3.	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5.	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6.	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01
9.	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10.	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11.	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah			554.991,06	100,00

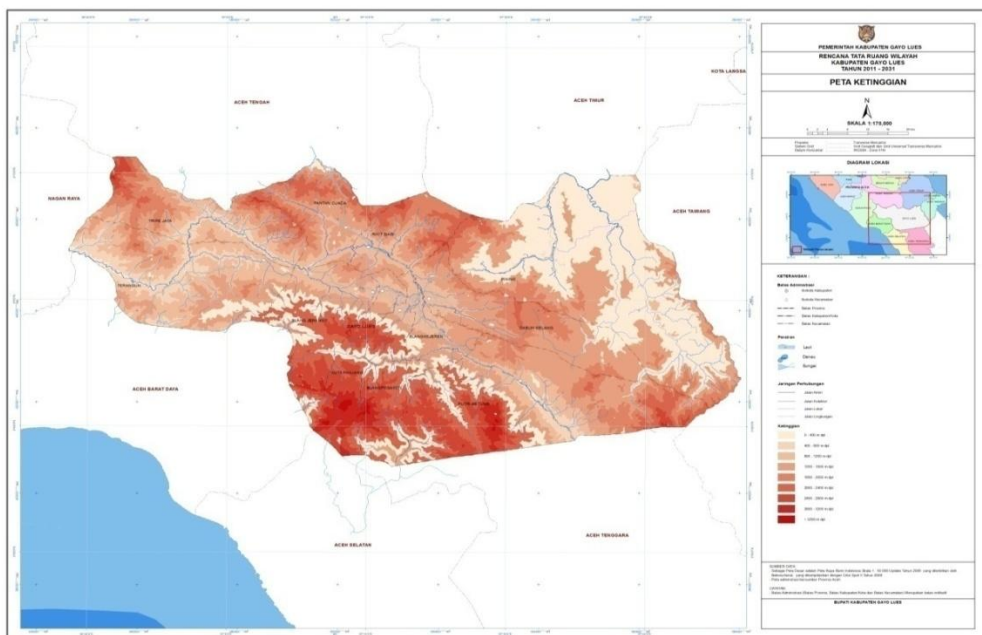
Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 554.991,06 Ha atau 10% dari luas Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25

Tabel 2.2.
Ketinggian Tempat, Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues

No.	Ketinggian (mdpl)	Luas (ha)	Presentase (%)
1	100 - 500	22,661.56	4.08
2	500 - 1.000	115,955.36	20.89
3	1.000 - 1.500	175,944.16	31.70
4	1.500 - 2.000	135,293.80	24.38
5	2.000 - 2.500	75,571.01	13.62
6	2.500 - 3.000	26,177.73	4.72
7	> 3.000	3,387.44	0.61
Jumlah		554,991.06	100,00

Sumber : Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032



Gambar 2.2 Peta KetinggianGayo Lues

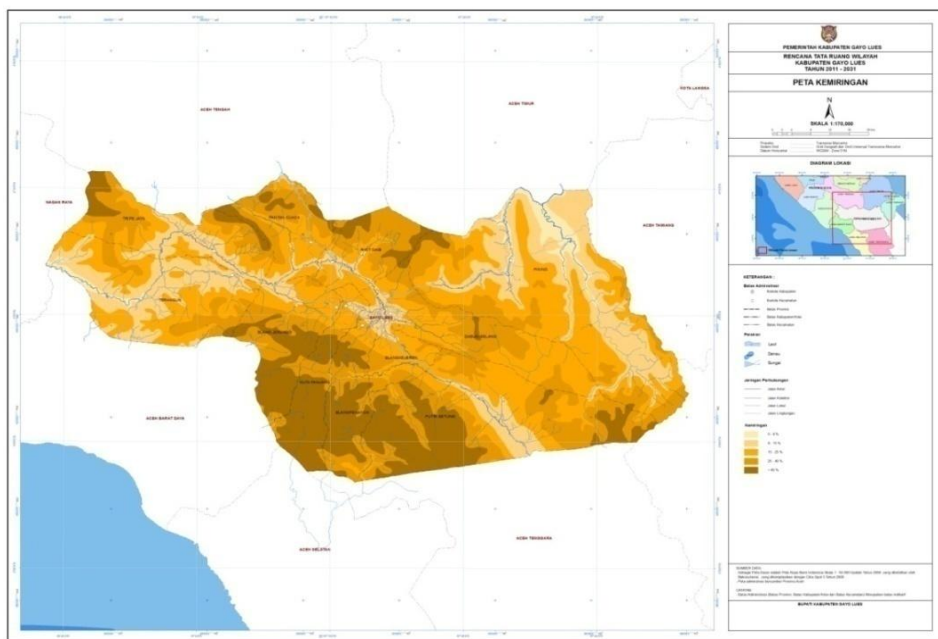
Sumber : Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032

Dilihat dari kelerengan, Kabupaten Gayo Lues mempunyai bentuk wilayah yang beragam mulai dari datar (kemiringan 0-3%) sampai bergunung (kemiringan diatas 40%). Sebagian besar wilayah kabupaten ini didominasi bentuk wilayah bergunung (kemiringan diatas 40%. Lebih jelasnya kemiringan lahan dapat dilihat **Tabel 2.3** serta **Gambar 2.3**.

Tabel 2.3.
Kemiringan Lahan, Bentuk dan Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues

NO.	KEMIRINGAN LERENG (%)	BENTUK WILAYAH	LUAS WILAYAH (HA)	PROSENTASE (%)
1.	00 - 03	Datar	967,42	0,17
2.	03 - 08	Landai	42.019,39	7,57
3.	08 - 15	Berombak	45.591,20	8,21
4.	15 - 25	Bergelombang	128.601,43	23,17
5.	25 - 40	Berbukit	94.024,51	16,94
6.	> 40	Bergunung	243.788,07	43,93
Jumlah			554.991,06	100,00

Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*



Gambar 2.3 Peta Kemiringan Gayo Lues

Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

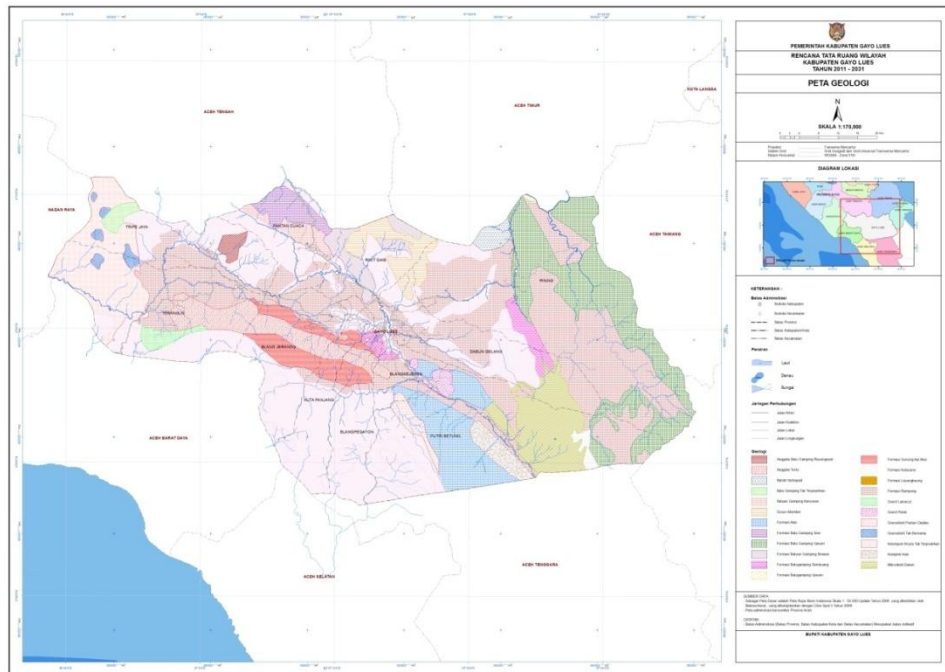
2.1.1.3. Geologi

Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan batuan di sebelah tengah dan utara terdiri dari Farmasi Batu Gamping. Sedangkan susunan Batu Granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah Formasi Gamping. Pada bagian selatan tersusun oleh Formasi Alas, Layangbaungdan Mikrodolit Dalam. Secara lebih rinci mengenai kondisi geologi dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4

Tabel 2.4
Formasi Geologi, Luasan Kabupaten Gayo Lues

No.	Formasi Geologi	Luas (ha)	Presentase (%)
1	Anggota Batu Gamping Reuengeuet	233.10	0.04
2	Anggota Terlis	1,947.06	0.35
3	Batolit Serbajadi	2,309.00	0.42
4	Batu Gamping Tak Terpisahkan	2,528.98	0.46
5	Batuan Gamping Kenyaran	2,537.02	0.46
6	Dusun Member	3,012.35	0.54
7	Formasi Alas	3,197.97	0.58
8	Formasi Batu Gamping Sise	3,229.74	0.58
9	Formasi Batu Gamping Ujeuen	3,841.20	0.69
10	Formasi Batuan Gamping Brawan	4,874.13	0.88
11	Formasi Batugamping Sembuang	5,466.74	0.99
12	Formasi Batugamping Ujeuen	7,307.51	1.32
13	Formasi Gunung Api Akul	7,463.25	1.34
14	Formasi Kutacane	8,606.63	1.55
15	Formasi Layangbaung	11,156.63	2.01
16	Formasi Layangbaung	15,355.75	2.77
17	Formasi Rampong	18,705.61	3.37
18	Granit Lamacut	25,363.12	4.57
19	Granit Palok	26,390.76	4.76
20	Granodiorit Pantan Dadalu	31,026.77	5.59
21	Granodiorit Tak Bernama	38,088.38	6.86
22	Kelompok Woyla Tak Terpisahkan	55,117.29	9.93
23	Komplek Kais	118,019.76	21.27
24	Mikrodiorit Dalam	159,212.32	28.69
JUMLAH		554,991.06	100,00

Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*



Gambar 2.4 Peta Geologi

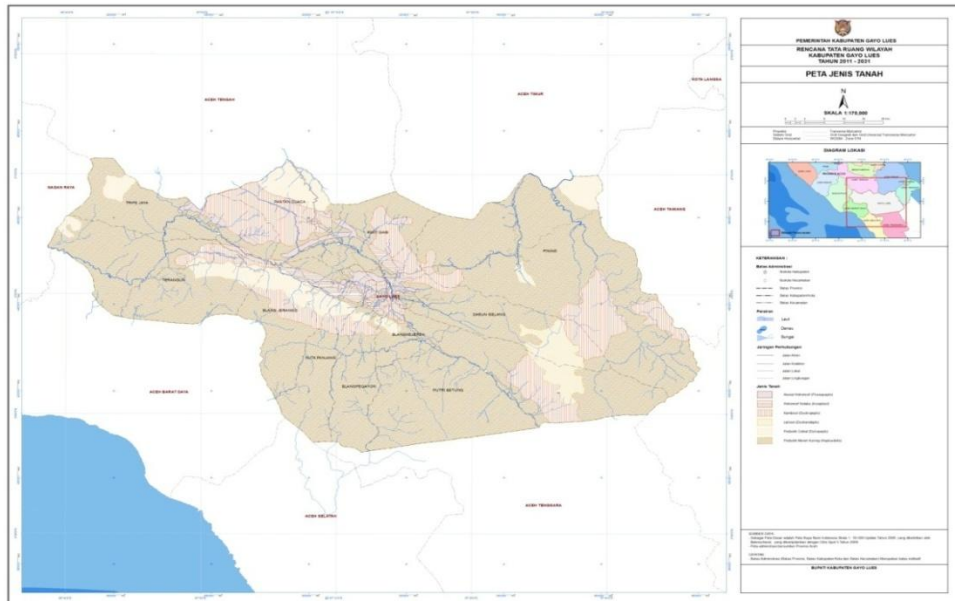
Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tanah jenis alluvial hidromof, hidromof kelabu, podsolik merah kuning, latosol dan podsolik coklat. Di lahan-lahan yang dijadikan persawahan didominasi oleh jenis tanah alluvial hidromof dan hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pergunungan jenis tanah pada umumnya adalah latosol, podsolik merah kuning dan kambisol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.5
Jenis Tanah, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues

No.	Jenis Tanah	Luas Wilayah (ha)	Presentase (%)
1	Aluvial Hidromof (fluvaquepts)	8,464.58	1,79
2	Hidromof Kelabu (eutrodepts)	7,273.93	1,18
3	Kambisol (dystropepts)	85,703.40	17,42
4	Latosol (dystrandeps)	13,333.41	2,39
5	Podsolik Merah Kuning (hapludults)	403,365.04	70,15
6	Podsolik Coklat (eutropepts)	36,850.70	7,06
JUMLAH		554,991.06	100,00

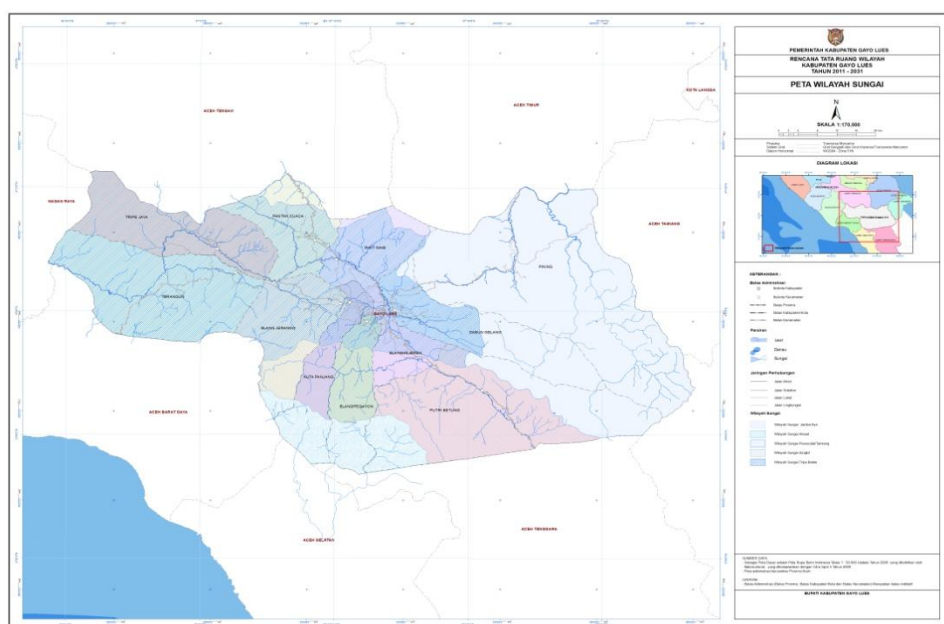
Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*



Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah
 Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

2.1.1.4. Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Gayo Lues sangat besar untuk dikembangkan. Kawasan Kabupaten Gayo Lues merupakan hulu aliran sungai besar yakni WS Alas-Singkil, WS Tripa-Bateue, WS Tamiang-Langsa, WS Krueng Baro-Kleut, dan WS Jambo Aye. Potensi sumber daya air tersedia cukup besar. Pemanfaatan secara umum adalah untuk pengairan pertanian, sumber air bersih dan sumber pembangkit listrik.



Gambar 2.6 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues
 Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air dilaksanakan melalui pembangunan irigasi untuk lahan pertanian. Luas lahan persawahan di Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 sebesar 7746,36 Ha yang kebanyakan adalah sawah berpengairan sederhana sekitar 5674.36 Ha, sawah beririgasi setengah teknis 2072 Ha. Luas lahan tersebut bertambah sebesar 0,36 Ha dibanding tahun 2012.

Tabel 2.6
 Luas Areal Pertanian dan Jenis Pengairan
 Kabupaten Gayo Lues

No	KECAMATAN	SAWAH BERPENGAIRAN (Ha)		SAWAH TADAH HUJAN (HA)	LUAS AREAL (Ha)
		Setengah Teknis	Sederhana Pedesaan		
1	Kuta Panjang	150	1305	-	1425
2.	Blangjerango	100	1310		1500
3.	Blangkejeren	423	603		1302
4.	Putri Betung	99	281		406
5.	Dabun Gelang	260	332		627
6.	Blang Pegayon	290	296		611
7.	Pining	40	181		231
8.	Rikit Gaib	265	470		750
9.	Pantan Cuaca	140	278		425
10.	Terangun	230	411		676
11.	Tripe Jaya	70	422		426
JUMLAH 2013		2072	5674.36		7746.36
2012		1 499	5802		7746
2011		1.992	5.889		8380.46
2010		5150	2664		8 424

Sumber : *Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2014*

2.1.1.5. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Gayo menurut Mohr, Schmidt dan Ferguson termasuk Iklim B (basah). Iklim Kabupaten Gayo Lues lebih basah jika dibandingkan dengan bagian utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak Kabupaten Gayo Lues di daerah medium sampai tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan yang tinggi.

Pada tahun 2014 rata-rata curah hujan tahunan di kabupaten ini berkisar 101.74 mm/bulan, dengan rata-rata hari hujan 13 hari per bulan.

Pada Bulan Mei mempunyai curah hujan bulanan mencapai puncak yaitu dengan curah hujan tertinggi 308 mm/bulan dengan jumlah hari hujan 14 hari/bulan.. Lebih jelasnya lihat **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7.
Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2014

NO	Bulan	Curah Hujan (mm)							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Januari	22	158	127	112	206			
2.	Pebruari	43.5	152	85	61.5	194.5			0
3.	Maret	217.5	161.5	447.5	226.5	311.5			0
4.	April	322.5	248	197.5	145.5	205			25
5.	Mei	207.0	108	161.5	59.5	168			308
6.	Juni	145.0	274	122.5	155.5	121.5			264
7.	Juli	108.5	248.5	43.5	87.5	28.5			69
8.	Agustus	145.5	181	155	85	294.5			17.5
9.	September	64.0	885	144	311	156.5			232.12
10	Oktober	287.0	129	286	219.5	85.5			-
.									
11	November	179.5	258	203.5	385.5	226			-
.									
12	Desember	180.5	150	218.5	218	243.5			-
.									
.	Rata-rata	160.21	246.08	182.625	172.25	186.75			101.74

Sumber : *Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2008-2014*.

Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27° C. Bulan terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30° C, sedangkan Bulan September- Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25° C. Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84–89% dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 %.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu

lahan. Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada.

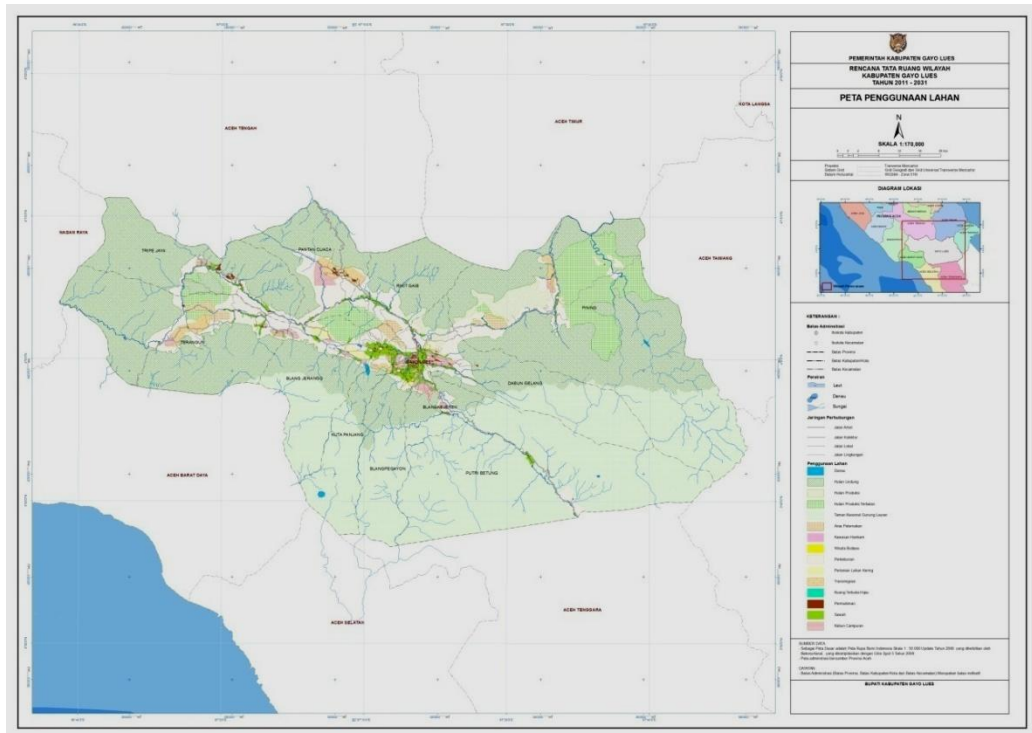
Tabel 2.8
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gayo Lues

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	188.348,49	42,32
2	Taman Nasional Gunung Lauser	203.538,20	36,98
4	Ruang Terbuka Hijau	50,90	0,01
5	Sungai	1.234,39	0,22
6	Hutan Produksi Terbatas	33.166,23	5,98
7	Hutan Produksi	8.657,09	1,56
8	Perkebunan	53.383,05	9,62
9	Sawah	5.508,93	0,99
10	Pertanian Lahan Kering	2.180,84	0,39
11	Peternakan	3.793,69	0,68
12	Permukiman	6.533,50	1,18
14	Kawasan Hankam	12,06	0,00
15	Kawasan Wisata	397,19	0,00
	Jumlah	554.991,10	100,00

Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

Berdasarkan analisis citra spot 5 Kabupaten Gayo Lues tahun 2009, penggunaan lahan di wilayah perencanaan didominasi oleh penggunaan untuk kawasan hutan mencapai luas 433.710,01 Ha, atau sekitar 78,15% dari total luas wilayah kabupaten. Penggunaan lahan untuk kawasan hutan ini terdiri dari hutan lindung seluas 188.348,49 Ha (42,32%), hutan produksi terbatas seluas 33.166,23 Ha (5,98%), hutan produksi 8.657,09 Ha (1,56%), dan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 203.538,84 Ha (36,98%).

Kegiatan perkebunan merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas 53.383,05 Ha, atau sekitar 9,62%. Selanjutnya permukiman mempunyai luas sebesar 6.533,50 Ha, atau sekitar 1,18%. Penggunaan lahan eksisting paling kecil adalah kawasan hankam. Lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Gayo Lues tahun 2011 dapat dilihat pada **Tabel 2.8** dan **Gambar 2.7**.



Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues
 Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang saat ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkesinambungan.

Berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : HK.01 03-Dr/447 tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Qanun (Ranqanun) Kabupaten Gayo Lues tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2032 dan Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 650/13221 tanggal 23 Mei 2012, penetapan wilayah pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

NO.	HIERARKI / FUNGSI	PUSAT	KETERANGAN
1.	PKL	1. BLANGKEJEREN	Ibukota Kabupaten Gayo Lues
2.	PKLp	1. TERANGUN	Ibukota Kecamatan Terangun
		2. PINING	Ibukota Kecamatan Pining
3.	PPK	1. KUTA PANJANG	Ibukota Kecamatan Kuta Panjang
		2. AMPAKOLAK	Ibukota Kecamatan Rikit Gaib
		3. CINTA MAJU	Ibukota Kecamatan Blangpegayon
		4. BADAK BUR JUMPE	Ibukota Kecamatan Dabun Gelang
		5. REREBE	Ibukota Kecamatan Tripejaya
		6. BUNTUL GEMUNYANG	Ibukota Kecamatan Blangjerango
		7. GUMPANG	Ibukota Kecamatan Putri Betung
		8. KENYARAN	Ibukota Pantan Cuaca
4.	PPL	1. PANTAN ANTARA	
		2. AIR JERNIH	
		3.. SANGIR	
		4. PINTU RIME GAYO	
		5. GOH LEMU	
		6. PASIR ANTARA	
		7. MARPUNGE	

Sumber : *Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2032*

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan tanah longsor umumnya terjadi akibat proses perpindahan massa tanah oleh aliran permukaan (*run off*) pada wilayah yang mempunyai topografi yang curam. Permasalahan banjir dan longsor yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/ pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/pengelolaan longsor adalah pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan. Kawasan rawan longsor di Kabupaten Gayo Lues berada di :

- a. Desa Pungkejaya, Desa Ramung di Kecamatan Putri Betung;
- b. Desa Genting di Kecamatan Dabun Gelang;
- c. Desa Ise-Ise di Kecamatan Pantan Cuaca; dan
- d. Desa Pining, Desa Pertik, Desa Ekan, Desa Pasir Putih di Kecamatan Pining;

Kawasan rawan banjir tidak ditemui secara permanen di Kabupaten Gayo Lues. Hanya pada beberapa daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar di wilayah Kabupaten Gayo Lues, yaitu Krueng Tripe dimana bencana banjir yang terjadi hanya sesaat. Wilayah tersebut dikategorikan rawan banjir karena kondisi kawasan tangkapan air yang sempit, drainase yang jelek dan pengelolaan kawasan atasnya yang tidak memperhatikan kaidah konservasi, menyebabkan sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan (*run off*) yang terkumpul di wilayah lembah.

2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Gayo, Alas, Jawa, Minang, Batak dan suku lainnya dalam jumlah kecil. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 86.262 jiwa yang terdiri dari 42.777 laki-laki dan 43.485 perempuan dengan rasio jenis kelamin 98. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni sebanyak 26.492 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca yakni 3.777 jiwa.

Tabel 2.10
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk	KepadatanPenduduk (Jiwa/Km ²)	
1. KutaPanjang	269.53	7948	29.49	
2. BlangJerango	382.42	6917	18.09	
3. Blangkejeren	166.06	26492	159.53	
4. PutriBetung	996.86	7162	7.18	
5. DabunGelang	444.71	5721	12.86	
6. BlangPegayon	272.18	5528	20.31	
7. Pining	1350.08	4683	3.47	
8. RikitGaib	264.08	4088	15.48	
9. PantanCuaca	295.07	3777	12.80	
10. Terangun	671.80	8623	12.84	
11. Tripe Jaya	437.13	5323	12.18	
	2014	5 579.92	86 262	15.54
Jumlah	2013	5 549.92	84511	15.23
<i>Total</i>	2012	5549.92	82962	14.95
	2011	5719.58	81 382	14.23

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2015

Kepadatan tersebut merupakan kepadatan kotor atau jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan seharusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas permukiman. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel 2.10

Laju pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2007-2014 menunjukkan angka positif sebesar 2% pertahun. Angka laju pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Dabun Gelang mencapai 3.40% . Lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.11**

Tabel 2.11
Distribusi penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2014

N O.	KEC	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)								Pertumbuhan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kuta Panjang	7,183	7,245	7,018	7,330	7,497	7,644	7,785	7,948	1,27
2	Blang Jerango	6,217	6,270	6,087	6,379	6,524	6,652	6,776	6,917	1,34
3	Blangkejeran	21,091	21,274	22,971	24,434	24,994	25,479	25,955	26,492	2,89
4	Putri Betung	6,478	6,534	6,313	6,607	6,760	6,888	7,015	7,162	1,26
5	Dabun Gelang	4,378	4,416	4,838	5,277	5,397	5,502	5,606	5,721	3,40
6	Blang Pegayon	4,779	4,820	4,493	5,099	5,214	5,319	5,419	5,528	1,84
7	Pining	4,016	4,051	4,133	4,320	4,419	4,506	4,589	4,683	1,94
8	Rikit Gaib	3,822	3,855	3,825	3,770	3,855	3,935	4,005	4088	0,84
9	Pantan Cuaca	3,484	3,517	3,074	3,481	3,561	3,629	3,697	3,777	1,01
10	Terangun	7,669	7,735	7,589	7,953	8,138	8,290	8,450	8,623	1,48
11	Tripe Jaya	5,034	5,077	4,824	4,910	5,023	5,118	5,214	5,323	0,70
Jumlah		74,151	74,794	75,165	79,560	81,382	82,962	84,511	86 262	2

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2008-2014

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun rencana, maka dilakukan proyeksi terhadap jumlah penduduk. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sekitar 2.21% pada tahun 2011 maka perkiraan laju kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2011-2020 dapat dilihatdapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.12
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020

Kecamatan	Jumlah penduduk			
	2011	2015	2017	2020
Blangkejeran	24,994	26,775	27,712	29,180
Kuta Panjang	7,497	8,031	8,312	8,753
Terangun	8,138	8,718	9,023	9,501
Rikit Gaib	3,855	4,130	4,274	4,501
Pining	4,419	4,734	4,900	5,159
Blang Jerango	6,524	6,989	7,233	7,617
Blang Pegayon	5,214	5,585	5,781	6,087
Dabun Gelang	5,397	5,782	5,984	6,301
Putri Betung	6,760	7,242	7,495	7,892
Pantan Cuaca	3,561	3,815	3,948	4,157
Tripe Jaya	5,023	5,381	5,569	5,864
Total	81,382	87,180.15	90,232.34	95,012.16

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 2.13
 Komposisi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014

KelompokUmur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
1. 0-4	5490	5403	10893	
2. 5 - 9	4922	4802	9724	
3. 10 - 14	4665	4586	9251	
4. 15-19	3801	3838	7639	
5. 20-24	3672	3960	7632	
6. 25-29	4421	4495	8916	
7. 30-34	3652	3780	7432	
8. 35-39	3279	3131	6410	
9. 40-44	2521	2561	5082	
10. 45-49	2020	2155	4175	
11. 50-54	1529	1543	3072	
12. 55-59	1009	978	1987	
13. 60-64	745	804	1549	
14. 65-69	451	561	1012	
15. 70-74	284	428	712	
16. 75+	316	460	776	
Jumlah	2014	42 777	43 485	86 262
	2013	41957	42554	84511
	2012	41131	41831	82962
	2011	40493	40889	81382

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2015.

Struktur umur penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berbentuk piramida yang menggambarkan jumlah penduduk yang berumur lebih kecil

lebih banyak dibandingkan yang berumur lebih tua. Komposisi penduduk pada usia subur (20-34) menggambarkan perkiraan laju pertumbuhan penduduk ke tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Gayo Lues seperti terlihat pada **Table 2.13** di atas

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gayo Lues belum bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Gayo Lues. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran, kategori Konstruksi, kategori Industri Pengolahan, dan kategori administrasi pemerintahan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Tabel 2.14
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,35	41,29	40,73	40,44	40,04
B	Pertambangan dan Penggalian	3,35	3,34	3,14	3,23	3,34
C	Industri Pengolahan	10,19	10,43	10,61	10,48	10,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,27	9,3	9,93	10,34	10,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor	10,4	10,63	10,94	10,84	10,72
H	Transportasi dan Pergudangan	2,44	2,43	2,4	2,43	2,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
J	Informasi dan komunikasi	1,49	1,44	1,38	1,32	1,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,89	0,94	1,12	1,06
L	Real Estat	2,97	2,97	2,97	2,99	2,98

M N	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,58	10,3	9,92	9,76	9,77
P	Jasa Pendidikan	2,57	2,51	2,55	2,56	2,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,42	3,35	3,41	3,41	3,4
R S T U	Jasa Lainnya	0,42	0,41	0,41	0,4	0,39
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Tahun 2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Perekonomian Gayo Lues pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gayo Lues tahun 2014 mencapai 4,13 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi sebesar 8,35 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.15**

Tabel 2.15.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010- 2014(%)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	4,66	3,8	3,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4,12	4,23	6,73	4,37
C	Industri Pengolahan	5,4	6,04	2,61	3,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	6,78	7,36	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur Ulang	6,3	5,48	7,15	5,45
F	Konstruksi	11,61	10,56	7,95	8,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor	4,79	7,14	7,11	6,36
H	Transportasi dan Pergudangan	5,19	6,63	6,28	5,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,96	3,54	3,59
J	Informasi dan komunikasi	3,62	2,19	1,98	2,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,42	5,18	19,75	8,24
L	Real Estat	3,21	5,28	3,97	4,49
M N	Jasa Perusahaan	1,82	4,56	3,26	3,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,92	0,95	2,14	1,3

		Wajib			
P	Jasa Pendidikan	4,47	6,09	5,72	5,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,22	5,78	6,13	5,36
R S T U	Jasa Lainnya	2,8	5,41	4,11	4,6
Produk Domestik Regional Bruto		4,76	5,29	4,65	4,13

Sumber : PDRB Tahun 2015

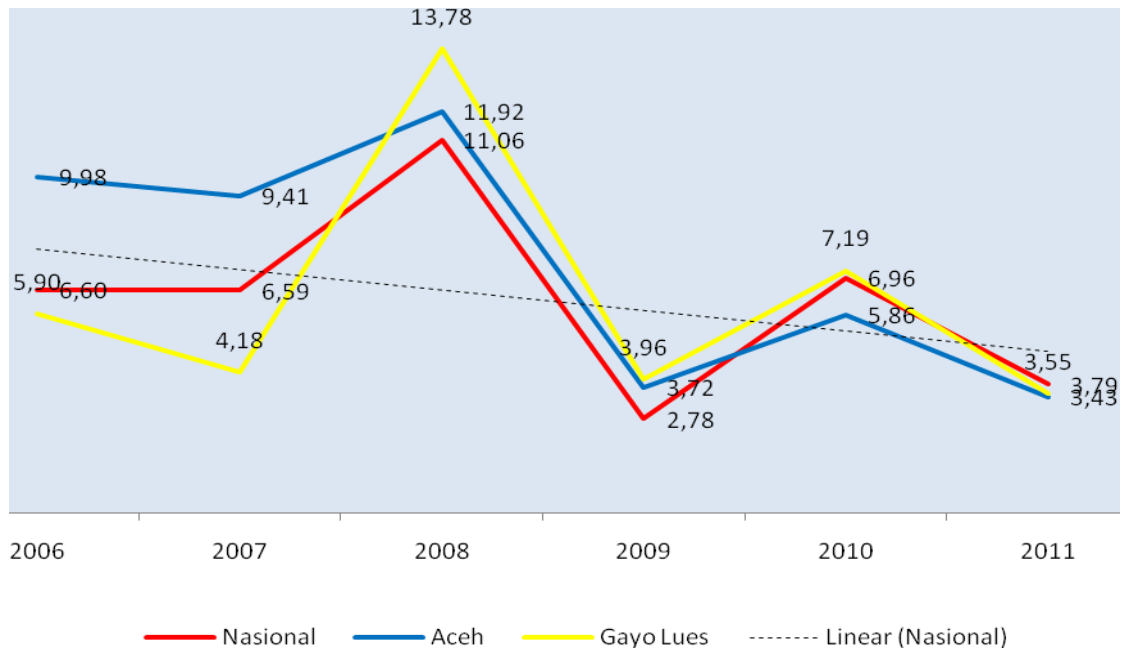
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu sehingga menyebabkan kenaikan harga barang/jasa secara umum yang berlaku di suatu wilayah. Dari pengertian dimaksud maka inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi di kabupaten Gayo Lues beberapa tahun yang lalu mengalami fluktuasi, tahun 2006 sebesar 5,90% dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 4,18% dan pada tahun 2008 kembali naik sebesar 13,78% (sumber; Bank Indonesia Provinsi NAD tahun 2008). Naik turunnya inflasi ini juga terjadi di tingkat propinsi.



Gambar 2.8 Inflasi Nasional, Aceh dan Gayo Lues

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk sebagai hasil proses produksi. Besaran PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tahun 2007, nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Gayo Lues sebesar 8.05 juta rupiah, pada tahun 2010 mencapai 10,76 juta rupiah dan pada tahun 2013 mencapai 13.26 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2011 PDRB perkapita Kabupaten Gayo Lues meningkat rata-rata sebesar 8.2 persen.

Tabel 2.16
Perkembangan Pendapatan per Kapita 2007-2013 (Juta RP)

			2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
1	PDRB Atas Dasar Harga Pasar	Hb	597.540	697,035	775,478	856,565	937,644	1,026,250	1,120,885
		Hk	373.204	391,204	409,868	431,144	451,257	473,717	495,422
2	Penduduk Pertengahan Tahun		74.151	74,794	75,165	79,560	81,382	82,962	84,511
3	PDRB Per Kapita	Hb	8.058.427	9,319,402	10,317,010	10,766,277	11,521,518	12,370,121	13,263,189

		Hk	5.033.024	5,230,416	5,452,906	5,419,106	5,544,923	5,710,048	5,862,221
4	Pendapatan Regional Per Kapita	Hb	7.635.475	8,830,267	9,775,515	10,201,202	10,919,702	11,727,756	12,577,147
		Hk	4.762.987	4,949,789	5,160,342	5,128,356	5,247,422	5,403,688	5,547,697

Sumber : PDRB Tahun 2014

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

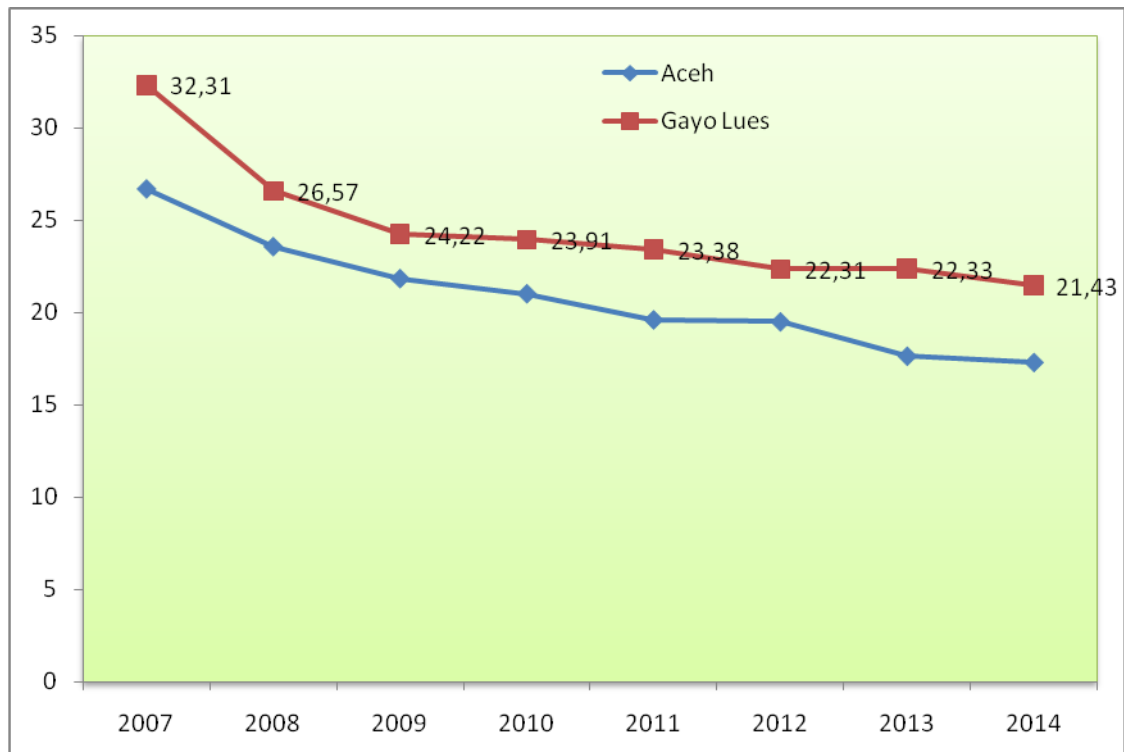
2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberikan kesempatan besar bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada di daerah. Transmigrasi berkembang menjadi program pengembangan wilayah dan menjadi salah satu program integrasi daerah dimana program pembangunan daerah dapat diarahkan kepada pembangunan pertanian yaitu peningkatan produksi pertanian yang dilakukan dengan pembukaan lahan-lahan baru atau ekstensifikasi.

Jumlah warga yang telah ditempatkan di kabupaten Gayo Lues mencapai 1.385 KK terdiri dari 5.858 jiwa yang tersebar di 8 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi), teridentifikasi UPT telah menjadi desa definitif/gampong sebanyak 5 lokasi desa. Pembangunan transmigrasi sejak tahun 2005-2010 telah dibangun permukiman transmigrasi berjumlah 3 lokasi dengan pembangunan rumah sebanyak 315 Unit.

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2007-2014 ditampilkan pada Gambar berikut:



Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin

Sumber : *Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2008-2015*

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2007 terus menunjukkan penurunan. Akan tetapi secara umum angka kemiskinan Kabupaten Gayo Lues selalu lebih besar dari angka kemiskinan Provinsi Aceh. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues sebesar 23,91 persen. Angka ini turun sebesar 1,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 24,22 persen. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Aceh yang sebesar 20,98 persen.

Tingginya angka kemiskinan ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Gayo Lues. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang. Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal, pemasaran

produk unggulan masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu menjadi program prioritas di 5 (tahun) mendatang.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues selama kurun waktu 2007-2013 terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari 22,31 persen di tahun 2012 menjadi 22,33 persen di tahun 2013. Kenaikan persentase penduduk miskin ini disebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan di tahun 2013 sehingga menyebabkan banyak rumah tangga pertanian di kabupaten ini yang mengalami gagal panen, padahal sebagian besar penduduk kabupaten ini (60,46 persen) menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2013 sebesar 90.37 persen. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 87,89 persen. Meskipun begitu, persentase ini merupakan yang terendah se-Provinsi Aceh.

Tabel 2.17.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues

	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gayo Lues	86.7	84.41	94.04	89.31	90.16	87.89	90.37
Aceh	96.2	95.94	96.39	96.88	95.84	96.11	96.75

Sumber : BPS (Indikator Kesejahteraan Masyarakat Prov Aceh) 2014

Rendahnya AMH kabupaten ini sebagian besar disumbang oleh generasi tua yang tidak mampu mengenyam pendidikan di usia sekolah mereka. Hal itu disebabkan akses pendidikan yang sangat sulit mengingat pada saat itu Kabupaten ini sangat terisolir.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dalam melihat fokus kesejahteraan sosial di masyarakat kabupaten Gayo Lues. Berikut hasil analisa dari indikator angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gayo Lues

	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	8,28	8,32	8,36	8,44	8,71
Gayo Lues	5,59	6,24	6,88	7,00	7,04

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2014 sekitar 7.04 tahun. Naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7.00 tahun. Angka 7.04 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Gayo Lues belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun dan hanya sempat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang kelas 2 SLTP

2.2.2.2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Komponen angka harapan hidup diharapkan mampu menggambarkan keadaan lama hidup sekaligus hidup sehat dari masyarakat. Angka harapan hidup yang tinggi dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan karena harapan hidup merupakan hasil dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi penduduk.

Tabel 2.19
Angka Harapan Hidup Kabupaten Gayo Lues

	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	69,08	69,15	69,23	69,31	69,35
Gayo Lues	64,24	64,31	64,38	64,42	64,44

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2014 sebesar 64.44 tahun naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 64.42 tahun. Angka sebesar 64.44 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2014 mempunyai peluang rata-rata kelangsungan hidupnya hingga 64 tahun ke depan. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di bidang kesehatan selama periode 2010-2014.

Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Gayo Lues masih dibawah rata-rata daripada kondisi penduduk di Provinsi Aceh secara umum. Demikian pula masih rendah dari pada penduduk Indonesia secara keseluruhan. Karena gizi, kesehatan, ketrampilan dan pengetahuan merupakan faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia maka faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan sebagai pembetulan modal insani

b. Angka Kematian bayi dan Ibu

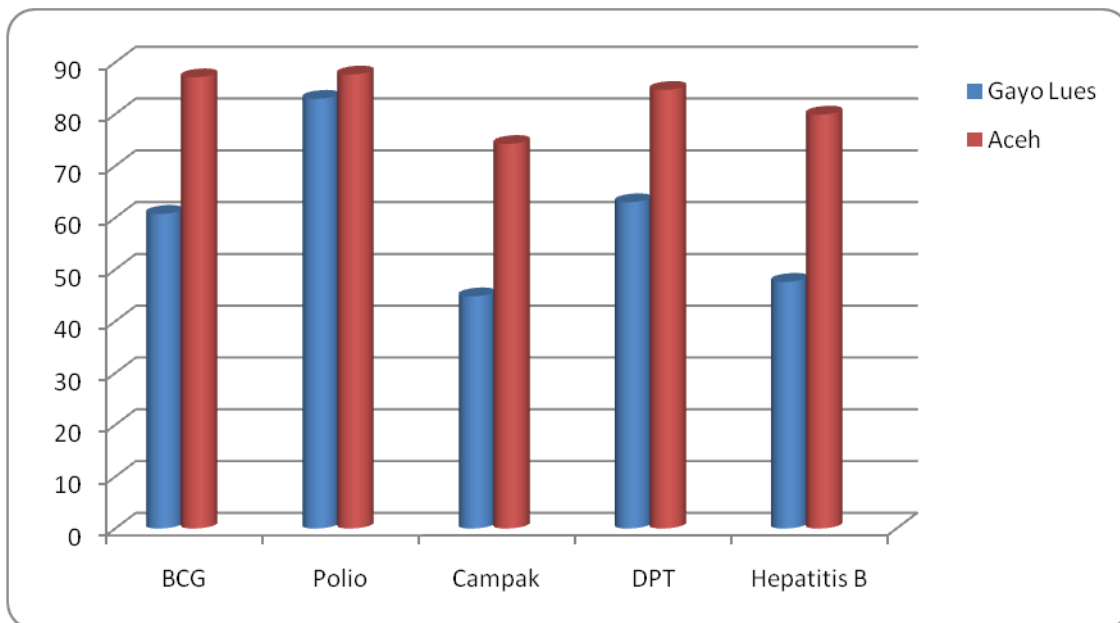
Angka Harapan Hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi berarti akan semakin rendah usia harapan hidup. Sebaliknya semakin rendah angka kematian bayi maka semakin tinggi usia harapan hidup. Hal ini disebabkan karena angka kematian bayi sangat mencerminkan pola kematian penduduk secara umum. Secara jelas Todaro (2002) menyebutkan bahwa angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya yang pada akhirnya memperbesar kematian bayi dan anak.

Kematian ibu dan bayi sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan ibu dan bayi terutama saat melahirkan akan lebih terjaga jika ditolong oleh tenaga profesional dalam hal ini dokter atau bidan. Meskipun tenaga dukun bayi sangat membantumasyarakat, namun pengetahuan dan keterampilan dukun harus ditingkatkan. Keberadaan dukun bayi masih diandalkan masyarakat mengingat keterbatasan tenaga medis terutama bagi daerah-daerah terpencil.

Pada tahun 2014 Penolong persalinan pertama balita di Kabupaten Gayo Lues sebagian besar sudah ditangani oleh bidan (59 persen) akan

tetapi persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun bersalin masih cukup tinggi yaitu 22 persen. Bahkan penolong persalinan pertama oleh famili/keluarga juga menunjukkan angka yang tidak kalah tingginya yaitu 12 persen. Sementara itu persalinan pertama yang ditolong oleh dokter dan paramedis lainnya masing-masing sebesar 6 persen dan 15 persen. Proses persalinan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena resiko kematian yang menyertainya sangat tinggi.

Beberapa penyakit yang seringkali menyerang bayi dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu peranan imunisasi sangat bermanfaat bagi bayi untuk kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Imunisasi polio, hepatitis B, BCG, DPT, dan campak merupakan jenis yang lazim dilakukan untuk bayi di puskesmas-puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Terlihat pada Gambar 2.10 bahwa dari 5 jenis imunisasi tersebut, jumlah bayi yang diimunisasi semakin meningkat dari tahun tahun sebelumnya.



Gambar 2.10 Persentase Imunisasi Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tahun 2014

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari indikator Angka Kesakitan (Morbidity Rate). Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2011 sebesar 29,31 persen. Angka tersebut turun jauh

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 42,48 persen dan lebih rendah dari Angka Kesakitan Provinsi Aceh yang sebesar 30,62 persen dari total penduduk Aceh di pertengahan tahun 2011. Pada tahun 2013, angka kesakitan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 11,01 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Angka Kesakitan Provinsi Aceh yang sebesar 14,73 persen.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 puskesmas/pustu masih menjadi rujukan utama (53,81 persen) bagi penduduk kabupaten ini untuk berobat jalan. Rumah sakit pemerintah menempati urutan kedua (22,26 persen) disusul praktek dokter/poliklinik yang dikunjungi oleh sekitar 15,92 persen dari penduduk yang berobat jalan. Rumah sakit swasta, praktek tenaga kesehatan, dan kategori lainnya berada di urutan berikutnya dengan total persentase sebesar 8,01 persen. Puskesmas/pustu menjadi rujukan utama penduduk disebabkan selain karena biayanya yang murah juga karena fasilitas ini telah merata terdapat di setiap kecamatan dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Pada tahun 2014 puskesmas/pustu masih menjadi pusat rujukan masyarakat dalam berobat jalan (52,05 persen), disusul rumah sakit pemerintah (21,81 persen) dan praktek dokter di urutan berikutnya (6,32 persen). Puskesmas menjadi rujukan masyarakat dalam berobat disebabkan biayanya yang murah dan ketersediaan fasilitas ini yang telah merata di setiap kecamatan dibandingkan fasilitas kesehatan yang lain

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM selama periode 2010-2014. Dimana IPM Gayo Lues naik 2.4 poin dalam jangka empat tahun. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini menjadi pertanda bahwa kualitas pembangunan manusia di Gayo Lues dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin membaik.

Angka IPM Gayo Lues pada tahun 2014 mencapai 63.34 berarti tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 63.34 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100). Dengan capaian sebesar 63.34, Gayo Lues menempati urutan ke 19 dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh

Kode	Prov/Kab/Kota	Tahun					Peringkat
		2010	2011	2012	2013	2014	
1100	ACEH	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81	11
1101	Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	22
1102	Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27	17
1103	Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35	21
1104	Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,90	15
1105	Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57	18
1106	Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96	6
1107	Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31	11
1108	Aceh Besar	69,76	69,94	70,10	70,61	71,06	5
1109	Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87	10
1110	Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71	9
1111	Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	14
1112	Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08	20
1113	Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34	19
1114	Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09	13
1115	Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58	16
1116	Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,30	12
1117	Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70,00	7
1118	Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89	8
1171	Kota Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	82,22	1
1172	Kota Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,50	4
1173	Kota Langsa	71,79	72,15	72,75	73,40	73,81	3
1174	Kota Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44	2
1175	Kota Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

2.2.2.4. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2011 telah mencapai sekitar 64,76 persen dari total jumlah

penduduk. Dari total jumlah penduduk usia kerja tersebut, sekitar 65,24 persennya (34.381 jiwa) termasuk dalam angkatan kerja. Sebagian besar dari angkatan kerja (93,07 persen) telah bekerja dan sebagian kecil lainnya (6,93 persen) masih menganggur. Angka 65,24 persen menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedangkan angka 93,07 persen dan 6,93 persen masing-masing menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Hampir separuh (48,01 persen) dari mereka yang bekerja di kabupaten ini berpendidikan SD ke bawah 16,76 persen berpendidikan SLTP, 22,37 persen berpendidikan SLTA, dan hanya 12,86 persen yang berpendidikan SLTA ke atas. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja di kabupaten ini bukanlah fenomena yang luar biasa mengingat lebih dari separuh (53,03 persen) pekerja bekerja di sektor pertanian yang notabene tidak membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Hanya sekitar 13,64 persen pekerja yang bekerja di sektor industri dan 33,33 persennya bekerja di sektor perdagangan dan jasa

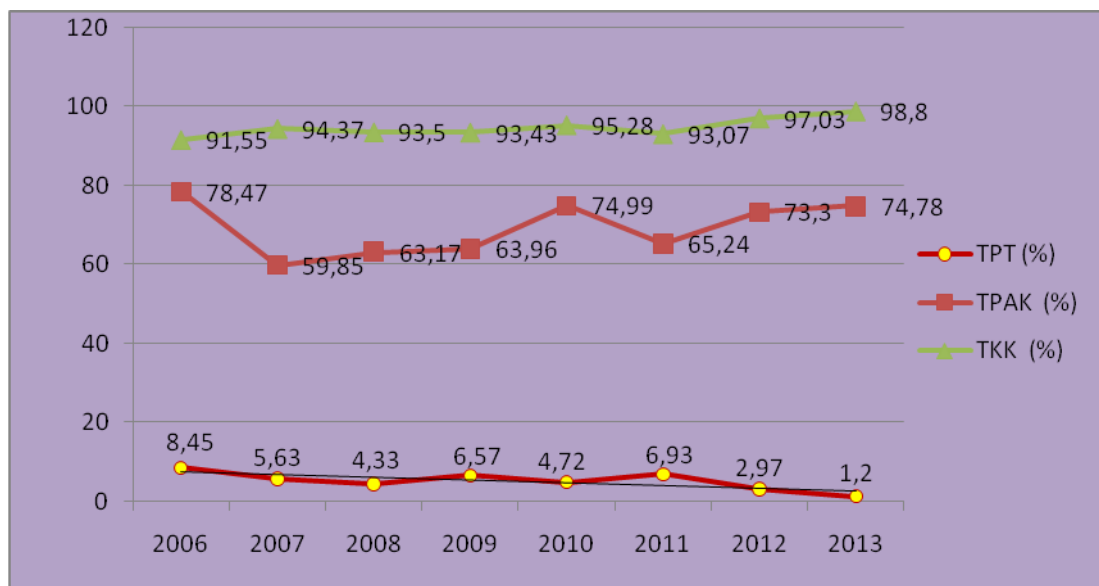
TPT usia muda (15-24 tahun) juga menunjukkan angka yang kecil, yaitu sekitar 23,26 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja usia muda, sekitar 23 orang yang menganggur dan 77 orang lainnya bekerja. TPT usia muda sangat representatif dalam mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah di masa yang akan datang. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 sebanyak 1,20 persen. Dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. TPT perempuan sebesar 0,99 persen dan TPT laki-laki sebesar 1,48 persen. Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah pengangguran semakin meningkat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. sekitar 42 persen mereka yang menganggur adalah yang lulusan perguruan tinggi

Berdasarkan status pekerjaannya, lebih dari tiga per empat (75,76 persen) pekerja di Kabupaten Gayo Lues bekerja sebagai pekerja informal 24,24 persen lainnya bekerja sebagai pekerja formal. Persentase terbanyak dari pekerja informal tersebut adalah mereka yang berstatus berusaha

dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga (38,35 persen) dan mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga (24,75 persen).

Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, TPAK mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke 2010 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2011. Pada periode 2010-2011 terjadi penurunan TPAK dari 74,99 persen menjadi 65,24 persen. Hal sebaliknya terjadi untuk TPT dimana TPT mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2010 akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2011. Kenaikan pada periode 2010-2011 adalah dari 4,72 persen menjadi 6,93 persen.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gayo Luestahun 2013 sebanyak 74,78 persen dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Dari seluruh angkatan kerja tersebut masih terdapat 1,20 persen yang menganggur dan sisanya (98,80 persen) sudah bekerja.



Gambar 2.11 Tingkat TPT, TPAK dan TKK Kabupaten Gayo Lues

2.2.3. Fokus Agama Adat dan Budaya

2.2.3.1. Syariat Islam

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Pemerintah Gayo Lues komitmen “Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah”, karena dengan mengarahkan pola pikir dan budaya hidup Islami masyarakat akan hidup damai, sehat, cerdas sehingga

sejahtera. Nilai-nilai tersebut sudah diteladankan Rasulullah Muhammad S.A.W.

Secara etimologis yang dimaksud “syari’at” adalah jalan atau rute yang ditetapkan oleh agama Islam yang harus diacu atau dirujuk (Masykuri Abdillah dkk, hlm 157). Menurut istilah “syari’at Islam” adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an dan dicontohkan oleh rasul-Nya Muhammad SAW dalam hadis dan harus diikuti oleh setiap muslim. Ajaran-ajaran yang tertuang dalam syari’at itu tidak semata-mata hanya mengenai hubungan manusia (hamba) dengan tuhanNya, akan tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan alam serta manusia dengan manusia. Dengan demikian syari’at mencakup ajaran yang terkait dengan aqidah (keyakinan/keimanan), akhlak (etika), ibadah (hubungan manusia dengan tuhanNya) serta muamalat (hubungan manusia dengan manusia-sosial kemasyarakatan dan dengan alam sekitar).

Dari syari’at itu dikembangkan hukum-hukum yang berlaku dalam situasi konkrit (*fiqh*) dengan pendekatan-pendekatan sistematis, sosiologis serta tujuan (kemaslahatan, keadilan maupun kepatuhan kepada Allah SWT) baik secara perorangan maupun kelompok (*ijtima’y*). Bidang inilah yang termasuk pengertian syari’at dalam arti sempit.

Sejauh ini program untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Gayo Lues masih dalam ruang lingkup pembinaan desa percontohan, peningkatan kapasitas petugas WH dan TP2K, pelayanan pengantaran jama’ah haji, pelaksanaan musabaqah. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi baru melaksanakan penataan, pembentukan dan pemberdayaan Baitul Mal yang dilakukan tahun 2007, 2008 dan 2009. Anggaran yang dialokasikan ke Dinas Syari’at Islam relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa SKPK lain. Kenyataan ini memberi gambaran bahwa pemerintah daerah menganggap pelaksanaan Syari’at Islam sudah mandiri. Di sisi lain, pemerintah daerah dipandang masih perlu memperhatikan pentingnya mendukung Dinas Syari’at Islam dalam memberikan kontribusi kepada pengelolaan pemerintah. Misalnya dalam hal penetapan peraturan, seharusnya lebih banyak mempertimbangkan hukum-hukum yang dijabarkan dalam ilmu hukum

Islam, baik masalah hukum, perekonomian, penataan ruang, sosial dan budaya.

2.2.3.2. Budaya dan Pariwisata

Masyarakat Gayo mempunyai adat-istiadat yang khas. Kental dengan nuansa Islami. Berbagai ungkapan, tersurat dalam pepatah-pepatah bijak dengan makna yang dalam dan banyak ditemukan dalam kebudayaan Gayo. Salah satunya adalah ungkapan: *Asal Linge Awal Serule*, petuah bijak yang menisyratkan jati diri. Ungkapan tersebut berarti kalau suku Gayo berasal dari Linge dan berawal dari Selure. Ungkapan *Asal Linge Awal Selure* juga adalah sebuah semboyan. Dalam kesenian Saman di setiap pembukaannya selalu menyebutkan *Asal Linge Awal Selure*. Ini dimaksudkan sebagai sebuah identitas diri masyarakat Gayo.

Ada dua potensi pariwisata yang bias dikembangkan di Gayo Lues, yaitu pariwisata alam dan pariwisata budaya. Pariwisata Alam merupakan andalan dari Gayo Lues dimana salah satunya yang sudah mendunia adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Taman ini dikenal sebagai paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kekuatan wisata alam ekowisata/wahana wisata lokasi TNGL ditetapkan di Gumpang ibukota Kecamatan Putri Betung. Arung jeram adalah wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan di sepanjang Sungai Alas yang belum tergarap secara optimal. Strategi pengembangan wisata Gayo Lues dapat dimulai dari TNGL (paling banyak pengunjung dan adanya turis asing) dan selanjutnya diperluas ke pariwisata budaya.

Pariwisata Budaya dalam bentuk situs banyak terdapat di berbagai kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Kota Blangkejeren sebagai ibukota pemerintahan dapat dijadikan pusat wisata budaya dan selanjutnya disiapkan paket wisata budaya ke Putri Betung dan Kuta Panjang. Wisata budaya yang bersifat sejarah (situs) tentunya perlu diperkaya dengan atraksi budaya yang dipusatkan di Kecamatan Kuta Panjang dengan atraksi utama Pacuan Kuda.

Kegiatan rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan promosi pariwisata adalah promosi budaya dan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri, pengembangan objek pariwisata unggulan, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Hasil yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan pariwisata di Gayo Lues adalah diakuinya Tari Saman sebagai Kekayaan Budaya Asli Gayo Lues oleh UNESCO. Di samping itu, juga telah dicetaknya Buku Kamus Gayo dan partisipasi rutin Kabupaten Gayo Lues di setiap agenda Pekan Kebudayaan Aceh sebagai wadah pengenalan dan promosi pariwisata dan kebudayaan Gayo Lues.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Angka Partisipasi Sekolah

Akses/pemerataan terhadap pendidikan pada kondisi terkini dapat digambarkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS). Penduduk Kabupaten Gayo Lues berusia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah) relatif meningkat pada tahun 2013. Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS mencapai 98,90 persen yang berarti hanya satu persen penduduk 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Berikutnya, sebesar 97,42 persen untuk penduduk usia 13-15 tahun dan 81,88 persen untuk penduduk usia 16-18 tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gayo Lues

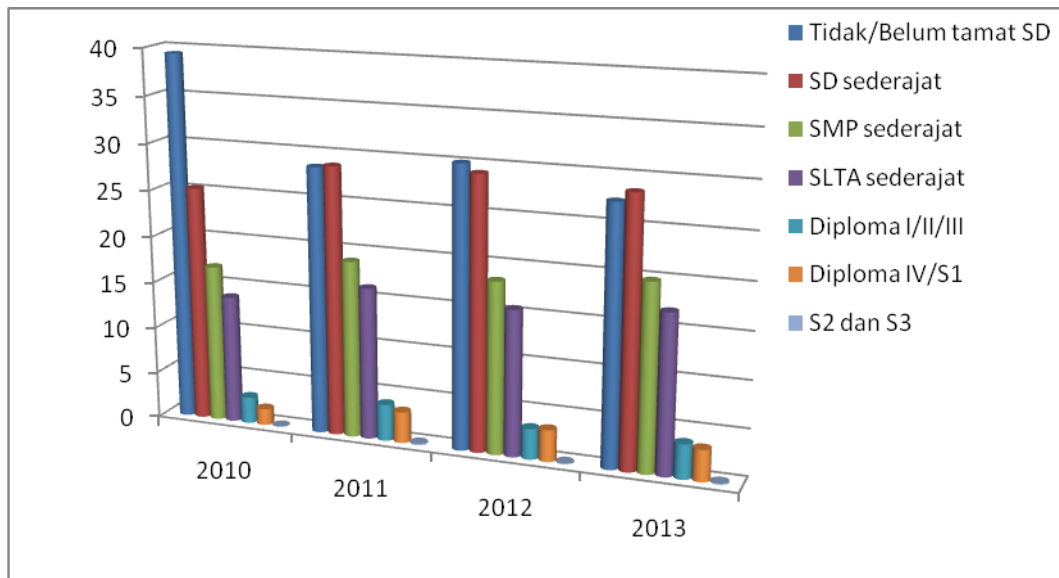
Jenjang pendidikan	Tahun							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD/MI	99.14	97.43	99.26	99.12	98.54	99.76	98.90	99.18
SMP/MTsN	84.70	90.00	96.14	93.47	96.18	92.47	97.42	97.95
SMU/MAN	65.000	70.000	72.000	73.94	74.35	76.92	81.88	85.55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data statistik tahun 2010, persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang belum/tidak tamat SD di Kabupaten Gayo Lues masih

merupakan persentase yang terbesar pada tahun 2010, yaitu sebesar 39,36 persen. Sedangkan mereka yang tamat SD sebesar 25,27 persen; tamat SLTP sebesar 16,90 persen; tamat SLTA sebesar 13,76 persen dan yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi sebesar 4,71 persen.



Gambar 2.12 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010-2013

c. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Ketersediaan sarana prasarana sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Sampai dengan tahun 2014, jumlah bangunan SD di Kabupaten Gayo Lues berjumlah 99 unit. Bangunan SLTP berjumlah 36 unit dan bangunan SLTA berjumlah 16 unit. Sedangkan untuk perguruan tinggi sebenarnya telah terdapat 3 perguruan tinggi yang aktif di Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi kesemuanya belum memiliki bangunan tersendiri. Pada tahun 2014 sudah mulai belajar universitas Syiah Kuala kampus Blangkejeren. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 s.d 2014 disajikan Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2007 s.d 2014

Jenjang Pendidikan	Tahun							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD/MI								
Jumlah gedung sekolah	87	92	85	98	99	98	99	99
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	8984	9062	8835	11874	13083	6219	11638	12587
Rasio	97	102	96	83	76	158	85	79
SMP/MTs								
Jumlah gedung sekolah	17	23	22	34	35	34	36	36
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8224	8296	8107	5586	6798	5436	5513	6597
Rasio	21	28	27	61	51	63	65	55
SMA/SMK/MA								
Jumlah gedung sekolah	11	13	13	19	20	17	16	16
jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7675	7741	7288	5288	5267	4633	4698	6325
Rasio	14	17	18	36	38	37	34	25

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka 2015

Dari tabel di atas dapat dinyatakan jumlah sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan sudah mencukupi. Untuk jenjang SD/MI gedung sekolah yang dimanfaatkan sebesar 79 persen, jenjang pendidikan SMP/MTs baru dimanfaatkan sebesar 55 persen, dan yang paling rendah pemanfaatan gedung sekolah tingkat SMA/MA yang hanya 25 persen artinya masih banyak penduduk usia sekolah tingkat SMA yang tidak bersekolah.

d. Rasio Guru/Murid

Kesesuaian kebutuhan tenaga pengajar dengan jumlah murid dapat dilihat dari angka rasio murid guru. Pada jenjang SD, setiap guru rata-rata mengajar 14 murid. Untuk jenjang SLTP, setiap guru rata-rata mengajar 16 murid. Sedangkan untuk jenjang SLTA, setiap guru rata-rata mengajar 15

murid. Dari angka tersebut terlihat bahwa secara umum kebutuhan guru di kabupaten ini sudah mencukupi. Hanya saja untuk jenjang SLTA, persebaran guru di kecamatan tampak masih timpang. Ada kecamatan yang beban setiap guru mengajarnya hanya berkisar 2 s/d 6 murid saja, akan tetapi ada satu kecamatan yang beban setiap guru mengajarnya hingga 46 murid.

Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA Kabupaten Gayo Lues

Jenjang Pendidikan	Tahun							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD/MI								
Jumlah Guru	722	975	1031	941	947	794	774	732
Jumlah Murid	12292	12269	11834	11770	11786	12658	11665	11932
SMP/MTs								
Jumlah Guru	254	355	375	477	354	345	453	275
Jumlah Murid	4098	4530	4589	5221	6101	4987	4700	4240
SMA/MA								
Jumlah Guru	154	247	258	342	347	272	367	213
Jumlah Murid	2914	2660	2771	3910	3587	3552	3595	3723

Ket : Tahun 2014 Jumlah Guru belum termasuk guru MIN, MTS, MA

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka 2015

e. Kesehatan

Jumlah puskesmas di kabupaten ini sampai tahun 2014 berjumlah 12 unit dimana 6 unit Puskesmas rawat inap dan 6 unit non rawat inap, pustu sebanyak 41 unit, dan rumah sakit sebanyak 1 unit. Sementara untuk tenaga medis, terdapat 1 orang dokter spesialis, 38 dokter umum, 8 dokter gigi, 208 bidan, dan 180 perawat.

Kebutuhan akan dokter, bidan dan perawat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak mengandalkan tenaga medis PTT (Pegawai Tidak Tetap) dimana setengah dari dokter umum merupakan dokter PTT, lebih dari tiga per lima tenaga bidan (126 bidan) adalah bidan PTT, dan hampir seperempat tenaga perawat (41 perawat) juga merupakan perawat PTT. Tenaga medis yang harus ditambah adalah tenaga dokter spesialis yang sama sekali tidak ada di kabupaten ini. Peran dokter spesialis sangat

penting mengingat banyak penyakit yang diderita masyarakat yang memerlukan diagnosa tepat dari dokter ahli di bidang penyakit tersebut.

f. Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Aceh memiliki otonomi khusus yang dimandatkan di dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini pada hakikatnya memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi Aceh untuk berkembang dan melaksanakan percepatan pembangunan. Namun demikian setelah lima tahun berjalan sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut, Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan Aceh belum menggembirakan, bahkan belum lebih baik dari pada provinsi lainnya yang tidak memiliki kekhususan

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata disemua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), Kabupaten Gayo Lues akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada.

Jumlah pegawai negeri sispil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues sampai tahun 2014 adalah berjumlah 3.408 Orang yang terdiri dari 484 PNS Struktural, 1.721 PNS Fungsional Tertentu dan 1.203 PNS Fungsional Umum. Berdasarkan golongan PNS Golongan I 56 Orang (1,65%), Golongan II 902 Orang (26,47), Golongan III 2.046 Orang (60,04%), dan Golongan IV 404 Orang (11,85%). Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: Tingkat SD sebanyak 29 Orang (0,85%), Tingkat SLTP sebanyak 38 Orang (1,12%), Tingkat SLTA sebanyak 823 Orang (24,15%), Tingkat DI sebanyak 67 Oran (1,97%), Tingkat DII sebanyak 465

Orang (13,64%), Tingkat DIII sebanyak 343 Orang (9,93%), Tingkat DIV sebanyak 11 Orang (10,06%), Tingkat SI sebanyak 1.583 Orang (46,45%), Tingkat S2 sebanyak 48 Orang (1,41%).

Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berbagai macam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah diupayakan secara optimal namun sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat masih relatif terbatas. Sebaliknya pelayanan terhadap masyarakat adalah hak masyarakat yang mesti terpenuhi sebagai suatu kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan segala keterbatasan pemerintah belum dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sehingga masyarakatpun belum dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Persentase Keluarga sejahtera dibanding jumlah total keluarga di Gayo Lues pada tahun 2014 sebesar 59 persen tidak mencapai target sebesar 80 persen , menurun dari tahun 2013. Jumlah peserta KB aktif tahun 2014 sebanyak 13.009 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 11.866 Orang dengan realisasi capaian sebesar 83,7 persen; Jumlah Aseptor KB baru pada tahun 2014 sebanyak 1.808 Orang meningkat dari tahun 2013 dimana jumlah aseptor KB baru sebanyak 171 Orang dari jumlah PUS sebanyak 14.181 Orang dengan capaian 1,2 persen; Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2014 sebanyak 4 Orang melebihi target yang hanya 3 Orang. Perbandingan antara 2014 dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini:

Tabel 2.24
Perbandingan jumlah aseptor KB Tahun 2013 dan 2014

No	Pengguna Aseptor KB	Tahun 2014	TAHUN 2013
1	Implan/susuk	95 Orang	359 Orang
2	IUD/Spiral	457 Orang	445 Orang
3	Suntik	3333 Orang	7115 Orang
4	MOW	10 Orang	32 Orang
5	MOP	4 Orang	4 Orang
6	Pil	1.533 Orang	3897 Orang
7	Kondom	497 Orang	1279 Orang

Jumlah Desa Siaga pada tahun 2014 sebanyak 145 desa meningkat dari tahun 2013 yaitu sebanyak 144 desa; Jumlah posyandu Aktif pada tahun 2014 sebanyak 151 posyandu, meningkat dari tahun 2013 posyandu aktif hanya 33 posyandu. Keterbatasan Kemampuan Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Lapangan KB (PLKB) menjadi kendala utama dan juga urangnya informasi dan sosialisasi program KB kepada masyarakat khususnya remaja tentang kesehatan reproduksi.

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana arahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemenuhan dana pembangunan desa dilakukan secara bertahap. Dalam pemenuhannya perlu diperhatikan aspek akuntabilitas kinerja dan skala ekonomi (*economic of scale*) dari pendanaan kegiatannya. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan

dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan dengan meningkatkan fokus penggunaan dana transfer daerah yaitu antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar. DAK tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non-fisik yang mendukung pelayanan dasar. Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran transfer daerah menjadi semakin strategis sebagai sumber pendanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah juga dapat dioptimalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan, BUMDes akan mampu menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes juga dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

c. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Wilayahul Hisbah (Pol WH). Satpol PP mempunyai fungsi untuk membantu menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan menegakkan peraturan

serta kebijakan Daerah. Sedangkan Pol. WH mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan.

Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terlatih pada tahun 2014 sebanyak 720 sama dengan tahun 2013; Angka rasio Satu Poskamling, Satu Desa merupakan tempat organisasi keamanan tingkat Desa sebagai rentang kendali keamanan dan pencegahan kriminal yang ada di Desa. Untuk pelaksanaannya, diimbangi dengan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban, yakni 5 orang anggota Hansip per Desa. Dengan begitu, realisasinya tercapai 100%.

Selain itu, jumlah organisasi Partai Politik (Parpol) yang ada 15 Partai, yang terdaftar pada Tahun 2012 s.d 2014. Penjumlahan angka ini, 11 adalah Partai Nasional dan 4 adalah Partai Lokal (Parlok). Eksistensi 15 Parpol ini tiap Tahun dilaksanakan pembinaan terhadap perkembangan politik tingkat Nasional dan Daerah.

Tujuan pembinaan ini, agar tercapai peningkatan kerja sama dengan Parpol dan parlok dan aparat keamanan dan efektifitas Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) untuk pencegahan konflik di masyarakat, sekaligus pencegasi Dis-Integrasi Negara. Hal ini sekaligus pembelajaran Politik bagi masyarakat umum agar pemahaman bersama dapat dibangun dalam mencapai pembangunan daerah. Karena itu, dengan adanya Badan Kesbangpol dan Linmas sebagai koordinator pelaksana pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas).

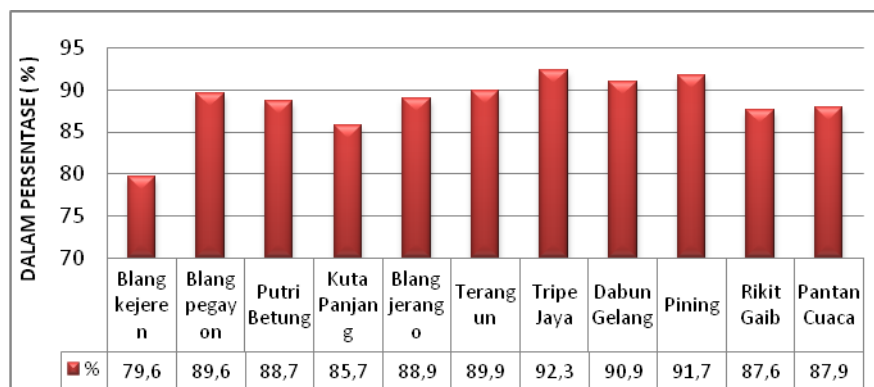
Ormas keberadaannya di Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2012, berjumlah 50, dan meningkat secara signifikan 56. Akurasi data, belum dianalisa secara baik. Namun dapat dirinci permasalahannya yakni;

1. Alamat Ormas tidak jelas
2. Kepengurusan tidak jelas
3. Papan nama Ormas tidak ada

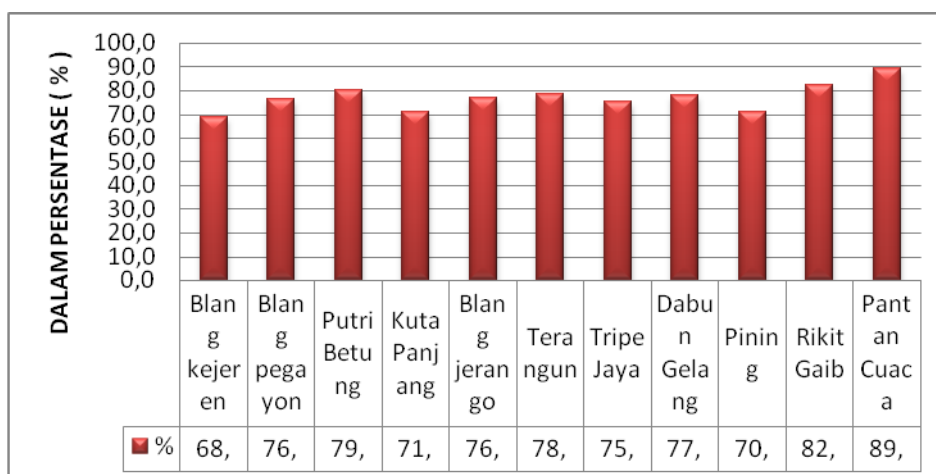
Pentingnya administrasi ini agar dapat diperoleh informasi apa saja yang dilakukan oleh Ormas tersebut dan dilakukan pembinaan agar tercapainya tujuan bersama melalui seminar dan pelatihan. Ormas sebagai mitra pemerintah dalam masalah pembinaan masyarakat sebagai proses pembelajaran kedewasaan berpolitik.

Adapun kontribusi dari Ormas tersebut adalah kritik konstruktif—kritik yang dapat membangun kesadaran untuk mengingat dalam hal pembangunan daerah. Selain itu, tujuannya lainnya adalah agar tercapainya kesadaran masyarakat dalam hal ikut serta berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif, Pilkada dan Pilpres. Singkatnya, prinsip Demokrasi adalah terlibatnya masyarakat secara aktif dalam pembangunan Daerah dan Nasional baik dalam hal partisipasi politik maupun kontrol politik.

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan 2.13.



Gambar 2.13 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014



Gambar 2.14 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam sosialisasi pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat. Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan hukum pada tahun 2014 dari 11 kasus anak hanya 9 kasus yang ditangani dan 6 kasus KDRT semua berhasil ditangani atau yang berhasil diberikan bantuan hukum. Sebahagian kasus tidak ditangani disebabkan oleh keteraumaan anak dan perempuan masih belum bisa di relokasi dengan baik, sebab belum ada lembaga P2TP2A yang menjadi pusat pelayanan yang memenuhi hak sosial para korban. Untuk pelaksanaan jaminan Hukum pada anak dan perempuan pada Tahun lalu terdapat KDRT enam kasus dan ditangani seratus persen oleh pihak keamanan. Persoalan lain yang masih menyangkut korban kekerasanpun mendapat perlakuan Hukum yang setara. Hal ini dapat dilihat dari kurun waktu dua Tahun terakhir angka KDRT dan kekerasan pada anak dan perempuan sangat menurun.

Inilah Hukum yang ditegakkan dapat mengakomodasi semua pihak tanpa memandang kelompok tertentu. Peran penting SKPK untuk menjalankan Tupoksi berkaitan dengan Program Perlindungan Masyarakat telah terealisasi.

Sasaran strategis keterwakilan perempuan di Legislatif tercapai sepuluh persen di lembaga Eksekutif. Sektor pemerintahan ini terdapat pada kedudukan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dua orang menjabat Camat. Begitu pula, pada jabatan Sekretaris di beberapa SKPK. Capaian program prioritas pemberdayaan perempuan ini, sebagai upaya adanya kesetaraan gender. Dalam artian, semua golongan dapat menduduki suatu keterwakilan tanpa diskriminasi dan diskualifikasi dalam sektor pemerintahan.

Persentase tingkat keterwakilan perempuan lembaga eksekutif sebesar 6,7 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013 dengan capaian sebesar 6,5 persen; dan persentase tingkat keterwakilan perempuan lembaga Legislatif sebesar 10 persen, lebih tinggi dengan periode sebelumnya. artinya 2 orang anggota legislatif berjenis kelamin perempuan dari 20 anggota dewan Perwakilan Rakyat.

d. Informasi dan Telekomunikasi

Kantor Pos di Kabupaten Gayo Lues terdapat 1 unit yaitu yang terletak di ibukota kabupaten dan 3 unit Pos Desa di Kecamatan Kuta Panjang, Rikit Gaib, dan Terangun. Sampai tahun 2010 sarana informasi dan telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues antara lain, satu unit stasiun televisi, tabloid, Koran daerah dan Koran nasional, radio amatir 2 Unit yaitu Suara Gayo dan Radio Mentalu dengan kondisi penyiaran 70%. serta radio dua arah (HT). Stasiun Televisi (LTV) daerah yang baru menjangkau masyarakat seputaran Kota Blangkejeren dan telepon rumah yang telah menjangkau 3 kecamatan induk yakni, Kec. Blangkejeren, Kuta panjang, Terangun dan Rikit Gaib.

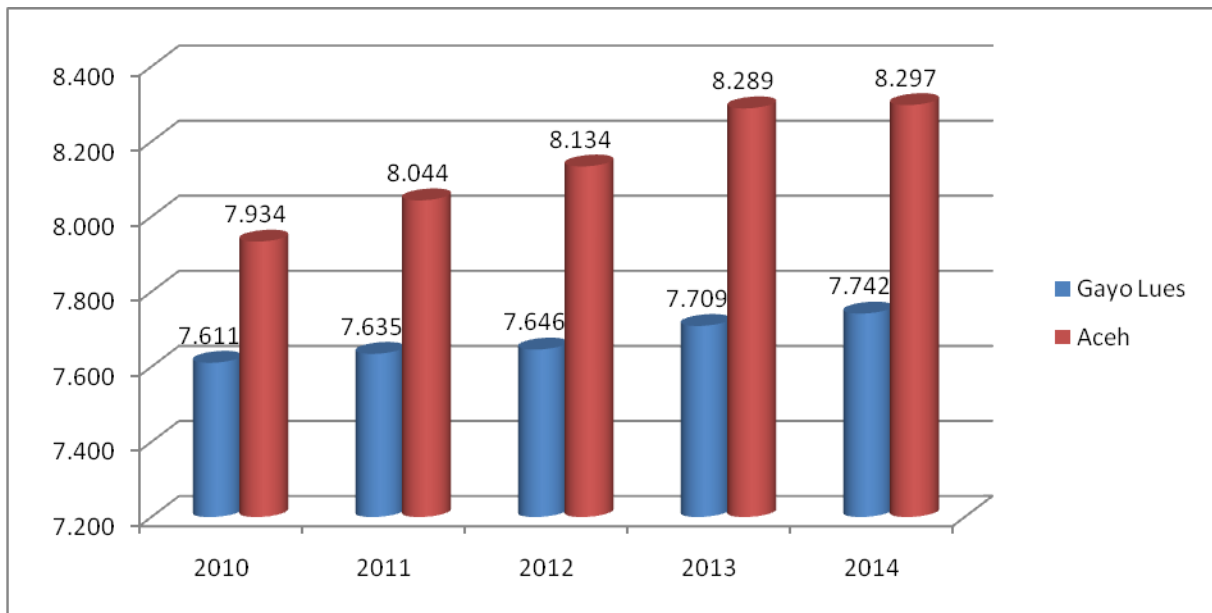
Di sektor komunikasi, terdapat 504 sambungan satuan telepon (SST) pada tahun 2013. Bertambah sebanyak 16 sambungan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk sarana Vsat/Wartel berangsur-angsur turun dari tahun ke tahun hingga sama sekali tidak terdapat Vsat/Wartel di tahun 2011. Hal ini disebabkan kecenderungan warga yang lebih memilih kepada penggunaan telepon selular.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Kemampuan daya beli masyarakat diharapkan dapat terwakili oleh variabel konsumsi riil per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan dengan Indeks Harga Konsumen.



Gambar 2.15. Pengeluaran Perkapita Gayo Lues dan Aceh

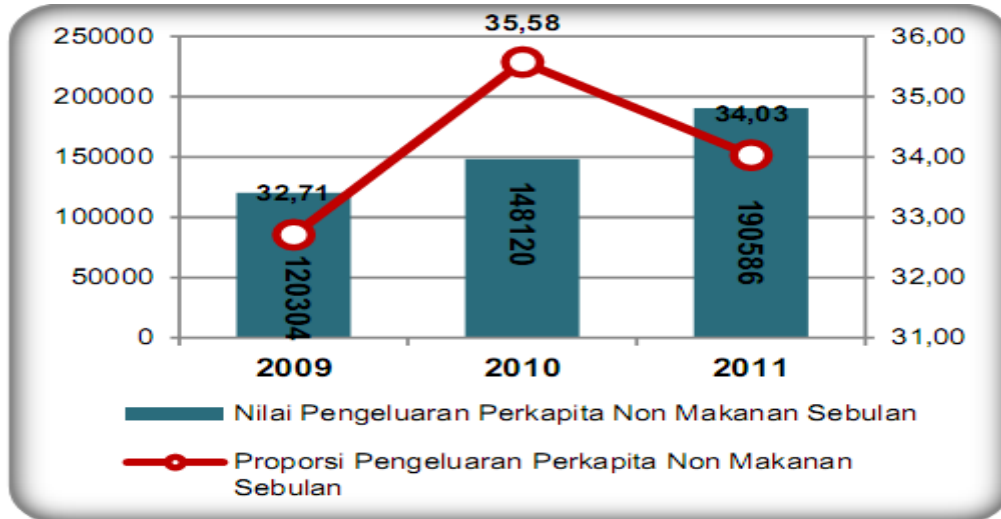
Agar daya beli masyarakat memiliki keterbandingan antar wilayah, perlu dibuat standarisasi. Misalnya satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di wilayah yang lain. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Implikasinya standar hidup antar wilayah pun dapat diperbandingkan.

Aspek terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan menggunakan indikator pengeluaran per kapita setahun disesuaikan. Indikator pengeluaran ini jelas dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk. Selain itu indikator pengeluaran ini sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian sehingga cocok untuk digunakan sebagai proxy standar hidup layak.

Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan kabupaten Gayo Lues pada tahun 2014 mencapai 7.74 juta rupiah. Dengan angka pengeluaran sebesar ini Kabupaten Gayo Lues menduduki peringkat ke 13 di Provinsi Aceh.

Pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (Purchasing Power Parity) dapat menjadi cerminan kemampuan daya beli masyarakat suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Secara umum kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan

kabupaten/kota lain mengalami peningkatan, akan tetapi kecenderungan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Gayo Lues tampak lebih rendah dari kecenderungan peningkatan daya beli rata-rata masyarakat di Provinsi Aceh



Gambar 2.16. Nilai (Rp) dan Proporsi Pengeluaran Perkapita Makanan Sebulan (%)

Perubahan proporsi pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan pola perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk non makanan menunjukkan perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Pada kurun waktu 2009-2011 terlihat proporsi pengeluaran untuk non makanan meningkat di tahun 2010 yaitu dari 32,71 persen di tahun 2009 menjadi 35,58 persen di tahun 2010. Akan tetapi di tahun 2011 angka ini menurun menjadi 34,03 persen. Pada tahun 2011, proporsi pengeluaran perkapita untuk non makanan sebesar 34,03 persen. Proporsi terbesar adalah pengeluaran terkait perumahan dan fasilitas rumah tangga (48,33 persen) disusul pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar 28,85 persen. Untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala di urutan berikutnya dengan persentase sebesar 13,55 persen dan barang-barang tahan lama sebesar 6,30 persen.

Sementara itu, hal yang cukup menarik terjadi di sisi pengeluaran untuk makanan dimana pengeluaran untuk tembakau dan sirih ternyata menempati proporsi terbesar kedua setelah pengeluaran untuk padi-padian. Hal ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat kabupaten ini yang

sangat suka merokok dan rokok tampaknya telah menjadi kebutuhan utama bagi penduduk pria dewasa di kabupaten Gayo Lues.

b. Produktivitas Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama yang mendukung perekonomian Gayo Lues. Pertanian yang dimaksud adalah perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian yang menjanjikan, setiap tahunnya berbagai sumber dana dialokasikan untuk membangun sektor ini. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dimaksudkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lebih jauh ditargetkan untuk dapat mensuplai daerah-daerah di luar Gayo Lues. Apabila memungkinkan sektor ini diharapkan akan bersaing untuk produksi hasil tani organik.

Pengembangan tanaman pangan padi 464 hektar berupa bantuan benih dan saprodi lainnya. Cetak sawah seluas 100 hektar dilakukan sebagai konsekwensi dari alih fungsi lahan sawah ke permukiman yang belum bisa dikendalikan. Hasil dari pengembangan padi dan sawah, sejauh ini telah mampu meningkatkan produksi sebanyak 4.5 ton/ha, lebih tinggi dari rata-rata produksi nasional 3,5 ton/ha. Kemudian pengembangan tanaman jagung sebagai tanaman palawija, calon unggulan seluas 330 hektar telah menghasilkan produksi 5-6 ton/ha. Capaian ini sebagai hasil dari pencaanangan Program GEMASIH tahun 2010 yang pada dasarnya adalah program peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan lahan tidur. Program ini memberi stimulan bagi petani berupa pengolahan lahan dengan traktor yang disediakan pemerintah, bantuan bibit dan saprodi.

Cabe sebagai komoditas unggulan Gayo Lues sejak dahulu, selama priode 2007-2011 telah dikembangkan seluas 140 hektar dengan hasil produksi 10 ton/ha, masih jauh dari potensi seharusnya 40 ton/ha.

Pengembangan dibidang perikanan pemerintah daerah telah melakukan pengembangan sesuai potensi dan karakter wilayah dan ditujukan terutama untuk menghasilkan produksi yang dapat memenuhi

kebutuhan lokal yang semakin meningkat. Sebagai daerah pegunungan, Gayo Lues otomatisnya akan mengembangkan jenis-jenis ikan air tawar yang toleran dengan iklim dingin. Jenis yang dikembangkan bukan hanya sekedar ikan nila, ikan mas, lele, tetapi juga bawal, patin dan grascrap. Pengembangan dilakukan melalui pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) yang telah selesai dibangun sebanyak 2 unit, sedangkan pemberdayaan dan pengembangan BBI, antara lain pembangunan kolam, haetchery, pengadaan indukan dan bibit. Bibit yang sudah siap dikembangkan, didistribusikan ke petani kolam dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan peluang di sektor perikanan untuk peningkatan kesejahteraannya. Bahkan dalam rangka memaksimalkan produksi ikan di Gayo Lues, pemerintah juga telah membantu masyarakat dalam pembuatan kolam.

Namun demikian, disadari atau tidak, sub sektor peternakan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia daerah. Peranan ini dapat dilihat dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Oleh karenanya tidak mengherankan bila produk-produk peternakan disebut sebagai bahan "pembangun" dalam kehidupan ini. Selain itu, secara hipotetis, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk peternakan, yang pada akhirnya turut menggerakkan perekonomian pada sub sektor peternakan.

Gayo Lues sebagai daerah yang sangat sesuai untuk pengembangan ternak, melalui bidang peternakan pemerintah Gayo Lues telah merealisasikan beberapa program dan kegiatan, antara lain pemagaran areal peternakan seluas 8.000 m di kawasan Terlis Terangun; pengadaan kebun HMT 62 hektar; peningkatan kolam masyarakat 86 unit; pembinaan kelompok peternak dan perikanan; fasilitasi peningkatan mutu genetik ternak melalui inseminasi buatan; peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau; pembangunan Poskeswan dan program pembinaan dan penanggulangan penyakit menular ternak.

Pembangunan sektor bidang perkebunan sudah menjadi prioritas sejak berdirinya Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan kajian yang dilakukan sebelumnya Gayo Lues sangat berpotensi menjadi sentra perkebunan untuk beberapa komoditi karena kesesuaian lahan dan iklim. Komoditi yang sudah menjadi andalan petani selama ini adalah nilam, sereh wangi, tembakau, dan kopi. Sedangkan kakao hadir sebagai komoditi yang menjanjikan bagi masyarakat Gayo Lues baru sejak kabupaten ini berdiri.

Selama 2007–2011, prioritas pengembangan kopi, kakao, tembakau dilakukan reguler tiap tahun, berupa pengadaan bibit, dan bantuan saprodi. Daerah yang jadi pengembangan kakao ada di Kecamatan Terangun, Pining, Tripejaya dan Putri Betung, sementara kopi di Kecamatan Pantan Cuaca, Dabun Gelang, Blangjerango dan Blangkejeren. Menurut pengakuan beberapa petani kopi, produksi yang mereka dapat sejauh ini belum dapat menggerakkan tingkat kesejahteraan keluarganya ke level yang lebih baik, masih sangat jauh dengan apa yang sudah dinikmati petani kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Demikian juga dengan petani kakao. Hal ini menurut mereka karena harga jual yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan dengan ongkos produksi termasuk ongkos angkut keluar dari kebun

Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Gayo Lues menempati urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB). Dalam lima tahun terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB lebih 50%, sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Gayo Lues.

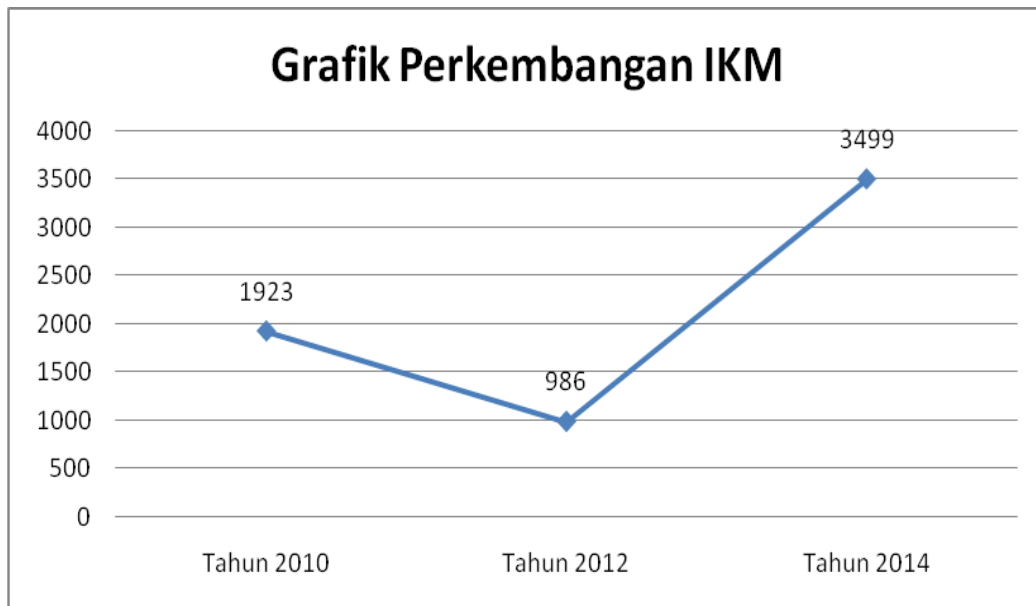
Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Gayo Lues menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Para petani menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, beralih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Di pihak lain, para petani tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Tantangan terbesar bagi Kabupaten Gayo Lues adalah upaya mengkaitkan (linkage) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani juga akan mengalami peningkatan. Secara keseluruhan sangat diperlukan penetapan peruntukan lahan yang pasti untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

c. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

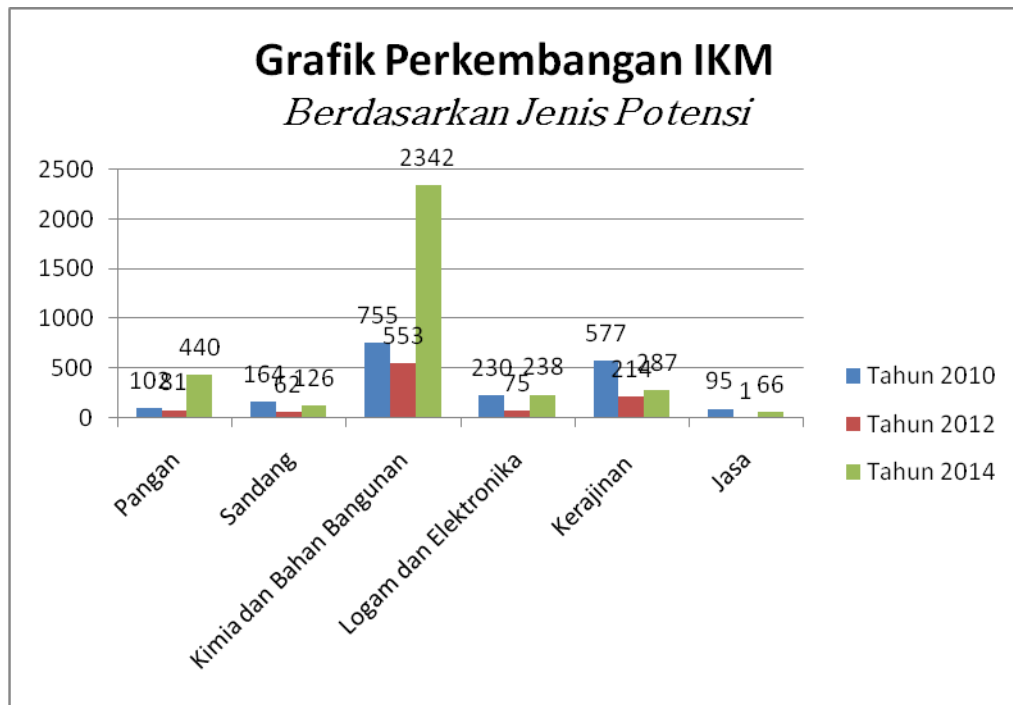
Jumlah Koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yaitu Tahun 2012 Koperasi sebanyak 131 Koperasi, meningkat pada Tahun 2014 menjadi 141 Koperasi. Namun demikian, sebagai catatan perlu ada tindak lanjut dari SKPK yang terkait untuk melakukan identifikasi Koperasi yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Adanya kebijakan insentif dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam bentuk bantuan sosial/hibah untuk koperasi telah menjadi pengungkit tumbuhnya koperasi-koperasi baru. Jadi dimungkinkan pendirian koperasi baru adalah semata-mata karena untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Koperasi diharapkan dapat berperan sebagai pelaku utama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitarnya, namun sampai dengan saat ini koperasi masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yaitu selain permasalahan umum seperti permodalan, teknologi, akses terhadap bahan baku dan pasar, lokasi tempat usaha dan jaringan usaha serta kemitraan, juga masih menghadapi masalah yang masih bersifat intern yang sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan fungsi, peranan dan kinerja koperasi yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM), partisipasi dan kepedulian anggota terhadap aktivitas usaha dan organisasi koperasi



Gambar 2.17. Perkembangan IKM di Kab. Gayo Lues

Perkembangan IKM di Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2010 jumlah IKM sebanyak 1.923 unit usaha meningkat menjadi 3.499 unit pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan mencapai 82 persen selama 4 tahun. Jadi rata-rata pertumbuhan IKM pertahun selama periode 2010 sampai dengan 2014 adalah sebesar 20 persen. Pada tahun 2012 terlihat jumlah IKM lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2010, hal ini bukan berarti tidak ada pertumbuhan IKM pada tahun tersebut, tetapi hal ini disebabkan banyak IKM yang tidak terdata pada tahun yang bersangkutan. Perkembangan IKM dapat dilihat dari Gambar 2.172 dan 2.18.



Gambar 2.18. Jumlah IKM Kabupaten Gayo Lues

Pada tahun 2014, jumlah unit usaha IKM adalah 3.499 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.096 orang dan jumlah produksi mencapai Rp. 228.034.211.000 (dua ratus dua puluh delapan milyar tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Kondisi Jalan

Kondisi Jalan memegang peranan penting dalam menjadikan Kabupaten Gayo Lues lebih terbuka dan dikenal oleh banyak daerah lain. Sampai dengan tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten ini telah membangun jalan sepanjang 895.55 km. 39 persen jalan tersebut (349.79 km) masih berupa jalan tanah, 31 persen atau sepanjang 282.94 km sudah berupa jalan aspal, 14 persen atau sepanjang 121.87 km berupa jalan kerikil dan sisanya adalah jalan yang belum dirinci jenisnya.

Kabupaten Gayo Lues juga dilintasi oleh Jalan Negara sepanjang 142 km dan Jalan Provinsi sepanjang 145,41 km. Untuk Jalan Negara semuanya sudah dalam kondisi teraspal sedangkan untuk Jalan Provinsi masih ada sepanjang 50,9 km yang masih berupa kerikil dan sepanjang 13,9 km masih berupa tanah

b. Kondisi Jembatan tahun 2014

Panjang jembatan kabupaten (154 unit) sepanjang 1,884 m, Panjang jembatan propinsi sepanjang 595 m, Panjang jembatan nasional sepanjang 542 m, Jembatan gantung (39 unit) sepanjang 2386 m. Kondisi jembatan kabupaten saat ini Jembatan composit (permanent) sepanjang 203 m, Rangka baja sepanjang 1,600 m, Jembatan gelagar besi lantai kayu sepanjang 794 m, Jembatan gelagar kayu sepanjang 424 m, Jembatan gantung permanent sepanjang 1786 m, Jembatan Gantung darurat (lumpe) sepanjang 600 m.

Tabel 2.25

Panjang dan jumlah Jembatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014

Nama Ruas Jalan	Jembatan	
	Unit	Panjang
BKJ- Aceh Tenggara	22	360.7
BKJ- Aceh Timur	42	755
BKJ-Aceh tengah	18	430.8
BKJ- Aceh Barat Daya	33	493.9
2014	115	2040.4
2013	115	2040.4
2012	115	2040.4
2011	115	2040.4

d. Daerah Irigasi

Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air tengah giat dilaksanakan melalui pembangunan irigasi dan saluran distribusi pada lahan pertanian. Pemerintah Gayo Lues telah membangun irigasi sebanyak 103 unit dan tersebar di setiap kecamatan. Apabila kebutuhan irigasi teknis sudah dipenuhi dan bantuan saprodi dilaksanakan tepat sasaran, maka produksi hasil pertanian akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Luas lahan persawahan di Kabupaten Gayo Lues tahun 2014 sebesar 7746 Ha, yang ditanami padi sebesar 16.840 Ha Lahan, dan berhasil dipanen sebesar 15.180 Ha sehingga mendapatkan produksi sebanyak 63.180 Ton. Pada Tahun 2014, Tanaman hortikultura yang produksinya

besar di wilayah ini antara lain tomat 1.160 ton, cabe besar 4.660 ton, cabe rawit 4.200 ton dan bawang merah 1.400 ton

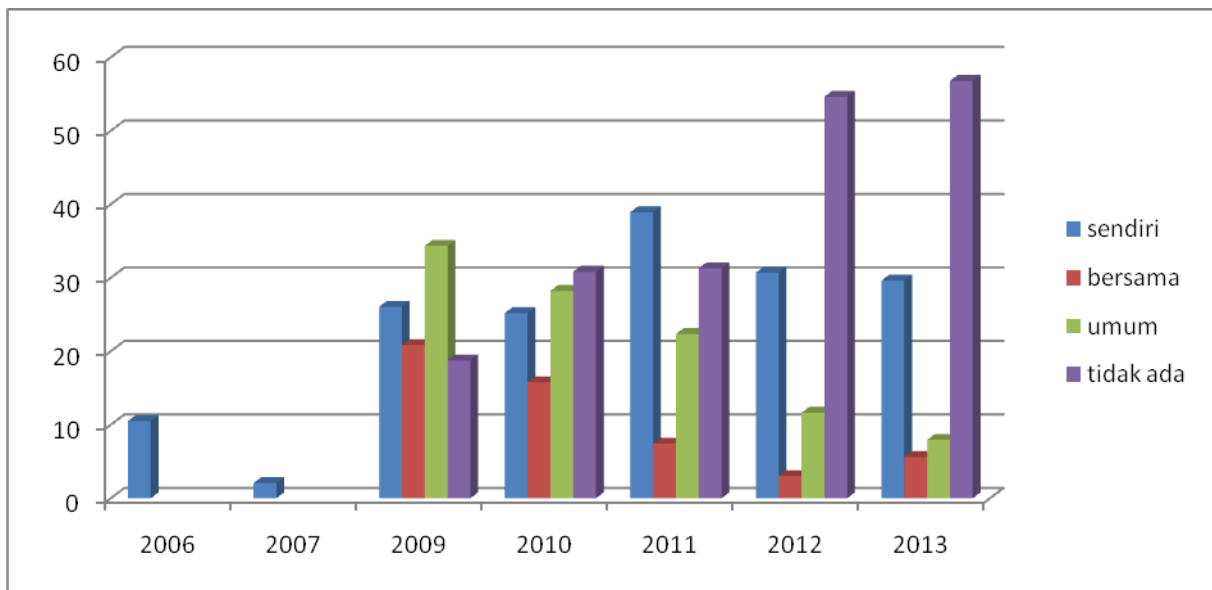
Tabel 2.26
Panjang jaringan irigasi di kabupaten Gayo lues tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Daerah Irigasi	Panjang Jaringan (m)	Luas Fungsional (Ha)	
				Optimal	Belum Optimal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KUTA PANJANG	9	12.900	856	100
2.	BLANG JERANGO	11	20.000	2.183	318
3.	BLANGKEJEREN	29	35.210	2.963	1.000
4.	PUTRI BETUNG	9	9.100	712	150
5.	DABUN GELANG	14	22.800	832	1.500
6.	BLANG PEGAYON	11	25.000	2.003	700
7.	PINING	15	10.600	800	190
8.	RIKIT GAIB	17	24.700	855	224
9.	PANTAN CUACA	10	1.290	715	100
10.	TERANGUN	21	43.800	2.180	200
11.	TRIBE JAYA	9	14.100	823	200
JUMLAH	2012	158	219.500	14.992	4.688
	2011	158	219.500	14.992	4.688

Sumber : *Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2014.*

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Faktor lingkungan lainnya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah fasilitas fisik perumahan seperti fasilitas untuk buang air besar. Dari kepemilikan fasilitas buang air besar, sebanyak 31,30 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas buang air besar. Hal ini disebabkan sebagian besar area pemukiman di kabupaten ini berdekatan dengan aliran sungai sehingga banyak rumah tangga yang lebih memilih menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas umum untuk buang air besar juga masih cukup tinggi (7,95 persen). Disusul rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang besar bersama dengan rumah tangga lain sebanyak 5,61 persen. Sedangkan 29,63 persen rumah tangga yang lain telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri



Gambar 2.19. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Gayo Lues

f. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruangan nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, yang berfungsi Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten, dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

g. Perhubungan

Program yang telah dicapai pemerintah Gayo Lues dalam pembangunan sektor perhubungan selama priode tahun 2007-2010 antara lain pembangunan terminal terpadu sebanyak 1 (satu) unit; pembangunan halte sebanyak 2 unit; pengadaan angkutan perdesaan sebanyak 4 unit; pengadaan marka jalan dan rambu jalan masing-masing 4 paket.

Transportasi yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues hanya transportasi darat diantaranya angkutan bus antarkota, antar kabupaten dan propinsi, angkutan penumpang antar kecamatan atau pedesaan, angkutan umum/barang dan becak bermotor. Data kendaraan roda dua/tiga ada sebanyak 3.365 unit, sedangkan kendaraan roda empat atau lebih ada sebanyak 956 unit.

Pada tahun 2014 terdapat 90 Armada yang menjadi sarana transportasi dari dan keluar Kabupaten. Transportasi Udara Kabupaten Gayo Lues sudah memiliki Bandara Senubung, yang sudah beroperasi sejak januari 2015.

Pembangunan daerah urusan informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang dapat dilihat jumlah warnet 9 unit dalam kota kabupaten menunjukkan kebutuhan informasi semakin meningkat, dengan muncul kafe/warung yang dengan fasilitas wifi menjadikan kabupaten Gayo Lues dapat mengakses informasi dari dalam dan luar daerah dengan cepat. Kapasitas internet di Kabupaten Gayo Lues sampai tahun 2014 1 MP, masih dibutuhkan agar dapat terjangkau internet untuk seluruh kecamatan. Kantor pos terdapat 1 unit di Blangkejeren, ketersediaan dokumen informasi baik berupa data/statistic maupun dokumen lainnya tersedia dan ter *uptade* setiap tahun, selain itu kabupaten Gayo Lues memiliki 2 stasiun Radio yang aktif yang dapat memberikan informasi sampai ke tingkat kecamatan

h. Fasilitas Bank dan Non Bank

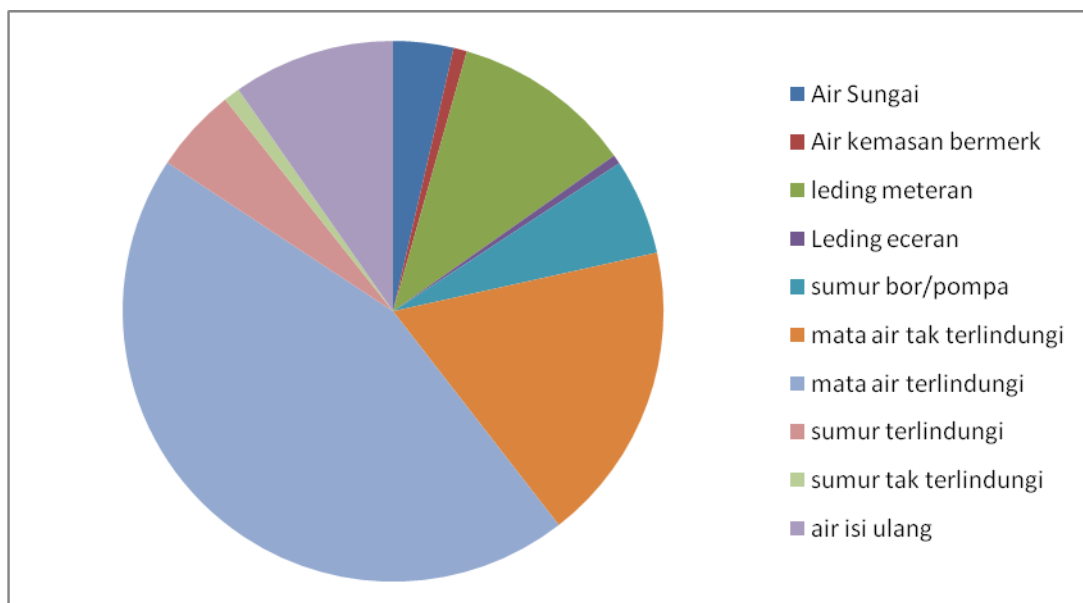
Jumlah bank di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2014 masih sama dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 7 unit, terdiri dari 4 unit Bank BRI, 2 unit Bank Aceh, dan 1 unit Bank BPR Mustaqim.

Nasabah BPD Aceh pada awal tahun 2013 berjumlah 8242 nasabah dengan nominal Rp.36.940.000 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 7728 nasabah dengan nominal Rp.51.035.000 untuk tabungan Simpeda. Sedangkan untuk tabungan Simpedes Bank BRI Cabang Pembantu Blangkejeren Pada awal tahun 2013 berjumlah 612 nasabah dengan nominal Rp1.522.954.485 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 698 nasabah

dengan nominal Rp2.655.544.405. Untuk tabungan Mustaqim, nasabah Bank Mustaqim pada awal tahun 2013 berjumlah 1.397 nasabah dengan nominal Rp.438.525.658 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 1,520 nasabah dengan nominal Rp 651 830 372.

i. Ketersediaan Air Bersih

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tidak akan terwujud tanpa suatu lingkungan yang baik, seperti tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat. Gambar 2.20 menunjukkan bahwa hampir dari separuh (44.77 persen) rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues masih mengandalkan mata air sebagai sumber air minumnya. Dari sumbernya, mata air ini disalurkan ke sebuah penampungan besar untuk kemudian disalurkan lagi melalui pipa-pipa kecil ke rumah-rumah masyarakat. Sementara itu, persentase terbanyak kedua adalah rumah tangga dengan sungai sebagai sumber air minumnya (17.99 persen), disusul ledeng meteran (10.83 persen), sumur terlindung (5.05 persen), dan rumah tangga dengan beragam sumber air minumnya yang lain.



Gambar 2.20. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

j. Pertambangan dan Energi

Gayo Lues memiliki potensi sektor pertambangan yang menjanjikan untuk dikembangkan dan tersebar di sebahagian besar wilayah Gayo Lues. Potensi ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran masyarakat Gayo Lues khususnya dan Aceh umumnya apabila Pemerintah Gayo Lues, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bekerjasama untuk membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan energi di wilayah ini. Keberhasilan membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan energi akan terwujud apabila didukung oleh kemandirian masyarakat dan keuangan Gayo Lues yang diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Bahan tambang dan galian di Kabupaten Gayo Lues dari jenis non logam umumnya berupa andesit, batu pasir, pasir sungai/kerikil, koral, tanah liat, sirtu, batu apung dan batu kapur, sedangkan dari jenis logam berupa tembaga, emas, besi dan sebagainya

Kabupaten Gayo Lues sejak berdiri sendiri sampai saat ini masih mengandalkan tenaga diesel dan hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmati fasilitas energi listrik ini, terutama masyarakat di kawasan ibukota kabupaten dan kecamatan. Masalah ini menimbulkan pemahaman di kalangan masyarakat desa bahwa masyarakat belum menikmati kemerdekaan karena di desanya belum dijangkau pelayanan listrik. Kekurangan energi listrik ini menyebabkan petani nilam dan sere wangi yang menghasilkan minyak nilam atau sere wangi masih banyak melakukan penyulingan secara tradisional.

Dalam proses penyulingan tradisional ini yang dibutuhkan kayu bakar dalam jumlah banyak untuk mendapatkan panas tinggi dalam waktu yang lama. Karena petani nilam dan sere wangi hanya mengandalkan kayu bakar, bukan hal yang mustahil kalau hutan akan dirambah untuk kebutuhan kayu bakar. Atas dasar permasalahan ini, maka pemerintah Gayo Lues tetap menjadikan energi listrik sebagai prioritas dalam pembangunan masyarakat Gayo Lues. Dengan adanya tenaga listrik, tentu saja penebangan kayu tersebut bisa diminimalisir selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian hutan.

Gayo Lues yang didominasi oleh hutan, memiliki sumber air terjun sebagai sumber tenaga listrik skala mikro. Energi ini diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa terpencil. Pembangunan PLTMH adalah salah satu solusi yang paling tepat, selain hasilnya akan dinikmati masyarakat, komitmen menjaga sumberdaya air di hutan akan sejalan karena debit air terjun harus stabil demi berfungsinya PLTMH. Ke depan Pemerintah Gayo Lues merencanakan pembangunan PLTA di wilayah Kecamatan Pining dan Putri Betung dengan memanfaatkan debit air terjun yang relatif lebih tinggi. Beberapa PLTMH yang sudah dibangun selama tahun 2007-2010, diantaranya:

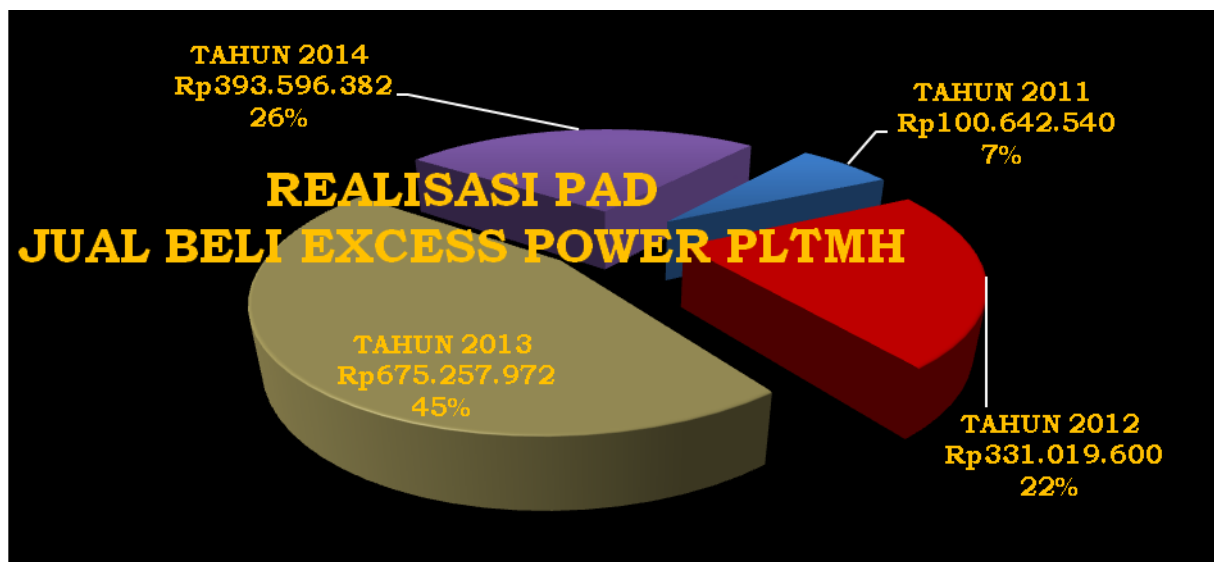
- 1) PLTMH Rerebe, Tripe Jaya; penambahan daya dari 250 kw menjadi 500 kw;
- 2) PLTMH Tingkem, Blangjerango;
- 3) PLTMH Pepelah, Pining;
- 4) PLTMH Aih Nuso Gumpang, Putri Betung;
- 5) PLTMH Jamur Gele, Putri Betung;
- 6) PLTMH Marpunge, Putri Betung;
- 7) PLTMH Air Panas, Singah Mule;
- 8) PLTMH Pulo Gelime, Tripejaya
- 9) PLTMH Kutelengat

Untuk beberapa desa, pemerintah daerah juga memberikan bantuan PLTS dan genset untuk sarana ibadah dan sosial lainnya. Secara umum dapat diketahui bahwa saat ini masih banyak desa yang masih belum mempunyai sarana penerangan listrik. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk merealisasikannya sebagai wujud dari komitmen membangun seluruh wilayah dan elemen masyarakat secara adil dan merata.

Potensi Energi yang ada di Kabupaten Gayo Lues adalah $\pm 270,67$ MW dan saat ini kita telah melaksanakan *Detail Engineering Design* (DED) untuk Pembangunan PLTMH Waih Batu sekitar 6 MW, Aih Nengar 2,5 MW, Aih Pantan 3,5 MW dan Aih Kenyaran 1,5 MW. Untuk semua potensi ini, akan digunakan sebagai Cadangan Energi Listrik Kabupaten Gayo Lues di masa yang akan datang.

Total PLTMH yang sudah dibangun di Kabupaten Gayo Lues kembali bertambah menjadi 14 (empat belas) Unit yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan Kapasitas Daya yang berbeda-beda, fokus utama Pembangunan PLTMH adalah daerah yang belum teraliri listrik dari PT. PLN (Persero) Ranting Blangkejeren. Lokasi PLTMH tersebut, diantaranya adalah berlokasi di Kec. Putri Betung, dimana di daerah tersebut terdapat 7 (tujuh) Unit dari 14 (empat belas) Unit yang telah di bangun, 2 (dua) Unit masing-masing berlokasi di Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Pantan Cuaca, serta 1 (satu) Unit masing-masing berlokasi di Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Blangjerango dan Kecamatan Pining.

Sebanyak 3 (tiga) Unit PLTMH telah dijual/jual beli Excess Power (yakni : PLTMH Rerebe, PLTMH Waih Selah dan PLTMH Waih Marpunge) ke PT. PLN (Persero).



Gambar 2.21 Realisasi PAD dari PLTMH Gayo Lues

Untuk tahun 2014, 1 (satu) Unit PLTMH berlokasi di Badak Uken Kec. Dabun Gelang, yakni “Peningkatan Kapasitas Daya PLTMH Badak Uken”, direncanakan siap untuk Excess Power di Tahun 2015, menyusul 3 (tiga) PLTMH yang telah Jual Beli Excess Power antara PT. PLN (Persero) dengan PEMDA Gayo Lues, dan semoga ini dapat menambah PAD Kabupaten Gayo Lues.

Pada Tahun 2014, Total Kapasitas Daya Terpasang PLTMH sebesar 2.320 kW (penambahan “Peningkatan Daya PLTMH Badak Uken sebesar 60 kW di tahun ini, dari tahun 2013 sebelumnya 2.260 kW) jika dibandingkan

dengan Total Kapasitas Daya Terpasang PT. PLN (Persero) sebesar 5.520 kW dengan Jenis Pembangkit Diesel maka \pm 42,03% kebutuhan energi listrik telah mampu dipenuhi melalui PLTMH yang ramah lingkungan dengan Jenis Pembangkit Hydro.

Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues sekitar 85.000 jiwa, yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 144 Desa serta dengan Total KK berjumlah 25.831 KK. Dari 25.831 KK tersebut, sebanyak **5.082 KK** Energi Listriknnya bersumber dari PLTMH yang tersebar di Kab. Gayo Lues (dengan persentase sebesar **19,67%**).

Terdapat lima Kantor Ranting PLN di Kabupaten Gayo Lues yaitu di Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Terangun, Rikit Gaib dan Pining. Dari kenaikan jumlah penjualan listrik oleh PLN dari semua ranting dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi listrik oleh masyarakat termasuk instansi di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari kontribusi konsumen terhadap pemakaian energi listrik PLN, terlihat bahwa rumah tangga merupakan konsumen terbesar yang memanfaatkan listrik di kabupaten ini. Pada tahun 2011, daya listrik tersambung untuk konsumen rumah tangga mencapai 75,64 persen dari keseluruhan daya listrik yang dikeluarkan PLN. Sedangkan dari konsumen bisnis/industri hanya memanfaatkan sebanyak 12,12 persen dari total daya listrik. Hal ini wajar mengingat masih sedikitnya bisnis/industri di kabupaten Gayo Lues.

Sementara berdasarkan penjualan listrik per PLN ranting di tahun 2011, memperlihatkan bahwa Kecamatan Blangkejeren dan kecamatan lain disekitarnya seperti Dabun Gelang dan Blangpegayon mendominasi dalam pemakaian energi listrik dengan persentase sebesar 82,95 persen dari keseluruhan penjualan energi listrik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues, bahan galian yang terindikasi terdapat dalam perut negeri seribu bukit ini cukup bervariasi banyaknya, seperti batuan marmer, andesit/basalt, mika, gamping/kapur, dan batuan gunung yang lain. Tetapi sebagian besar belum sampai pada tahap eksplorasi. Pada

tahun 2011, jumlah perusahaan Galian C yang memegang SIPD tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 4 perusahaan. Terdiri dari 3 perusahaan galian sirtu dan 1 perusahaan galian batuan gunung

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Dampak keberhasilan pembangunankependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk suatu daerah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dasar Piramida Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang terlihat melebar menunjukkan angka kelahiran di kabupaten ini cukup tinggi. Hal ini juga didukung dari angka rasio ibu anak pada tahun 2011 yang mencapai 43,02 persen, yang berarti setiap 100 wanita usia 15-49 tahun terdapat 43 anak usia 0-4 tahun.

Dasar piramida yang cukup lebar juga dapat menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Pada tahun 2014, Kabupaten Gayo Lues memiliki komposisi penduduk usia muda sekitar 35 persen, penduduk usia produktif sekitar 62 persen, dan penduduk usia tua sekitar 3 persen, dengan total rasio ketergantungan sebesar 60,05 persen. Artinya dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sekitar 60,05 penduduk usia tidak produktif.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Kemampuan keuangan dan pengelolaan pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan, selain sumberdaya manusia pelaksana pembangunan, regulasi yang mengatur, situasi dan kondisi lapangan. Proses pembangunan dapat di implementasikan dengan lebih lancar jika didukung ketersediaan dana yang memadai dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal yang penting adalah mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada serta mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat yang tepat.

Pada prinsipnya, analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kapasitas keuangan Kabupaten Gayo Lues. Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan sumber penerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Dalam konsep penganggaran yang membolehkan

terjadinya defisit pada batas-batas tertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan partisipatif

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Proyeksi

3.1.1. Kondisi Pendapatan Daerah dan Proyeksi

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Gayo Lues.

Untuk melihat kondisi pendapatan daerah Kabupaten Gayo Lues, didasarkan pada data APBK target yang diproyeksikan selama lima tahun terakhir. Sebagaimana terlihat di dalam Tabel di bawah ini, Pendapatan Kabupaten Gayo Lues memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan asli daerah					
1.1.1	Pajak Daerah	1,047,830,663.00	802,786,365	1,457,861,655.00	1,836,588,612.50	2,541,101,208.00
1.1.2	Retribusi Daerah	325,964,873.00	.	3,126,361,666.00	3,729,436,208.00	5,368,954,071.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	874,004,613	1,008,390,411.00	38,437,500.00	38,440,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2,793,377,100.49	1,434,184,410	836,971,226.00	2,291,134,591.98	1,225,512,119.02
1.1.5	Zakat				0.00	2,000,000,000.00
1.2	Dana Perimbangan	277,723,125,494.00	312,829,761,951.00	321,804,759,800.00	310,339,017,776.00	364,507,022,432.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50,412,125,494.00	54,225,881,951	32,707,285,800.00	40,872,677,776.00	38,504,566,432.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	200,632,000,000.00	226,715,880,000	252,882,474,000.00	241,585,340,000.00	291,076,556,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26,679,000,000.00	31,888,000,000	36,215,000,000.00	27,881,000,000.00	34,925,900,000.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5,542,725,139.00	16,107,213,150.00	24,629,395,929.00	70,702,069,999.00	105,379,353,965.36
	Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF/PPD)				14,793,411,056.00	
	Dana Infrastruktur Pendidikan				1,000,000,000.00	
	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)				24,175,000,000.00	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru				3,334,794,000.00	
	Pendapatan Lainnya OTSUS	397,821,648.00	12,436,901,361	8,564,423,476.00	7,729,143,713.00	96,842,846,221.36
1.3.1	Hibah					876,084,308.00
1.3.2	Dana Darurat					

1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan dari Pemerintah Daerah Lainnya		3,670,311,789.00	6,064,972,453.00	4,669,721,230.00	7,660,423,436.00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	5,144,903,491.00		10,000,000,000.00	15,000,000,000.00	
	dana Alokasi Desa					
Jumlah Pendapatan Daerah		287,433,023,269.49	332,047,950,489.00	352,863,740,687.00	388,936,684,687.48	481,060,383,795.38

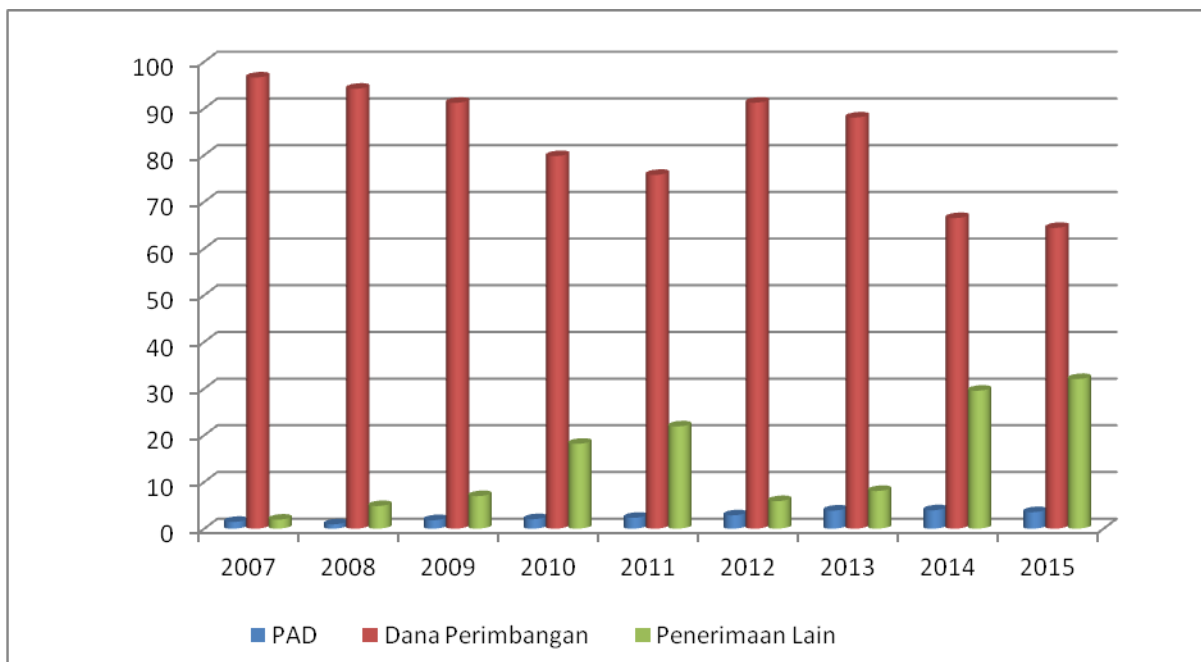
Sumber : DPKD 2014

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	2	8	9	10	11
1.1	Pendapatan asli daerah				28,347,657,964.00
1.1.1	Pajak Daerah	1,664,403,464.00	2,974,996,559.00	3,776,538,588.00	1,853,043,464.00
1.1.2	Retribusi Daerah	7,114,929,000.00	12,033,978,452.00	15,505,329,095.00	12,847,295,500.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,591,781,000.00	2,415,428,408.67	2,368,147,287.59	1,887,319,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	587,500,000.00	1,067,761,500.00	3,845,094,598.00	7,160,000,000.00
1.1.5	Zakat	2,000,000,000.00	1,721,744,379.00	3,429,653,749.00	4,600,000,000.00
1.2	Dana Perimbangan	412,702,474,318.00	459,314,155,092.00	488,361,577,846.00	516,327,340,853.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38,916,253,318.00	36,842,393,092.00	33,379,439,846.00	31,187,861,853.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	329,446,951,000.00	374,040,972,000.00	403,096,648,000.00	416,868,039,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	44,339,270,000.00	48,430,790,000.00	51,885,490,000.00	68,271,440,000.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26,715,418,427.71	42,141,196,436.94	216,940,345,474.29	256,876,952,391.64

	Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF/PPD)				
	Dana Infrastruktur Pendidikan				
	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)				
	Dana Tambahan Penghasilan Guru				
	Pendapatan Lainnya OTSUS	371,480,890.49	15,560,151,151.22	196,274,956,602.00	200,855,367,107.00
1.3.1	Hibah	3,376,084,308.00			
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11,156,515,749.22	11,533,122,285.72	11,549,195,872.29	22,927,117,284.64
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	11,154,993,000.00	15,047,923,000.00	9,116,193,000.00	23,934,902,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	656,344,480.00			
	dana Alokasi Desa				9,159,566,000.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	452,376,506,209.71	521,669,260,827.61	734,226,686,637.88	801,551,951,208.64

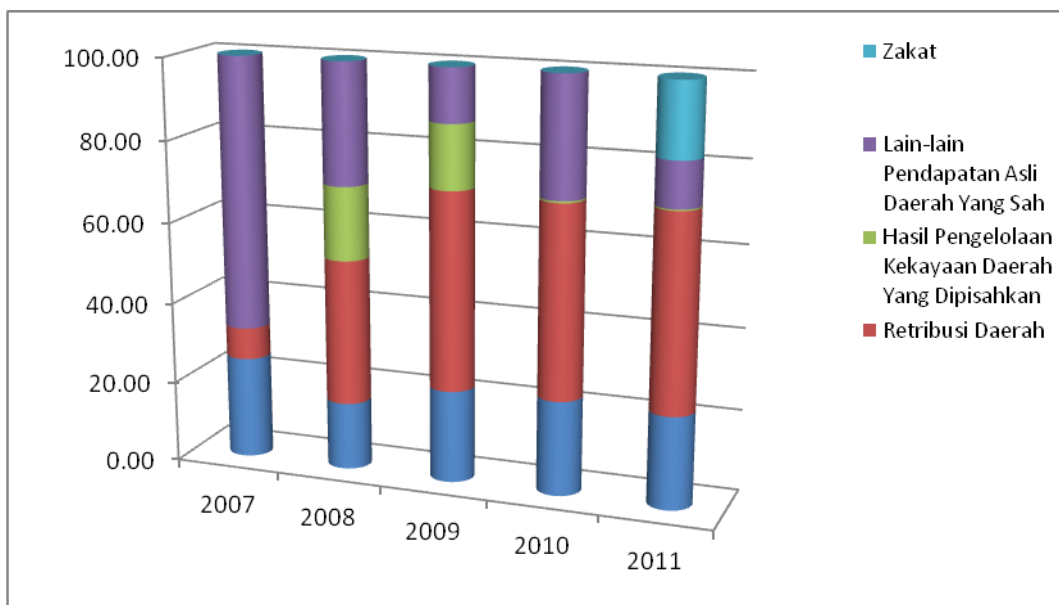
Pendapatan Kabupaten Gayo Lues memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian Gambar 3.1 tentang jumlah pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu (2007-2012) menunjukkan bahwa sebagian besar dana untuk menjalankan program program pembangunan di Gayo Lues bersal dari dana perimbangan (Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Gayo Lues dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah walaupun perkembangan proporsi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan. Kontribusi PAD sebesar 3.54%, pada tahun 2015, sedangkan konstribusi sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar 64.42%.



Gambar 3.1. Proporsi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2015

Proporsi sumber sumber pedanaan di Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2007-2014 adalah lebih dari 60% dari dana perimbangan dan dana yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan tersebut menengaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Pembangunan Kabupaten Gayo Lues pada dasarnya tergantung dari APBK yang akan disusun dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Apabila melihat stuktur anggaran, di mana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan daerah menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Penggalan sumber-sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, agar ketergantungan sumber keuangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi lambat laun bisa dikurangi. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



Gambar 3.2. Perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2011

Beberapa sektor yang bisa menjadi penyumbang peningkatan PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pajak daerah digali dari pajak galian C, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta jasa restoran dan hotel.

Proyeksi pajak ke depan akan mengalami pertumbuhan sekitar 15% tahun 2017. Proyeksi retribusi ke depan akan mengalami kenaikan dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 15% sampai 20% sampai dengan tahun 2017.

Pendapatan asli daerah ditopang oleh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang pisahkan proyeksi pertumbuhan diperkirakan naik sekitar 15% sampai 20% tahun 2017. Sedangkan pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan mengalami pertumbuhan sekitar 15%-20% pada tahun sampai tahun 2017, pertumbuhan ini diharapkan dari badan usaha milik daerah, Badan Layanan Umum daerah, penerimaan lain-lain.

Proyeksi pendapatan lain-lain yang sah ke depan diperoleh dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 3.3.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013-2017

No	Jenis pendapatan daerah	2015 Tahun Berjalan	2016	2017
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan asli daerah	28,347,657,964.00	37.400.527.470,00	48.843.368.528,45
1.1.1	Pajak Daerah	1,853,043,464.00	3.012.926.967,00	3.464.866.012,05
1.1.2	Retribusi Daerah	12,847,295,500.00	18.314.655.500,00	23.442.759.040,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,887,319,000.00	2.867.000.000,00	3.440.400.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7,160,000,000.00	10.579.452.897,00	12.695.343.476,40
1.1.5	Zakat	4,600,000,000.00	2.626.492.106,00	5.800.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	516,327,340,853.00	713.543.519.000,00	795.192.005.515,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31,187,861,853.00	27.267.878.000,00	29.994.665.800,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	416,868,039,000.00	466.817.081.000,00	520.501.045.315,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	68,271,440,000.00	219.458.560.000,00	244.696.294.400,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	256,876,952,391.64	329.000.664.737,00	363.864.432.909,63
	Pendapatan Lainnya OTSUS	200,855,367,107.00	198.087.218.142,00	217.895.939.956,20
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	22,927,117,284.64	24.511.829.595,00	27.330.689.998,43
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	23,934,902,000.00	23.934.902.000,00	26.687.415.730,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya			
	dana Alokasi Desa	9,159,566,000.00	82.466.715.000,00	91.950.387.225,00
	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)	801,551,951,208.64	1.079.944.711.207,00	1.207.899.806.953,07

Sumber : DPKD (2015)

Kecenderungan (trend) proyeksi pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah dana perimbangan yang masih menjadi tulang punggung pendanaan program program pembangunan di Kabupaten Gayo Lues. Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah tidak menunjukkan perubahan yang berarti di kurun waktu 5 tahun yang lalu dan kurun waktu RPJMD Kabupaten Gayo Lues 2013-2017. Dana dari sumber lain lain pendapatan yang sah, pada tahun 2010 dan 2011 melonjak tinggi dari tahun tahun sebelumnya karena mendapat suntikan dana pembangunan dari DPIPD "dana percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana daerah". Dengan berlaku Qanun Aceh Nomor 2 tentang dana Otsus bahwa dana Otonomi Khusus dilaksanakan melalui dana transfer ke rekening Kabupaten/kota.

3.1.2. Kondisi Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Pelimpahan wewenang oleh pusat ke daerah menimbulkan konsekuensi langsung terhadap peningkatan besaran pengeluaran pemerintah daerah. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap daerah adalah pelimpahan wewenang di sisi pengeluaran kurang proporsional dengan pelimpahan wewenang di sisi penerimaan. Akibatnya, hampir setiap daerah kabupaten dan kota menghadapi fiscal gap yang cukup signifikan. Dampak nyata yang sangat di rasakan oleh setiap daerah adalah relatif besarnya porsi pengeluaran daerah untuk aktivitas rutin daerah (belanja tidak langsung).

Tabel 3.4.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
2.	Belanja Daerah	299,351,054,649.00	301,509,046,187.91	362,583,162,988.09	380,379,637,289.11	477,297,116,553.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	116,663,201,135.00	229,921,519,126.91	161,540,718,084.00	185,268,599,720.11	367,588,559,452.00
2.1.1	Belanja Pegawai/Barang	68,545,788,724.00	172,139,294,528.91	98,438,878,823.00	122,210,897,999.41	279,381,060,390.00
2.1.2	Belanja Bunga				419,444,472.70	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi				0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah		6,647,750,000.00	20,484,716,150.00	28,342,028,476.00	35,073,321,789.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19,377,797,020.00		13,270,000,000.00	10,163,148,770.00	22,722,248,778.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil				16,133,080,002.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	23,240,376,200.00	44,066,329,448.00	19,801,011,111.00		21,418,040,858.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,499,239,191.00	7,068,145,150.00	9,546,112,000.00	8,000,000,000.00	8,993,887,637.00
2.2	Belanja Langsung	182,687,853,514.00	71,587,527,061.00	201,042,444,904.09	195,111,037,569.00	109,708,557,101.00
	Belanja Pegawai	30,815,282,084.00		36,250,966,312.00		
	Belanja Barang dan Jasa	66,002,862,144.00		84,013,810,105.09		
	Belanja Modal	85,869,709,286.00	71,587,527,061.00	80,777,668,487.00		109,708,557,101.00

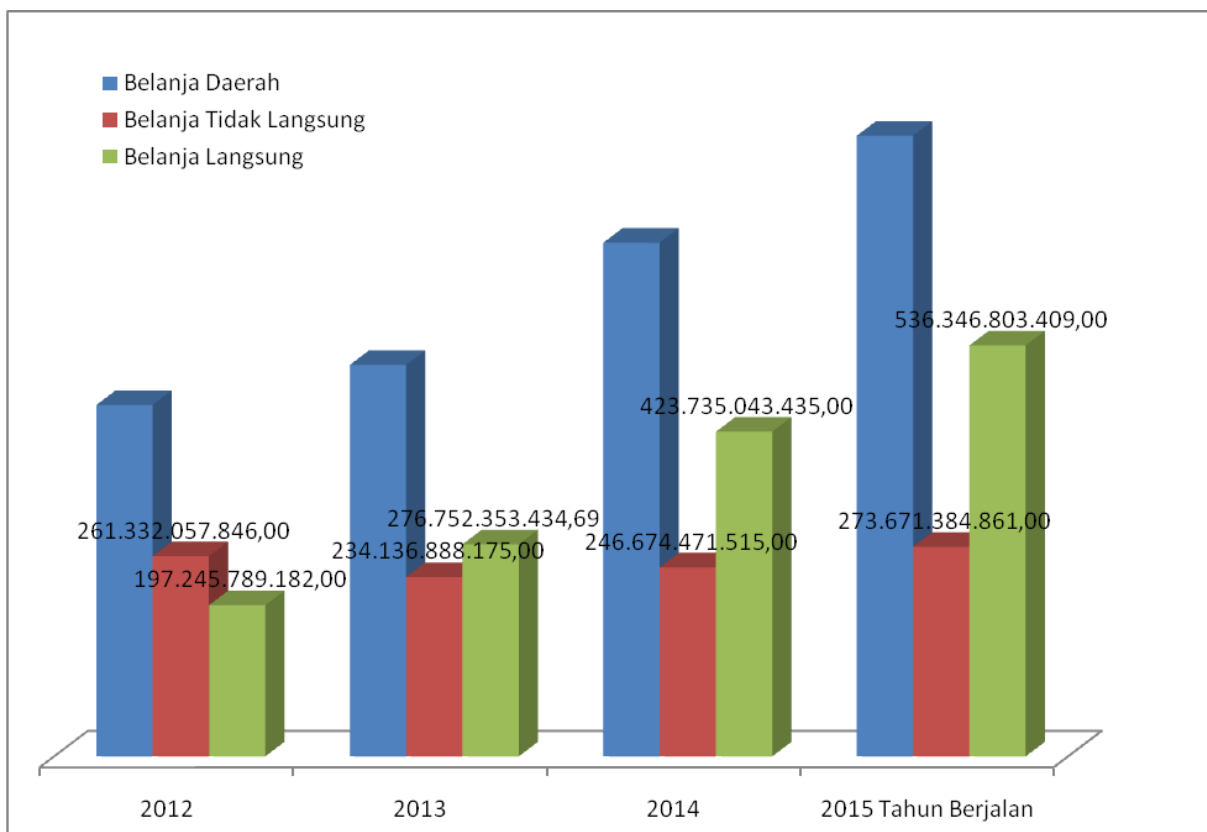
Sumber : DPKD, 2013

Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	2	8	9	10	11
2.	Belanja Daerah	458,577,847,028.00	510.889.241.609,69	670.409.514.950,00	810,018,188,270.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	261,332,057,846.00	234.136.888.175,00	246.674.471.515,00	273,671,384,861.00
2.1.1	Belanja Pegawai/Barang	181,689,125,136.00	179.143.415.471,00	184.949.134.614,00	191,925,135,344.00
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	32,228,989,356.00	18.301.833.750,00	20.055.250.000,00	18,405,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12,940,924,000.00	12.199.735.000,00	14.283.800.000,00	12,720,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	19,295,448,954.00	15.365.021.954,00	21.657.128.301,00	44,470,655,028.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15,177,570,400.00	9.126.882.000,00	5.729.158.600,00	6,150,594,489.00
2.2	Belanja Langsung	197,245,789,182.00	276.752.353.434,69	423.735.043.435,00	536,346,803,409.00
	Belanja Pegawai	28,243,229,496.00	29.834.118.533,00	37.564.293.111,00	47,829,212,500.00
	Belanja Barang dan Jasa	83,636,594,423.00	115.575.015.890,00	157.818.534.229,00	207,110,728,190.00
	Belanja Modal	85,365,965,263.00	131.343.219.011,69	228.352.216.095,00	281,406,862,719.00

Sumber : DPKD, 2015

Realisasi Belanja daerah Kabupaten Gayo Lues seperti tertera pada Gambar 3.3 komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah. Pada tahun 2012 belanja layanan publik atau belanja langsung menyerap 43.01% dan semakin meningkat setiap tahunnya 66.21% pada tahun 2015. Sedangkan komponen belanja digunakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2012 menyerap 56.99% dan menurun sebesar 33.79% tahun 2015



Gambar 3.3. Besaran Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2015

Untuk 5 tahun ke depan harus diupayakan secara maksimal peningkatan belanja pembangunan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues untuk 5 tahun ke depan harus lebih difokuskan kepada: (a) peningkatan porsi belanja pembangunan daerah tanpa mengorbankan porsi belanja rutin yang berkaitan pelaksanaan fungsi pelayanan; (b) mengkoordinir seluruh SKPK dalam pengelolaan dan pengalokasian kucuran dana dari pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi,

hibah, perbantuan, dan lain-lain (c) memaksimalkan peran dunia usaha dalam bentuk investasi dan lain-lain.

3.1.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu hingga tahun 2015, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2017 mendatang

Tabel 3.6
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Pendanaan Pembangunan Pada Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI		
		2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	3	4	5
1	Pendapatan	510.889.241.610	670.409.514.950	801.551.951.209	1.077.839.541.642	1.179.174.417.965
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	510.889.241.610	670.409.514.950	801.551.951.209	1.077.839.541.642	1.179.174.417.965
	Dikurangi :					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (belanja bantuan keuangan kepada desa)	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	510.889.241.610	670.409.514.950	801.551.951.209	1.077.839.541.642	1.179.174.417.965

Tabel 3.6 menggambarkan kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2013 dan 2014 adalah angka realisasi sedangkan untuk tahun 2015 merupakan tahun berjalan yang belum ditetapkan angka realiasisinya. Selanjutnya tingka kenaikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan secara rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 18,93 persen. Hal ini disebabkan total pendapatan yang diterima setiap tahun mengalami

kenaikan terutama proyeksi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, transfer dana Otsus Provinsi dan dana alokasi desa.

Tabel 3.7
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	510.889.241.610	670.409.514.950	801.551.951.209	1.077.839.541.642	1.179.174.417.965
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	276.752.353.434	423.735.043.435	536.346.803.409	586.511.363.736	676.796.752.887
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi :					
II.c	Belanja Langsung Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	74.663.332.565	79.336.816.623	105.370.430.583	113.556.388.261	123.700.428.786
II.d	Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	-	-	-	-	-
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	202.089.020.869	344.398.226.812	430.976.372.826	472.954.975.475	553.096.324.100
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	308.800.220.741	326.011.288.138	370.575.578.383	604.884.566.167	626.078.093.865
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	308.800.220.741	326.011.288.138	370.575.578.383	604.884.566.167	626.078.093.865
	Dikurangi :					
III.b	Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	234.136.888.175	246.674.471.515	273.671.384.861	491.328.177.906	502.377.665.079
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)	74.663.332.566	79.336.816.623	96.904.193.522	113.556.388.261	123.700.428.786
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I - (II + IIIa))	-	-	-	-	-

Tabel 3.8
Alokasi Pendanaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2012-2017

No	Jenis Dana	Proyeksi									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Prioritas I	202.089.020.869	39,56	344.398.226.812	51,37	430.976.372.826	53,77	472.954.975.475	43,88	553.096.324.100	46,91
2	Prioritas II	74.663.332.566	14,61	79.336.816.623	11,83	96.904.193.522	12,09	113.556.388.261	10,54	123.700.428.786	10,49
3	Prioritas III	234.136.888.175	45,83	246.674.471.515	36,79	273.671.384.861	34,14	491.328.177.906	45,58	502.377.665.079	42,60
Total		510.889.241.610	100	670.409.514.950	100	801.551.951.209	100	1.077.839.541.642	100	1.179.174.417.965	100

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJM Kabuapten Gayo Lues dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPA termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan,

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Dalam rangka mengimplementasikan program prioritas I, II dan III agar tepat sasaran maka Pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu melakukan upaya sebagai berikut:

1. Komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya;
2. Melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Mengembangkan Potensi-potensi daerah sebagai sumber pendapatan potensial;
3. Memberikan insentif dan disinsentif kepada investor.
4. Memanfaatkan zakat/infaq/sedakah sebagai Pendapatan Asli (PAD)

3.1.4. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.9
Realisasi Penerimaan dan Pembayaran Pembiayaan Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
3.	Pembiayaan Daerah	18,693,091,629.00	13,275,060,249.00	18,213,773,304.00	13,090,249,002.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	15,693,091,629.00	1,275,060,249.00	15,213,773,304.00	3,090,249,003.00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	15,693,091,629.00	1,275,060,249.00	2,845,748,254.00	2,494,351,003.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			10,000,000,000.00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			2,368,025,050.00	595,898,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	3,000,000,000.00	9,999,999,999.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	3,000,000,000.00	12,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang				9,999,999,999.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Pembayaran Netto	12,693,091,629.00	10,724,939,751.00	12,213,773,304.00	-6,909,750,996.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	775,060,249.49	19,813,964,550.09	2,494,351,002.91	1,647,296,402.37

Tabel 3.10.
Realisasi Penerimaan dan Pembayaran Pembiayaan Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10	11
3.	Pembiayaan Daerah	1,566,188,875.37	1,566,188,875.37	6,736,284,563.19	46,757,059,908.11	37,328,201,677.99
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1,566,188,875.37	1,566,188,875.37	2,295,155,147.19	8,634,044,949.11	34,328,201,677.99
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1,402,406,202.37	1,402,406,202.37	1,873,158,307.19	8,634,044,949.11	34,328,201,677.99
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	163,782,673.00	163,782,673.00	421,996,840.00		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	4.441.129.416,00	38.123.014.959,00	3.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			0		
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah			1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang			2.941.129.416,00	35.623.014.959,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pembayaran Netto	1,566,188,875.37	1,566,188,875.37	2.145.974.268,81	31.180.753.595,89	8.466.237.061,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkekaan (SILPA)	5,329,456,117.75	4,635,151,942.92	8.634.044.949,11	32.636.418.091,99	0,00

Sumber : *DPKD, 2015*

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Pembiayaan mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman.

3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2012-2017 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBK dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

3.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat.

Arah pengelolaan pendapatan:

1. Melakukan penyempurnaan dasar-dasar hukum (Qanun daerah) yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
2. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemupukan dan Pemungutan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh dan SKPK Penghasil pendapatan.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap SKPK yang mengelola pendapatan asli daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan DPRK dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRK dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Harga.

3.2.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila APBK dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
3. Apabila APBK dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau memperluas kemitraan.

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Berdasarkan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah maka kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode-periode sebelumnya. Kebijakan pendapatan daerah khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan. Dalam periode ini diupayakan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dengan demikian dapat diwujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah melalui upaya adanya perimbangan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya, serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan program-program pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, serta Efisiensi dan efektifitas anggaran.

3. Usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders. Penilaian kewajaran meliputi:
 - a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah;
 - b. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;
 - c. Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan;
 - d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sehingga memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses pembangunan, setiap kota akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda karena tidak sama kekuatan dan peluang serta prospek pengembangannya. Kabupaten Gayo Lues untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sebagai daerah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan mengejar segala ketertinggalan dalam pembangunan dan sejalan dengan pembangunan nasional, daerah dihadapkan kepada persaingan dalam berbagai aspek dengan daerah lain baik persaingan regional maupun persaingan internasional. Guna mengantisipasi tingginya intensitas pembangunan dan persaingan, daerah harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu ikut berpartisipasi dan mengambil manfaat dari dinamika persaingan tersebut. Daerah yang tidak memiliki daya saing atau hanya memiliki daya saing yang rendah dikawatirkan akan menjadi komoditas bagi daerah lain dan pada gilirannya akan sulit mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.

4.1.1. Pelaksanaan Syariat Islam belum optimal

Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum, kuatnya pengaruh negatif globalisasi yang umumnya tidak sejalan dan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam

4.1.2. Tata kelola pemerintahan belum optimal

Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berbagai macam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah diupayakan secara optimal namun sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat masih relatif terbatas. Sebaliknya pelayanan terhadap masyarakat adalah hak masyarakat yang mesti terpenuhi sebagai suatu kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan segala keterbatasan pemerintah belum dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sehingga masyarakatpun belum dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi.

Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Perwujudannya berarti adanya tatanan yang akan menunjang upaya untuk mewujudkan Kabupaten Gayo Lues lebih baik di masa mendatang.

4.1.3. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi

Sesuai dengan kondisi daerah yang sedang mengejar berbagai ketertinggalan dalam pembangunan bertujuan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabil dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional, yang memerlukan penyediaan prasarana dan sarana ekonomi sejalan dengan perubahan struktur ekonomi dari semula didominasi oleh pertanian dan peternakan tradisional ke arah struktur ekonomi yang lebih maju.

Dalam era globalisasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, informasi juga penting artinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebagai

bagian dari persaingan global, daerah juga harus memiliki kemampuan untuk mengakses informasi.

Pertumbuhan ekonomi Gayo Lues masih rendah hanya sebesar 4.80 persen pada tahun 2011, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 5,02 dan Nasional yang tercatat sebesar 6,5 persen (Bank Indonesia, 2011). Disamping itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi Gayo Lues pada periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Gayo Lues masih lemah dan labil.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues selalu positif, yang berarti dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja perekonomian di kabupaten ini. Namun demikian, nilainya cenderung fluktuatif. Artinya peningkatan kinerja perekonomian di periode tertentu tidak selalu lebih cepat dari periode sebelumnya. Pada tahun 2013, perekonomian kabupaten ini tumbuh sebesar 4,58 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2012 yang sebesar 4,98 persen, target yang telah ditetapkan dalam RPJM pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5.04 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Gayo Lues disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, rendahnya minat investasi swasta pada sektor produktif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produksi dan nilai tambah dari produk unggulan daerah yang belum secara nyata meningkatkan struktur ekonomi Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, peningkatan produk dan nilai tambah komoditi unggulan daerah menjadi prioritas pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gayo Lues ke arah yang lebih baik.

4.1.4. Kerawanan pangan dan nilai produk pertanian rendah

Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Gayo Lues menempati urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB). Dalam lima tahun terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian

kepada PDRB lebih 50%, sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Gayo Lues.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut. Perekonomian Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan kontribusinya sebesar 54,20 persen. Akan tetapi jika dilihat lebih rinci, kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini berarti, sektor-sektor selain pertanian tumbuh dan membuat struktur perekonomian kabupaten ini lebih bervariasi

Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Gayo Lues menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Para petani menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, beralih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Di pihak lain, para petani tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Tantangan terbesar bagi Kabupaten Gayo Lues adalah upaya mengkaitkan (linkage) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani juga akan mengalami peningkatan. Secara keseluruhan sangat diperlukan penetapan peruntukan lahan yang pasti untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

4.1.5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan

merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran.

Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Di Kabupaten Gayo Lues, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan Kabupaten Gayo Lues memang mengalami penurunan. Tetapi, perentase penduduk yang miskin masih cukup besar. Pada 2005, penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues mencapai 33.97 namun menurun menjadi 23.38% pada tahun 2011 angka tersebut masih tergolong tinggi di Aceh. Selain itu, tingkat pengangguran di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2011 mencapai 4.5 persen, dilihat dari angka pengangguran terbuka masih dibawah angka Provinsi namun dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain di Aceh yang lebih baru mekar tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gayo Lues masih lebih tinggi.

Persentase penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 tidak mencapai target penurunan angka kemiskinan menunjukkan capaian yang buruk, yaitu 1.07% dibawah target 21.26, padahal laju penurunan angka kemiskinan 0.5% per tahun dengan asumsi pertumbuhan penduduk 2.21% per tahun tidak menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Laju penurunan kemiskinan harusnya minimal 1% per tahun.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Gayo Lues dengan beberapa kabupaten terdekat menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 22,33 persen. Selain itu, Kabupaten Gayo Lues juga merupakan satu-satunya kabupaten di tahun 2013 yang persentase penduduk miskinnya meningkat jika dibandingkan tahun 2012 Sementara itu, persentase penduduk miskin terkecil berada di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu sebesar 14,39 persen

Dalam keadaan seperti itu di antara tantangan besar bagi Kabupaten Gayo Lues di dalam meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara terus menerus

4.1.6. Kualitas sumber daya manusia masih rendah

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya dari sektor lain mengingat sumber daya manusia di samping sebagai objek pembangunan sekaligus juga sebagai subjek/pelaku pembangunan. Apabila sumber daya manusia yang tersedia masih rendah akan mengakibatkan produktifitas dan daya saing daerah juga rendah. Dalam dua puluh tahun ke depan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat memenuhi dua dimensi yang seimbang yaitu dari segi mutu dan jumlah sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah juga masalah yang sangat penting mengingat mutu lulusan sekolah-sekolah dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pendidikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, masih rendahnya mutu lulusan di berbagai tingkat sekolah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh manajemen pendidikan yang kurang efektif dan ketersediaan sarana dan sarana pendidikan yang kurang merata. Secara umum sarana pendidikan dasar dan menengah sudah memadai namun masih kurang dalam hal pemerataan. pembinaan pendidikan ditekankan kepada pelaksanaan manajemen pendidikan yang lebih baik, yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan antara satu tempat dengan tempat lain atau antara pendidikan di kota dan di perkampungan.

Di Kabupaten Gayo Lues, kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih yang paling bawah dari rata-rata IPM Aceh. Pada 2005, IPM Kabupaten Gayo Lues adalah 66,10. Pada waktu yang sama, IPM Aceh sudah 69. Pada 2011, realitasnya tidak jauh berbeda. IPM Kabupaten Gayo Lues memang meningkat menjadi 68,22 tetapi IPM Aceh sudah mencapai 72,09. SDM merupakan faktor utama dari pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lebih baik, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga lebih baik, biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Pada

akhirnya, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi.

IPM Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan trend yang terus meningkat yaitu dari 68,22 di tahun 2011 menjadi 69,09 di tahun 2013. Namun demikian, capaian IPM ini masih dibawah IPM Provinsi Aceh pada tahun 2013 yang sebesar 73,05. Bahkan IPM kabupaten ini masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan harus diatasi. Di Kabupaten Gayo Lues, angka melek huruf, masih yang terendah dari angka melek huruf Provinsi Aceh. Pada 2011 angka melek huruf di Aceh 96.88, sementara di Kabupaten Gayo Lues masih 87.38. Angka rata-rata lama bersekolah 8.73 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Gayo Lues belum menamatkan sekolah 9 tahun atau setara kelas 2 SLTP. Kualitas pendidikan juga masih memprihatinkan ditandai masih kurang siswa lulusan sekolah menengah atas dari Gayo Lues yang menembus perguruan tinggi negeri ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya daya saing intelektual siswa.

AMH penduduk Gayo Lues terus mengalami peningkatan dari 87.38 persen hingga 88.19 persen selama 2011-2013. Akan tetapi angka ini masih rendah dari angka provinsi dan bahkan masih menjadi yang terendah di seluruh Aceh

Untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kabupaten Gayo Lues dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang

ada di Kabupaten Gayo Lues. Peningkatan kualitas pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatkan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh

4.1.7. Belum optimal pelayanan kesehatan

Untuk meningkatkan daya saing daerah dibidang sumber daya manusia adalah dengan menciptakan relevansi antara jenis pendidikan dan kebutuhan daerah sesuai dengan karakter daerah. Peningkatan sumber daya manusia juga ditentukan oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun secara umum pelayanan kesehatan sudah semakin baik dimana telah banyak tenaga medis dan sarana kesehatan yang tersedia, namun masih terdapat adanya penyakit menular yang belum tertangani secara maksimal, masyarakat yang mengalami kurang gizi di daerah tertentu, angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Secara kedaerahan kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh budaya hidup masyarakat yang kurang apresiatif terhadap hidup sehat dan perencanaan keluarga sehat dan sejahtera dan kesehatan masyarakat secara umum.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gayo Lues masih di bawah rata-rata Aceh. Pada 2005, UHH di Kabupaten Gayo Lues 65.20, sementara di Aceh rata-rata sudah mencapai 68. Pada 2010, UHH di Kabupaten Gayo Lues meningkat menjadi 67,08, sementara di Aceh sudah menjadi 68,70. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya pola pangan harapan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Di samping, angka kematian bayi dan ibu-ibu yang melahirkan masih cukup tinggi.

Rata-rata Usia Harapan hidup masyarakat pada tahun 2013 yaitu 68.50 tahun dapat mencapai target 67,95 tahun, Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang lahir pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai usia 68.5 tahun meningkat 0,55 tahun dibandingkan perkiraan tahun sebelumnya sebesar 67,95 tahun

Permasalahan pembangunan kesehatan yang lebih penting adalah pembangunan kualitas tenaga medis paramedis baik secara materi maupun mental. Tenaga medis dan paramedis masih banyak yang enggan ditugaskan di desa terpencil, menyebabkan masalah tersendiri bagi masyarakat yang

memutuskan pelayanan medis. Perlu diketahui juga bahwa hanya ada satu dokter spesialis putra daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Padahal, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara baik. Pemerintah daerah memberikan dukungan bagi dokter putra daerah untuk menempuh pendidikan spesialisnya. Saat ini ada 5 (lima) putra daerah mengikuti pendidikan dokter spesialis dan diharapkan 5 (lima) tahun ke depan kemampuan mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keadaan demikian menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Gayo Lues. Kurangnya pemahaman kaum perempuan dan lemahnya peranan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

4.1.8. Pembangunan infrastruktur belum merata

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur jalan di Gayo Lues dengan dukungan berbagai sumber dana dalam kurun waktu lima tahun ke belakang secara kuantitas (jumlah panjang jalan) dan kualitas capaiannya bisa dianggap cukup baik, Akan tetapi seharusnya penanganan jalan dititikberatkan pada jaringan jalan strategis yang memudahkan akses ke wilayah tengah, timur, barat dan selatan, jaringan jalan ke areal produksi hasil bumi (kebun, sawah, peternakan dan perikanan) serta ke permukiman.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Gayo Lues belum optimal dimanfaatkan. Dari 144 desa, jumlah sarana air bersih yang telah dibangun baru mencapai 51 desa (58 unit), jalan lingkungan sebanyak 75 desa, dengan demikian dalam tahun mendatang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sosial, pembangunan jaringan air bersih, jalan tembus menuju desa-desa dan sentra ekonomi masyarakat serta jalan lingkungan menjadi salah satu

prioritas pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan sendiri (*self growth*) ekonomi masyarakat.

4.1.9. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal

Sumber daya alam yang dimiliki daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal bahkan banyak yang belum tersentuh untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Di samping berfungsi sebagai modal pembangunan, sumber daya alam juga tetap berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan, salah satunya adalah sebagai penyerap tenaga kerja. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan atas ketersediaan sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, supaya akhirnya tidak menimbulkan krisis sebagaimana sering terjadi di daerah-daerah tertentu seperti terjadinya krisis air, longsor dan banjir, krisis pangan dan lain-lain. Suatu krisis yang berkelanjutan dengan intensitas dan volume yang besar dapat menimbulkan ancaman yang besar dan berdampak buruk bagi daerah. Salah satu krisis yang sudah umum terjadi adalah krisis pangan akibat terjadinya alih fungsi suatu lahan kepada fungsi lain yang tidak produktif, dan perambahan hutan yang serampangan sehingga mengakibatkan berkurangnya keaneka ragaman hayati dan terjadinya banjir dan atau kerusakan lingkungan.

Keaneka ragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dan sebagiannya terdapat di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Secara nasional keragaman hayati tersebut telah direncanakan menjadi bahan baku untuk pengembangan industri berbasis bioteknologi dan cadangan pangan di masa yang akan datang. Kekayaan tersebut perlu dilestarikan dari kemerosotan dan kepunahan akibat dari perilaku dan budaya masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam.

4.1.10. Keterbatasan Lahan

Kabupaten Gayo Lues mempunyai luas wilayah 554,990,90 ha dengan didominasi oleh kawasan konservasi (Ekosistem Leuser) sebesar 70% dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Kebutuhan ruang untuk aktifitas

ekonomi khususnya sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur jadi sangat terbatas.

4.1.11. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan seni budaya

Terjadinya degradasi moral dan kurangnya penghargaan terhadap budaya sendiri sudah mulai menggejala terutama pada generasi muda dengan indikasi berkurangnya rasa bangga terhadap budaya sendiri sehingga mudah meniru budaya lain secara cepat yang terkadang tidak sesuai dengan tuntutan agama dan budaya. Salah satu akibatnya telah terjadi pemudaran semangat gotong royong dan solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan yang dahulunya adalah semangat kesatuan dan indentitas masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan budaya dan sebagai upaya mempertahankan ciri dan indentitas daerah perlu ditingkatkan katahanan budaya dengan pembinaan soisal budaya yang dapat berasimilasi dengan perubahan yang demikian cepat tanpa harus kehilangan jati diri daerah, serta dengan melaksanakan Syari'at Islam secara sempurna dalam segala aspek kehidupan

4.1.12. Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Sektor pariwisata biasanya dimulai dari proses “memperkenalkan diri” sambil menyiapkan sarana prasarana wisata. Promosi sebagai bagian dari pemasaran selain kegiatan partisipasi dalam pekan budaya atau pagelaran seni budaya, juga dapat mengandalkan prestasi dari bidang lain yang membawa nama daerah, seperti olahraga dan pendidikan. Sebagai bentuk tanggungjawab, upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Gayo Lues, begitu juga upaya sosialisasi terus tetap ditingkatkan.

Capaian kinerja sektor pariwisata Gayo Lues cukup baik, antara lain berhasilnya Tari Saman diakui Unesco sebagai warisan budaya asli Gayo Lues pada tahun 201. Namun masih banyak lokasi wisata yang bisa dijadikan sebagai tujuan wisata. Akan tetapi hingga saat ini potensinya masih belum bisa digali secara optimal karena kendala akses daerah dan lokasi wisata yang masih sulit untuk dijangkau. Umumnya, lokasi wisata alam pegunungan yang berada jauh di pinggiran atau di dalam kawasan hutan yang lebat dan belapis-lapis yang membutuhkan waktu untuk dijangkau. Dukungan semua pihak terkait (*stakeholders*) sangat diharapkan karena Gayo Lues juga merupakan salah satu wilayah yang konsisten menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan penjaga keseimbangan lingkungan hidup serta sebagai hulu dari 6 (enam) DAS untuk wilayah lainnya di Aceh yang dapat dijadikan sebagai lokasi wisata sungai atau arung jeram. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan event tingkat provinsi ataupun nasional yang kegiatannya memanfaatkan keindahan dan tantangan alam.

4.1.13. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Gayo Lues

Perkembangan sosial politik dalam masyarakat yang semakin kritis terhadap suatu kebijakan masih perlu diakomodasi oleh partai politik yang profesional, akomodatif sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalur secara benar dan proporsional.

4.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT melalui pembahasan di dalam serangkaian forum FGD yang melibatkan seluruh stakeholders. Hasil dari FGD tersebut diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan dalam membangun kabupaten Gayo Lues 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1. Analisis SWOT

4.2.1.1. Kekuatan (Strong)

1. Potensi sumber daya Alam
2. Sebagai daerah penyerap emisi gas rumah kaca
3. Memiliki produk unggulan

4. Sejarah dan budaya yang menarik
5. Potensi ekowisata
6. Daerah penghubung antar wilayah melalui transportasi lintas tengah
7. Kondisi iklim dan lingkungan yang nyaman
8. Stabilitas politik dan keamanan
9. Penerapan Syariat Islam

4.2.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

1. Perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama
2. Tatakelola pemerintahan belum optimal.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan masih rendah
4. Belum merata pelayanan kesehatan
5. Masih tinggi angka kemiskinan dan pengangguran
6. Masih rendahnya PAD dan keterbatasan anggaran
7. Belum optimalnya perkembangan UMKM
8. Pelayanan infrastruktur belum maksimal
9. Keterbatasan lahan

4.2.1.3 Peluang (*Opportunity*)

1. Tersedianya sumber dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
2. Terbukanya peluang pemasaran
3. Terbukanya peluang berinvestasi
4. Kebijakan Pembangunan Nasional
5. Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah
6. Akses Informasi dan Komunikasi (teknologi)

4.2.1.4 Ancaman (*Treat*)

1. Perubahan iklim yang tidak menentu
2. Kerusakan lingkungan dan bencana alam
3. Alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman
4. Memudarnya nilai-nilai budaya lokal

5. Meningkatnya kriminalitas dan penyakit masyarakat
6. Persaingan ekonomi antar daerah
7. Memudarnya nilai-nilai perilaku sesuai ajaran Agama

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan Gayo Lues tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Gayo Lues 5 tahun ke depan (2012-2017) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Syariat Islam belum optimal
2. Tata kelola pemerintahan belum optimal
3. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi
4. Kerawanan pangan dan nilai produk pertanian rendah
5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi
6. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
7. Belum optimal pelayanan kesehatan
8. Pembangunan infrastruktur belum merata
9. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan lingkungan hidup
10. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan seni budaya
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban Kabupaten Gayo Lues

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Gayo lues saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gayo Lues, visi pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017 adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai, Bertaqwa, dan Bermartabat”*. Sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang semakin lebih baik yang bercukupan atau tidak kekurangan baik bukan hanya secara fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Sejahtera juga mengandung arti terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan bebas dari penindasan dan rasa takut.

Rukun adalah suatu bentuk hubungan masyarakat Gayo Lues yang memberikan kenyamanan, ketentraman, ketertiban dalam menjalankan kehidupan masyarakat yang mempunyai manfaat, sehingga memberikan nilai positif bagi masyarakat baik antara satu individu ke masyarakat lainnya, mengingat masyarakat Gayo Lues adalah masyarakat yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kerukunan baik dalam bermasyarakat maupun dalam agama.

Damai merupakan sebuah harapan setiap Masyarakat Gayo Lues untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, damai diartikan secara luas baik dari sisi damai mampu menjaga stabilitas keamanan dan damai untuk tetap menjalankan proses pembangunan yang demokratis.

Bertaqwa adalah suatu prilaku terhadap keyakinan masyarakat yang di jalankan selaku umat beragama, mampu menjalankan dan mampu mengamalkan perintah Tuhan Yang Maha Esa

Bermartabat merupakan sebuah bentuk keberhasilan dari titik perjuangan oleh individu, kelompok masyarakat dan secara umum berasal dari proses pembangunan karakteristik pembangunan manusia yang berakhlak mulia. Bermartabat juga berasal dari sebuah keberhasilan semua proses dan efektifitas atas pembangunan daerah Gayo Lues.

5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuh butir sebagai berikut :

1. Menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan Menegakkan Supremasi Hukum;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Menggali dan Melestarikan Sumber Daya Alam dan Memanfaatkannya Secara Tepat Guna;
6. Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya;
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gayo Lues.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki nilai krusial dalam penyusunan RPJMD. Rumusan tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena itu, Visi dan Misi harus dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, sehingga program dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat operasionalisasikan kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017

TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah	
Menciptakan hidup dan kehidupan masyarakat yang Islami sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadist	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Syari'at Islam, dengan indikator utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Angka Melek AlQuran dari 65 % menjadi 80 %, 2. Meningkatnya ZIS sebagai PAD dari 3,43 Milyar menjadi 4,0 Milyar.
	Meningkatnya prasarana dan sarana peribadatan untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumah ibadah 2 unit perdesa, 2. Tersedianya jumlah imam/ulama dari 140 orang menjadi 225 orang.
Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian masyarakat Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan ibadah	Mewujudkan ketentraman masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sosial budaya, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam dari 173 kasus menjadi 80 kasus. 2. Meningkatnya cakupan patroli petugas Satpol PP dari 50 % menjadi 65 %.
Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan Menegakkan Supremasi Hukum	
Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan norma Syari'at Islam, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dari 184 orang menjadi 270 orang.
	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang kompeten, berwibawa, professional dan Islami, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai LAKIP SKPK dan Pemerintah Kabupaten dari CC

TUJUAN	SASARAN
<p>kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>menjadi BB. 2. Jumlah PNS Yang mengikuti Tugas belajar/ijin belajar dari 15 orang menjadi 80 orang.</p>
	<p>Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang professional, cepat, tepat, mudah dan terjangkau, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah menjadi WTP. 2. Jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP dari 9 SKPK menjadi 36 SKPK. 3. SKPK yang telah memiliki Web Site dari 18 SKPK menjadi 30 SKPK. 4. Lama proses perizinan dari 5 hari menjadi 4 hari.
	<p>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase kualifikasi pendidikan aparatur pemerintah kampung tamatan SLTA dari 75 % menjadi 85 %. 2. Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah tersedia. 3. Meningkatnya kepemilikan E-KTP dari 58,04 % menjadi 100 %.
<p>Menegakkan supremasi hukum</p>	<p>Terwujudnya penegakan supremasi hukum, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah angka kriminalitas dari 720 kasus menjadi 100 kasus.
<p>Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>	
<p>Memberdayakan ekonomi masyarakat</p>	<p>Mengembangkan sektor unggulan dan produk unggulan, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa dari 21,5 % menjadi 23,61 %. 2. Meningkatnya jumlah industri berbasis teknologi dari 4357 unit menjadi 4600 unit.
	<p>Meningkatkan infrastruktur, potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas padi dari 4 ton/ha menjadi 6 ton/ha, jagung 5 ton/ha menjadi 6 ton/ha, kedelai 3 ton/ha menjadi 4 ton/ha. 2. Meningkatnya produksi daging sapi dari 55.240 ton menjadi 58.000 ton, daging kerbau 56.402 ton menjadi 58.000 ton, daging kambing 5348 ton

TUJUAN	SASARAN
	<p>menjadi 5.700 ton.</p> <p>3. Meningkatnya produksi ikan per tahun dari 2.611 ton menjadi 3.970 ton.</p> <p>4. Meningkatnya produksi perkebunan per tahun (Sere wangi dari 2280 ton menjadi 2.500 ton, kemiri dari 4.253 ton dari 4.538 ton.</p> <p>Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dari 55 unit menjadi 144 unit. 2. Meningkatnya jumlah UKM dari 4573 unit menjadi 4705 unit.
<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah panti sosial yang dikelola swasta tetap 12 unit. 2. Angka partisipasi angkatan kerja dari 65,24 % menjadi 74,78 %. 3. Tingkat pengangguran terbuka dari 4,4 % menjadi 1,2 %. 4. Rasio ketergantungan dari 60,86 % menjadi 6,60 %. <p>Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PMKS yang dibantu (Anak yatim dari 499 orang menjadi 1578 orang, cacat dari 282 orang menjadi 684 orang, WRSE dari 542 orang menjadi 1331 orang, RTLH dari 151 orang menjadi 498 orang, fakir miskin dari 872 orang menjadi 2181 orang, eks kusta dari 82 orang menjadi 232 orang, ODKB dari 13 orang menjadi 32 orang dan lansia/jompo dari 836 orang menjadi 2094 orang).
<p>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	
<p>Penyediaan pemerataan mutu pendidikan</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana, akses, pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka melek huruf dari 88,19 % menjadi 96,23 %. 2. Angka rata-rata lama sekolah dari 9,11 tahun menjadi 10 tahun. 3. APK dari 78 % menjadi 100 %. 4. APM (SD/MI/Paket A dari 95 % menjadi 100 %, SMP/MTs/Paket B dari 95,75 % menjadi 97,50 %, dan SMA/SMK/MA/Paket C dari 90 % menjadi 90,75 %. 5. Rasio guru terhadap murid (SD/MI 1:12 menjadi 1:16, SMP/MTs 1:14 menjadi 1:16, SMA 1:10 menjadi 1:12). 6. Angka kelulusan (SD/MI dari 98,84 % menjadi 99,90 %, SMP/MTs dari 99,94 % menjadi 99,92 %, SMA/MA

TUJUAN	SASARAN
	<p>dari 99,74 % menjadi 99,94 %).</p> <p>Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan arsip secara baku dari 3 % menjadi 25 %. 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan dari 4 kali menjadi 10 kali. <p>Meningkatnya budaya baca guna, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perpustakaan daerah dan kampung dari 35 unit menjadi 38 unit.
<p>Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (buah/1000 pddk) dari 0,01 menjadi 0,02). 2. Rasio dokter per satuan penduduk (orang/1000 pddk) dari 0,44 menjadi 0,25). 3. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (orang/1000 pddk) dari 4,6 menjadi 12,75. 4. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari 45 % menjadi 75 %. <p>Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keluarga kecil bahagia sejahtera, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata – rata jumlah anak per keluarga dari 4 orang menjadi 2 orang. 2. Rasio akseptor KB dari 85,22 % menjadi 88 %. 3. Cakupan peserta KB aktif dari 81,99 % menjadi 95 %. <p>Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kematian bayi dari 15,6 % menjadi 9 %. 2. Jumlah gizi buruk yang ditemukan dari 8 orang menjadi tidak ada. <p>Peningkatan status gizi masyarakat, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tetap 100 % per tahunnya.
<p>Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sejahtera jasmani dan rohani</p>	<p>Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah atlit yang dikirim ke event olah raga di luar daerah dari 210 orang menjadi 750 orang. 2. Jumlah penyelenggaraan event olahraga di Gayo Lues sebanyak 7 event setiap tahunnya. 3. Jumlah prestasi olahraga Gayo Lues tingkat provinsi yang memperoleh medali emas dari 1 medali menjadi 3 medali, perak dari 4 medali menjadi 6 medali, perunggu dari 4 medali menjadi 6 medali. 4. Jumlah organisasi olahraga yang dibina dari 18 organisasi menjadi 20 organisasi. 5. Jumlah organisasi masyarakat/pemuda yang dibina

TUJUAN	SASARAN
	<p>tetap sebanyak 7 organisasi.</p> <p>6. Jumlah klub olahraga yang dibina tetap sebanyak 60 klub.</p> <p>7. Jumlah gedung olah raga yang dipelihara tetap sebanyak 3 unit.</p> <p>8. Jumlah pembinaan kepemudaan dari 1 kali menjadi 2 kali setiap tahun.</p>
<p>Misi 5 : Menggali dan Melestarikan Sumber Daya Alam dan Memanfaatkannya Secara Tepat Guna</p>	
<p>Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya dan lingkungan serta mendayagunakan potensi sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari 12.530 Ha menjadi 15.769 Ha. 2. Kerusakan kawasan hutan dari 21.000 Ha menjadi 14.960 Ha. 3. Pertambangan tanpa ijin dari 4 buah menjadi 2 buah. <p>Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Melalui Pembangunan Berwawasan lingkungan, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penanganan sampah dari 60 % menjadi 70 %. 2. Persentase luas pemukiman yang tertata dari 30 % menjadi 40 %. 3. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat pembuangan sampah dari 39,56 % menjadi 46,76 %.
<p>Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu</p>	<p>Tersusun dokumen tata ruang diarahkan kepada penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, rencana umum tata ruang kota (RUTRK) ibukota-ibukota kecamatan dan pusat desa-desa yang tumbuh cepat, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dari 0,05 menjadi 0,05.
<p>Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana</p>	<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi terjadinya bencana, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tetap 100 %.
<p>Misi 6 : Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya</p>	
<p>Menggali dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Gayo</p>	<p>Menjadikan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat Gayo, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan adat istiadat Gayo yang masih dilaksanakan mencapai 90 %. 2. Frekuensi sosialisasi adat istiadat dan budaya Gayo

TUJUAN	SASARAN
	tetap 2 kali per tahun.
Mengembangkan budaya lokal di masyarakat	Terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang berbudaya, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah event seni dan budaya di Gayo Lues dari sebanyak 6 kali per tahun. 2. Jumlah prestasi seni dan budaya sebanyak 2 piagam per tahun. 3. Jumlah kelompok seni sebanyak 145 kelompok.
	Meningkatkan pendapatan masyarakat kepariwisataan, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan wisata asing dari 158 orang menjadi 200 orang. 2. Kunjungan wisata lokal dari 1095 orang menjadi 1300 orang.
Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gayo Lues	
Menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio poskamling per desa sebanyak 1 unit per desa. 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif dari 88,43 % menjadi 90 %. 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari 76,88 % menjadi 90 %.
Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan	Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus KDRT dari 6 kasus menjadi 3 kasus. 2. Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan hukum dari 80 % menjadi 90 %.
	Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak perempuan, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tingkat keterwakilan perempuan lembaga eksekutif dari 6,7 % menjadi 10 %. 2. Persentase tingkat keterwakilan perempuan lembaga legislatif mencapai 10 %.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi tercapainya visi pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017 maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan tentang arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah sebagaimana tersebut dalam table 6.

Tabel 6.1 Strategi dan arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1 : Menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah.			
Menciptakan hidup dan kehidupan masyarakat yang Islami sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadist.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Syari'at Islam.	Peningkatan pembinaan Imam Mesjid, Da'i, Guru Pengajian, Pengelola Zakat, Tahyiz Mayat, hisab dan rukyah.	Membangun kader mubaligh dan kader dakwah dan Peningkatan bimbingan dan ishlah.
		Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Syari'at Islam.
			Peningkatan pengetahuan serta pemahaman syariat Islam dalam penyadaran masyarakat.
			Peningkatan dan pemantapan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
	Meningkatnya prasarana dan sarana peribadatan untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah	Peningkatan pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat secara optimal	Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah.
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan dan melakukan sertifikasi, penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan sektor agama.	Pemberdayaan tokoh adat dan masyarakat serta mukim dan perangkatnya (jema opat/sarak opat).
Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian masyarakat Kabupaten Gayo	Mewujudkan ketentraman	Penguatan Lembaga pelayanan dan penegak hukum.	Mewujudkan supremasi hukum islam dalam masyarakat.
	masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sosial budaya	Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar instansi, fungsi dan program yang terkait dan relevansi dengan bidang	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang berkualitas dalam kehidupan beragama dan sosial budaya.
			Membangun kerja sama dan koordinasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Lues dalam menjalankan ibadah.		agama.	antar instansi, fungsi yang terkait dengan bidang agama.
Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan Menegakkan Supremasi Hukum			
Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan norma Syari'at Islam	Menata struktur dan proses birokrasi organisasi secara bertahap serta terpadu.	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan norma Syari'at Islam.
	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang kompeten, berwibawa, professional dan Islami.	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.	Mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, professional dan Islami.
		Meningkatkan kesejahteraan aparatur daerah.	Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam peningkatan <i>good ang clean governance</i> .
	Peningkatan pelayanan publik secara professional, cepat, tepat mudah dan terjangkau	Mewujudkan sistem birokrasi yang menerapkan manajemen professional dengan struktur orgnisasi yang tidak tinggi (sentralistik) sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang singkat.	
Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang professional, cepat, tepat, mudah dan terjangkau.	Merumuskan rencana aksi dan sosialisasi pemberantas korupsi secara efektif.	Peningkatan sistem lembaga pemerintah dan mempertegas tupoksi satuan kerja daerah.	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.	Peningkatan pelayanan bagi masyarakat.	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang visioner, ramah lingkungan dan sustainable.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan.	Mewujudkan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna serta efisiensi penggunaan anggaran pembangunan yang terukur secara holistik dan sinergi dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan lintas sektoral.
Menegakkan supremasi hukum.	Terwujudnya penegakan supremasi hukum.	Memberdayakan masyarakat dan aparat penegakan hukum.	Mewujudkan penegakan supremasi hukum.
Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
Memberdayakan ekonomi masyarakat.	Mengembangkan sektor unggulan dan produk unggulan.	Revitalisasi pertanian fokus pada komoditi unggulan dan andalan.	Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan daerah serta pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.
			Pengembangan potensi budi daya pada indikator ekonomi daerah.
		Peningkatan lahan produktif dan pemanfaatan lahan tidur secara berkelanjutan.	Meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan sektor basis.
	Fasilitasi pemasaran produk unggulan serta produk andalan daerah.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi.	
		Meningkatkan investasi daerah dan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional dan internasional .	
Meningkatkan infrastruktur, potensi dan daya saing daerah melalui	Pembangunan infrastruktur transportasi keseluruh pelosok desa sebagai indikator ekonomi daerah.	Mewujudkan infrastruktur yang baik untuk mendorong perekonomian daerah.	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	peningkatan investasi .		
	Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah.	Pengelolaan pasar tradisional dan pembentukan wadah berupa BUMD dan UKM bagi masyarakat.	Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Peningkatan peluang usaha dan peluang kerja.	Menurunkan angka kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja.
	Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Peningkatan pembinaan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Memberi kemudahan akses modal usaha bagi masyarakat.
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Penyediaan pemerataan mutu pendidikan.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana, akses, pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan.	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang cerdas dan terampil.
		Meningkatkan standar mutu kelulusan dan daya saing siswa.	Standarisasi pendidikan secara optimal bagi peningkatan mutu pendidikan daerah.
		Peningkatan kemampuan bahasa asing dan teknologi bagi siswa.	Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi siswa.
		Memberikan beasiswa berprestasi.	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat.	Pemberantasan buta aksara.	Memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat.
		Pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kemampuan khusus siswa.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kependidikan di semua tingkat pendidikan.
	Meningkatnya budaya baca guna.	Peningkatan budaya baca.	Memasyarakatkan budaya membaca.
Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.	Mendorong pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) terpadu, berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal .	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sehat.
	Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keluarga kecil bahagia sejahtera.	Mendorong dan mendukung ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan keluarga berencana.	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas, kesejahteraan penduduk .
	Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.	Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.	Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan asusila.
	Peningkatan status	Pemberdayaan masyarakat,	Meningkatkan status gizi masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	gizi masyarakat.	LSM, swasta dan sektor terkait dalam upaya penanggulangan masalah gizi dan pencapaian keluarga sadar gizi.	
Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sejahtera jasmani dan rohan.	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	Peningkatan pembinaan olahraga.	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sejahtera jasmani dan rohani.
Misi 5 : Menggali dan Melestarikan Sumber Daya Alam dan Memanfaatkannya Secara Tepat Guna			
Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya dan lingkunganserta mendayagunakan potensi sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.	Optimalisasi ketersediaan kawasan lindung dan sumber sumber air sebagai salah satu daya dukung sumber energi daerah dalam mengisi pembangunan energilistrik berwawasan konservasi sebagai indikator mekanisme pembangunan bersih yang bertujuan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan secara menyeluruh.	Peningkatan kawasan konservasi fokus pada ketersediaan sumber air dalam mendukung ketersediaan energy terbarukan di daerah.
		Pengembangan hasil hutan non kayu dan membangun hutan sebagai objek wisata andalan.	Melaksanakan eksplorasi hutan non lindung, pemanfaatan bahan galian yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kepastian hukum lokalisasi ekplorasi bahan galian serta hutan secara terpadu.
		Peningkatan peran penting Kawasan Konservasi dalam mendukung Program	Mengoptimalkan kawasan lindung sebagai pendukung indikator ketersediaan stok carbon daerah sebagai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		pembangunan Emisi rendah (LEDS) untuk mengurangi <i>Global warming</i> .	bagian yang terintegrasi dalam pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK).
		Konservasi dan reboisasi hutan dengan tanaman kebutuhan produksi masyarakat.	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.
	Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Melalui Pembangunan Berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan LH serta koordinasi pengelolaan LH dengan seluruh Stakeholders.	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Melalui Pembangunan Berwawasan lingkungan.
		Optimalisasi Konservasi sumber daya alam.	Meningkatkan Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup yang Lestari.
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu.	Tersusun dokumen tata ruang diarahkan kepada penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, rencana umum tata ruang kota (RUTRK) ibukota kecamatan dan pusat desa-desa yang tumbuh cepat	Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu.	Mewujudkan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu.
			Penataan sistem pemanfaatan hutan dan zonasi fungsi hutan secara berkelanjutan.
Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi terjadinya bencana.	Memasyarakatkan bahaya bencana.	Peningkatan fasilitas penanganan bencana.
			Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
Misi 6 : Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menggali dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Gayo.	Menjadikan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat Gayo.	Membangun pusat Ensiklopedi dalam mendukung program bahasa Gayo melalui kamus bahasa Gayo secara bersamaan dan keterkaitan dengan tarian Saman Gayo sebagai warisan dunia.	Membangun aspirasi masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya sebagai aset dunia tak bergerak. Lestarnya adat istiadat dan seni budaya.
		Merumuskan dan meluruskan kembali pelaksanaan adat istiadat Gayo dalam masyarakat melalui muatan lokal masyarakat sebagai <i>art subject</i> (Pelaku).	Merancang dan melaksanakan program kegiatan dalam penyelamatan nilai budaya dan adat istiadat.
Mengembangkan budaya lokal di masyarakat.	Terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang berbudaya.	Memfasilitasi pembentukan kurikulum sekolah tentang adat istiadat Gayo.	Mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang berbudaya.
		Meningkatkan promosi budaya Gayo dalam menjaga keberlanjutan program dunia secara <i>prefentive</i> .	Membangun sikap kritis (<i>Prefentive</i>) terhadap nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat sebagai aspek pendukung penggerak utama adat dan budaya Gayo.
		Mensertifikasi seni dan budaya lainnya keningkat nasional dan internasional.	Pengembangan budaya dan Pariwisata.
Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gayo Lues			
Menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat	Pembinaan sistem keamanan dan ketertiban swakarya masyarakat.	Kabupaten Gayo Lues yang aman dan tertib.
		Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.	Kabupaten Gayo Lues yang tentram dan damai.
		Menjembatani peran aktif	Mengupayakan dan membangun sistem

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		lembaga kepolisian dan TNI sebagai <i>Stake holders</i> yang profesional dalam mengintegrasikan aspek kultur dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat.	keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Terpeliharanya keutuhan bangsa dan Negara.
		Peningkatan peran aktif Satpol PP, WH dan HANSIP.	Membangun kekuatan masyarakat lokal sebagai satu kesatuan perlindungan masyarakat secara efektif.
		Pemberantasan kemaksiatan melalui sosialisasi yang sinergis secara bersama-sama instansi terkait.	Memberi kepastian hukum dan keadilan terhadap dukungan proses pendelegasian ke berbagai lini.
		Penerapan sistem politik yang demokratis.	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Membangun sistem politik berlandaskan moral dan budaya beradab.
Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan.	Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian ini menguraikan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017. Arah kebijakan umum ini berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah: *‘Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai, Bertaqwa, dan Bermartabat’*.

Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan pada BAB VI maka kabupaten Gayo Lues menyusun Program pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, 2) Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan, 3) Pemberdayaan ekonomi, 4) Penanggulangan kemiskinan, 5) Ketahanan pangan dan kemandirian pangan, 6) Infrastruktur yang berkelanjutan, 7) Peningkatan mutu pendidikan, 8) Peningkatan Mutu kesehatan, 9) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 10) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan seni budaya, 11) Stabilitas keamanan dan ketertiban.

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan prioritas dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah				
	Membangun kader mubaligh, kader dakwah dan Peningkatan bimbingan dan ishlah	Program peningkatan sumber daya dan peran ulama Program pengembangan Budaya Islam	Meningkatnya Sumber Daya Ulama	50%	75%
	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Syari'at Islam.	Program Penyemaraan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an	11 Kec	11 Kec
	Peningkatan pengetahuan serta pemahaman syariat Islam dalam penyadaran masyarakat	Program peningkatan ZIS dan pembinaan kelembagaan	Meningkatnya Zis sebagai PAD	5%	15%
		Program sertifikasi penatausahaan dan pengelolaan harta agama	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan harta agama	40%	80%
	Peningkatan dan pematapan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Program pematapan syariat islam	Meningkatnya pemahaman syariat Islam	11 Kec	11 Kec
	Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah	Program pengembangan sarana dan prasarana keagamaan	Meningkat sarana dan prasarana keagamaan	70%	95%
	Pemberdayaan tokoh adat dan masyarakat serta mukim dan perangkatnya (jema opat/sarak opat)	Program pemberdayaan dan peningkatan lembaga keagamaan	Meningkatnya Pelayanan Agama dan Lembaga Keagamaan	50%	70%
	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang berkualitas dalam kehidupan beragama dan sosial budaya.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam desa bersyariat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam desa bersyariat	144 Desa	144 Desa
	Membangun kerja sama dan koordinasi antar instansi, fungsi yang terkait dengan bidang agama	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Berkurangnya penyakit masyarakat	70%	30%
		Program Penegakkan Kebijakan	Berkurangnya penyakit	70%	30%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan Syariat Islam	masyarakat		
2	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan				
	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	60%	85%
		Program Penegakkan Kebijakan Daerah	Meningkat Disiplin Aparatur	30%	55%
	Mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, professional dan Islami	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pengawasan	50%	90%
		Program Pengawasan Penegakkan Disiplin Aparatur Pemerintah	Meningkat Disiplin Aparatur	30%	55%
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkat Disiplin Aparatur	30%	55%
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	Menurunnya Penyelewengan Keuangan Daerah dan Mencegah terjadinya KKN	50%	5%
	Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan <i>good ang clean governance</i>	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkat kapasitas Aparatur	50%	80%
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	80%	100%
		Program fasilitas pindah/purna tugas	Meningkatnya pemerataan aparatur berdasarkan kompetensi	30%	70%
	Mewujudkan sistem birokrasi yang menerapkan manajemen professional dengan struktur orgnisasi yang tidak tinggi (sentralistik) sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang singkat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	50%	100%
	Peningkatan sistem lembaga pemerintah dan mempertegas	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80%	100%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	tupoksi satuan kerja daerah				
	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	75%	90%
		Program penataan administrasi kependudukan	Meningkatnya penataan adm kependudukan dan catpil	50%	100%
		Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan Publik bidang perizinan dan Non perizinan	50%	90%
	Mewujudkan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna serta efisiensi penggunaan anggaran pembangunan yang terukur secara holistik dan sinergi dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan lintas sektoral	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	100%	100%
	Mewujudkan penegakan supremasi hukum	Program penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	50%	90%
3	Pemberdayaan Ekonomi				
	Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan daerah serta pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Program pengembangan teknologi tepat guna			
		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Peningkatan modal untuk industri teknologi	1 Pkt	1 Pkt
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Terbinanya industri kecil dan menengah		
	Meningkatkan investasi daerah dan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional dan internasional	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya informasi prosedur, regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat	1 keg	1 keg
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya minat investasi yang tercermin pada jumlah permohonan izin investasi	izin	izin
		Program Peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan	20%	70%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	Memberi kemudahan akses modal usaha bagi masyarakat	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Memudahkan akses modal bagi masyarakat		
		Program pengembangan lembaga ekonomi kampung	Meningkatnya kapasitas lembaga kampung	144 Desa	144 Desa
4	Ketahanan Pangan dan kemandirian Pangan				
	Pengembangan potensi budi daya pada indikator ekonomi daerah	Program peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan)	Peningkatan produksi tahunan untuk komoditi Pangan Utama: (ton) 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai	64.000 14.000 108	170.000 60.000 1.358
		Program peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1. Jumlah desa mandiri pangan 2. Jumlah kelompok asyarakat rawanpangan terberdaya 3. Jumlah lumbung pangan masyarakatyang diberdayakan 4. Perluasan areal luas baku lahan sawah 5. Peningkatan fasilitas irigasi tersier(JITUT)	4 desa 77 klp 7 klp 10 km	9 Desa 22 klp 23 klp 30 km
		Program peningkatan produksi peternakan	Peningkatan Populasi ternak pertahun (ekor) - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Ayam Buras - Ayam Ras Petelur - Ayam Ras Pedaging - Itik	5.134 18.379 4.876 428 64.391 411 15.412 41.350	5.700 9.200 4.700 3.200 65.000 530 22.000 44.000

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan hewan dan meningkatnya derajat kesehatan hewan	10 kasus	5 kasus
		Program penanggulangan organisme pengganggu tanaman	Tersedia sarana dan prasarana pengendalian hama	1 keg	1 keg
		Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya keterampilan Petani dan pelaku agribisnis	48 Kali	80 kali
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian/perkebunan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan : (Ton/ha) 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai	4.5 4.6 1.3	6 6 4
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertanian/perkebunan. Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton) 1. Sere Wangi 2. Kakao 3. Kopi 4. Tembakau 5. Kemiri 6. Karet 7. Nilam 8. Jahe 9. Kelapa	975 888 1.118 1.310 4.242 7,5 41 156 79	2.500 1.239 1.394 3.346 4.538 122.5 54 396 185
		Program pemberdayaan penyuluh	Meningkatnya kapasitas penyuluh	118 org	173 org
		Program pengembangan dan peningkatan penyuluhan	Meningkatnya sarana dan prasarana BPP	40%	75%
		Program pemberdayaan petugas	Meningkatkan kapasitas peternak	40%	60%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		dan petani ternak			
		Program peningkatan sumber daya aparatur dan pelaku pertanian	Meningkatnya petugas petani/ ternak		28 org
		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan tanaman rakyat dan non kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat	30%	55%
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya kualitas lingkungan	50%	75%
		Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya kelestarian sumber daya hutan	50%	75%
		Program peningkatan fungsi dan daya dukung das berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS	40%	65%
		Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya targetproduksi budidayaperikanan	4,356 ton	13.000 ton
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Berkembangnya usaha pengolahan ikan	25 klp	300 klp
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Berkembangnya sentra industri potensial daerah		
		Program peningkatan pemasaran hasilproduksi Peternakan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah peternakan (kg)		
			- Sapi	53.603	58.000
			- Kerbau	50.135	58.000
			- Kambing	3.330	5.700
			- Domba	2.329	5.500
			- Ayam Buras	37.443	47.788
			- Ayam Ras Petelur	35.432	45.221
			- Ayam Ras Pedaging	36.644	46.768
			- Itik	40.253	51.374
			- telur	44.461	469.264
	Meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Mengembangkan ekonomi masyarakat	35%	50%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	sektor basis	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	Promosi pariwisata daerah	1 paket	1 paket
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	1. Meningkatnya kualitas dan nilai jual hasil produksi perkebunan 2. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produksi perkebunan	50%	75%
	Pembangunan sarana dan prasarana produksi	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	70%	80%
	Mewujudkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang ekonomi.	100%	100%
		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Adanya peraturan tentang UMKM	1 dok	1 dok
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pengaturan pedagang di pasar	1 keg	1 keg
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan pengelolaan UMK/kop	131	144
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	46 skpk	46 skpk
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya sinergitas program pembangunan antar SPKK	34 keg	34 keg
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pengawasan barang dan jasa		
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Adanya data base produk unggulan	1 dok	1 dok
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan	pasar	pasar
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	131 unit	144 unit

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
5	Infrastruktur Yang Berkelanjutan				
	Mewujudkan infrastruktur yang baik untuk mendorong perekonomian daerah;	Program perencanaan tata ruang	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	100%	100%
		Program pengendalian ruang	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	100%	100%
		Program kerjasama pembangunan	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	100%	100%
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah & besar	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	100%	100%
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kapsitas aparatur perencana	25%	50%
		Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	100%	100%
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas orang dan barang	709 km 1884 m	1126 km 2294 m
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	14 %	83%
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas orang dan barang	709 km 1884 m	458 Km 663 m
		Program sarana prasarana kebinamargaan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	100%
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	100%
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya infrastruktur perdesaan	100%	100%
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya ketersediaan air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah	100%	100%
		Program pengembangan	Terbangunnya rumah layak huni	unit	950 unit

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		perumahan	untuk masyarakat		
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya	Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	30%	55%
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	6000 Ha	6000 Ha
		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	60%	100%
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan perhubungan	60%	100%
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	60%	100%
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	60%	100%
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	80%	50%
		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya akses informasi	60%	100%
		Program fasilitas peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	60%	100%
		Program kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya akses data dan informasi	60%	100%
		Program pengembangan data dan Informasi/statistik Daerah	Meningkatnya akses data dan informasi	60%	100%
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya informasi teknologi kepadamasyarakat	100%	100%
6	Mengurangi Angka Kemiskinan				
	Menurunkan angka kemiskinan	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi	2 keg	2 keg

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya,	Menurunnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	23.38%	17.02%
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,	Meningkatnya pelayanan sosial bagimasyarakat	40%	80%
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma,	Meningkatnya pelayanan untuk penyandang cacat dan trauma	60%	80%
		Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Meningkatnya pelayanan panti asuhan	60%	80%
		Program pembinaan eks.Penyandang penyakit sosial (eks.Narapidana; psk; narkoba dan penyakit sosial lainnya),	Meningkatnya ketrampilan penyandang penyakit sosial	60%	80%
	Menciptakan lapangan kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi pencari kerja	1 blk	1 blk
		Program peningkatan kesempatan kerja	Meningkatkan pelayanan fasilitasi penempatan dengan meperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja	68 org	168 org
7	Meningkatkan Mutu Pendidikan				
	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang cerdas dan terampil.	Program pendidikan non formal	Meningkatnya angka melek huruf penduduk dewasa	87.38%	96.23%
	Standarisasi pendidikan secara optimal bagi peningkatan mutu pendidikan daerah	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60%	85%
		Program manajemen pelayanan pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS	60%	90%
	Memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Program pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan anak usia dini	17%	30%
		Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Meningkatnya angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	99,15% 99,82%	99.31% 99.92%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		Program pendidikan menengah	Meningkatnya APK SMP/MTS/Paket B	100%	100%
	Memasyarakatkan budaya membaca	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca dimasyarakat	30%	75%
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip	Meningkatnya keselamatan dan Kelestarian dokumen/arsip daerah	20%	70%
		Program perbaikan sistem adm kearsipan	Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan	20%	70%
8	Meningkatkan Mutu Kesehatan				
	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sehat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru/RS mata	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	70%	90%
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS paru/RS mata	Meningkatnya pelayanan kesehatan	75%	90%
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/puskesmas/pustu/poskesdes	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	80	95%
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/puskesmas /pustu/ poskesdes	Meningkatnya pelayanan kesehatan	80	95%
		Program peningkatan sumber daya aparatur kesehatan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan	60%	75%
		Program upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasardan rujukan sesuai standar	50%	75%
	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas, kesejahteraan penduduk	Program keluarga berencana	Meningkatnya akseptor KB	50%	88%
		Program kesehatan dan reproduksi remaja	Peningkatan pengetahuan bagi remaja	5 sekolah	15 sekolah

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan asusila	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu	4 org	0
		Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Menurunnya angka kematian balita	14,49/ 1000 KH	9/ 1000 KH
	Meningkatkan status gizi masyarakat	Program perbaikan gizi masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita	0.07%	0
		Program obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianyabuffer stokobat	100%	100%
		Program pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan	100%	100%
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya angka kesakitan masyarakat		20%
		Program pelayanan penduduk miskinrujukan pasien maskin	Terlayani masyarakat JKA/ jamkesmas	100%	100%
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat	25%	50%
		Program pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	25%	50%
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	40%	60%
	Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang sejahtera jasmani dan rohani	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	30%	50%
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	50%	70%
		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kualitas Stadion olahraga	50%	80%
9	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
	Peningkatan kawasan konservasi fokus pada ketersediaan sumber air	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga	Tercapainya masyarakat hemat energi	70%	90%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	dalam mendukung ketersediaan energy terbarukan di daerah	listrikan Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan SDA	11 kec	11 kec
	Melaksanakan eksplorasi hutan non lindung, pemanfaatan bahan galian yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kepastian hukum lokalisasi ekplorasi bahan galian serta hutan secara terpadu	Program pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan	Meningkatnya ijin usaha tambang	70%	90%
	Mengoptimalkan kawasan lindung sebagai pendukung indikator ketersediaan stok carbon daerah sebagai bagian yang terintegrasi dalam pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya informasi lingkungan hidup	1 keg	1 keg
	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan konservasi SDA	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	11 kec	11 kec
	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Melalui Pembangunan Berwawasan lingkungan;	Program pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan	11 kec	11 kec
	Meningkatkan Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup yang Lestari	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan	1 keg	1 keg
		Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	60%	70%
	Mewujudkan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga RTH	60%	80%
	Penataan sistem pemanfaatan hutan dan zonasi fungsi hutan secara berkelanjutan	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Meningkatnya data dan informasi kondisi hutan	50%	80%
		Program pemanfaatan dan	Menurun persentase kerusakan	40%	10%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		pengendalian pengawasan hutan	hutan		
	Peningkatan fasilitas penanganan bencana	Program tanggap darurat penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	2 keg	2 keg
		Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Meningkatnya penanganan pasca bencana	1 keg	1 keg
10	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Seni Budaya				
	Membangun aspirasi masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya sebagai aset dunia tak bergerak	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang sosial budaya	100%	100%
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Terwujudnya Kemitraan Budaya	50%	85%
	Lestarnya adat istiadat dan seni budaya	Program pelestarian adat dan budaya	Meningkatnya kelestarian adat istiadat	35%	50%
	Merancang dan melaksanakan program kegiatan dalam penyelamatan nilai budaya dan adat istiadat	Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	Meningkatnya persentase sarana prasarana kebudayaan yang memadai	32%	50%
		Program pengkajian adat dan adat istiadat	Meningkatnya pemahaman adat dan istiadat	30%	50%
		Program pembinaan dan pengembangan hukum adat	Meningkatnya pengembangan hukum adat	25%	60%
		Program peningkatan kualitas kelembagaan adat	Meningkatnya kapasitas lembaga adat	30%	60%
	Mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang berbudaya	Program pengembangan keserasian kebijakan pemuda;	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pemuda	25%	45%
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya jumlah pemuda yang memperoleh penghargaan	org	org
	Membangun sikap kritis (<i>Prefentive</i>) terhadap nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat sebagai aspek pendukung penggerak utama adat dan budaya Gayo	Program pengembangan nilai budaya	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai Budaya kepada masyarakat	50%	80%
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	25%	50%
		Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 kali	7 kali

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan budaya dan Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata;	Meningkatnya jumlah wisatawan manca negara dan nusantara	8027 org	9000 org
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	25%	60%
11	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				
	Kabupaten Gayo Lues yang aman dan tertib.	Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan			
	Kabupaten Gayo Lues yang tentram dan damai.	Program kemitraan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	30%	70%
	Mengupayakan dan membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Pemberdaan masyarakat untuk menjaga dan keamanan	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	20%	50%
	Terpeliharanya keutuhan bangsa dan Negara	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30%	70%
	Membangun kekuatan masyarakat lokal sebagai satu kesatuan perlindungan masyarakat secara efektif	Program peningkatan keberdayaan masyarakat kampung	Meningkatnya kapasitas masyarakat	45%	70%
		Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah kampung;	Meningkatnya kapasitas aparat desa	144 desa	144 desa
	Memberi kepastian hukum dan keadilan terhadap dukungan proses pendelegasian ke berbagai lini	Program kerjasama antar lembaga	Meningkatnya koordinasi antar lembaga	100%	100%
	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	30%	70%
	Membangun sistem politik berlandaskan moral dan budaya beradab.	Program pemeliharaan konratipmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurun ketegangan dan ancaman konflik	20%	5%
	Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	10%	22%
		Program penanganan Pengaduan/Laporan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tertangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	30%	55%
		Program penguatan kelembagaan	Meningkatnya kapasitas	20%	35%

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja	
				Awal	Akhir
1	2	3	4	5	6
		pengarusutamaan gender dan anak	kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender		
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	20%	70%
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta gender dalam pembangunan	40%	50%

BAB VIII

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPK. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Indikasi Program yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Gayo Lues tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel 8.1**.

Tabel 8.1
Realisasi dan Indikasi Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013-2017

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	satuan	Kondisi Awal RPJM	Realisasi/Target Capaian Tahun Ke										Kondisi Akhir Kinerja RPJM		SKPK Penanggung Jawab
					2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Urusan Wajib					475.915.876.331		609.583.087.696		726.151.645.122		1.046.566.277.654		1.030.843.023.983		3.872.389.423.457	
1.1	PENDIDIKAN					137.211.454.966		145.845.185.976		172.414.885.181		183.654.753.238		210.191.740.858		849.318.020.218	
	Belanja Tidak Langsung					85.605.676.001		82.969.288.582		97.613.549.226		102.862.035.137		118.291.340.407		487.341.889.353	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Belanja Langsung					51.074.484.365		62.178.248.302		74.221.302.821		79.260.796.249		89.938.076.413		356.672.908.150	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.091.060.841	75	2.495.491.537	80	2.009.182.500	85	2.253.132.508	90	2.431.110.825	90	10.279.978.211	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	638.379.500	70	194.450.000	75	64.203.000	80	56.139.000	85	77.685.630	85	1.030.857.130	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	98.845.000	40	56.640.000	45	63.000.000			55	76.230.000	55	294.715.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai budaya kepada masyarakat	%	50	55	109.965.100	60	2.071.142.392	65				75	200.000.000	80	2.381.107.492	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan anak usia dini	%	17	20	51.850.000	23	1.076.314.020	26	3.574.173.194	28	3.137.594.049	30	4.324.749.565	30	12.164.680.828	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	Meningkatnya angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	%	99,15 99,82	99,2 99,84	38.578.544.082	99,23 99,86	24.357.261.371	99,25 99,88	34.843.315.449	99,28 99,90	38.107.414.121	99,31 99,92	42.160.411.693	99,31 99,92	178.046.946.716	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SMA/MA/Paket C	%	80	81,88	8.471.338.542	91	23.501.746.983	92	26.519.220.528	93	21.800.564.606	94	32.088.256.839	94	112.381.127.498	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	25	30	858.000	30	120.175.500	35	120.120.000	40	4.451.185.000	45	145.345.200	45	4.837.683.700	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya angka melek huruf penduduk dewasa	%	87,38	93,91	168.414.500	94,5	102.240.100	95	129.264.100	95,5	1.513.141.000	96,23	156.409.561	96,23	2.069.469.261	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Nilai Adat dan Budaya	Meningkatnya kelestarian adat istiadat	%	35	40	157.046.400	-	-	45	2.060.000.000			50	2.492.600.000	50	4.709.646.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	60	65	1.545.455.400	70	4.441.595.100	75	4.041.502.450	80	7.416.129.000	85	4.890.217.965	85	22.334.899.915	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat	%	30	35	128.565.000	40	175.000.000	45	195.585.200	50	199.000.000	60	236.658.092	60	934.808.292	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS	%	60	70	19.162.000	75	3.495.651.299	80	391.000.000	85	276.810.965	90	473.110.000	90	4.655.734.264	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	4	-	-	4	90.540.000	4	140.736.400	4	49.686.000	4	170.291.044	20	451.253.444	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	100	-	100	15.000.000	100	-	100	15.000.000	100	30.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat pelaksanaan gota-gota ravongga	%	45	50	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	-	-	-	-	80	55.000.000	-	-	-	-	80	55.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Belanja Tidak Langsung					-		104.272.892		119.948.134		443.021.852		487.324.037		1.154.566.915	MPD
	Belanja Langsung					531.294.600		593.376.200		460.085.000		1.088.900.000		1.475.000.000		4.148.655.800	MPD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	304.072.600	75	359.889.200	80	345.216.250	85	768.770.000	90	755.000.000	90	2.532.948.050	MPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	72.502.000	70	200.630.000	75	52.976.500	80	50.000.000	85	60.000.000	85	436.108.500	MPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	36.000.000	40	8.000.000	45	4.200.000			55	113.000.000	55	161.200.000	MPD
	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya angka melek huruf penduduk dewasa	%	87,38	-	-	-	-	-	-	95,5	43.964.000	96,23	180.000.000	96,23	223.964.000	MPD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	60	65	118.720.000	-	-	-	-	80	159.790.000	85	140.000.000	85	418.510.000	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS	%	60	-	-	75	24.857.000	80	57.692.250	85	66.376.000	90	227.000.000	90	375.925.250	MPD
1.2	KESEHATAN					48.134.292.001		76.586.612.265		87.910.151.440		186.452.554.869		170.368.976.036		569.452.586.611	

							14.719.989.236		14.829.159.060		12.395.308.144		17.797.373.008		20.466.978.959		80.208.808.407	Dinas Kesehatan
	Belanja Tidak Langsung						12.630.495.264		24.874.657.714		34.802.224.845		95.782.671.455		106.314.939.850		274.404.989.128	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	2.155.797.500	75	2.313.861.548	80	4.517.760.944	85	1.596.996.100	90	1.756.695.710	90	12.341.111.802	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	594.955.375	70	1.232.058.898	75	4.141.594.840	80	4.306.270.000	85	4.736.897.000	85	15.011.776.113	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	334.650.000	40	199.650.000	45	279.950.000	50	279.950.000	55	338.001.249	55	1.152.251.249	Dinas Kesehatan	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi	%	40	40	108.008.500	45	632.019.500	50	156.207.400	55	675.389.000	60	742.927.900	60	2.314.552.300	Dinas Kesehatan	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya buffer stok obat	%	100	100	1.273.202.000	100	1.870.369.568	100	2.964.014.711	100	17.142.235.000	100	18.856.458.500	100	42.106.279.779	Dinas Kesehatan	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	%	50	55	292.196.500	55	2.335.959.400	65	4.073.415.800	65	4.105.683.500	70	4.516.251.850	70	15.323.507.050	Dinas Kesehatan	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan	%	100	100	156.021.300	100	105.741.500	100	61.622.000	100	61.622.000	100	616.000.000	100	939.384.800	Dinas Kesehatan	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat	%	25	30	119.285.000	35	98.570.000	40	142.026.000	45	493.340.000	50	542.674.000	50	1.395.895.000	Dinas Kesehatan	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita	%	0,07	0,073	430.231.000	0,08	1.203.562.200	0,07	995.540.600	0,06	2.316.132.014	0,05	2.547.745.215	0,05	7.493.211.029	Dinas Kesehatan	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersedianya lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	25	30	76.764.000	35	447.880.000	40	109.226.000	45	2.963.762.000	50	3.260.138.200	50	6.857.770.200	Dinas Kesehatan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kesakitan masyarakat	%	60	60	464.026.000	50	646.836.900	40	1.446.465.800	30	1.091.780.000	20	1.200.958.000	20	4.850.066.700	Dinas Kesehatan	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlayani masyarakat JKA/ jamkesmas	%	100	100	70.078.500	100	98.237.500	100	141.685.000	100	116.000.000	100	127.600.000	100	553.601.000	Dinas Kesehatan	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jajarannya	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	%	80	80	2.702.819.998	85	6.575.122.400	85	7.858.200.950	90	48.654.824.003	95	53.520.306.403	95	119.311.273.754	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya angka kematian bayi	/1000 KH	14,49	13	33.578.000	8,17	324.522.400	7	889.296.600	6	1.118.253.800	5	1.230.079.180	5	3.595.729.980	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu	Orang	4	3	123.844.000	4	912.788.500	3	356.534.800	2	1.453.427.569	1	1.598.770.326	1	4.445.365.195	Dinas Kesehatan	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat	%	100	100	100	5.031.396.400	100	6.500.000.000	100	9.222.514.269	100	10.144.765.696	100	30.898.676.365	Dinas Kesehatan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	53.058.000	-	-	65	25.360.000	70	46.670.000	75	51.337.000	75	176.425.000	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kesehatan Sumberdaya Kesehatan	Meningkatnya kapasitas kesehatan/bidan	%	50	55	57.664.000	60	596.081.000	65	143.323.400	70	479.394.200	75	527.333.620	75	1.803.796.220	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan SDM Bidan		%	na	20	68.147.000	30	250.000.000	-	-	-	-	-	30	318.147.000	Dinas Kesehatan		
	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jamipersal)	Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat	%	100	100	1.330.090.891	-	-	-	-	-	-	-	100	1.330.090.891	Dinas Kesehatan		
	Program Jaminan Kesehatan Aceh	Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat	%	100	100	2.118.783.700	-	-	-	-	-	-	-	100	2.118.783.700	Dinas Kesehatan		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana		%	100	100	67.294.000	-	-	-	-	-	-	-	100	67.294.000	Dinas Kesehatan		
	Belanja Tidak Langsung					7.563.088.443		8.914.729.465		6.928.915.800		8.306.741.937		9.552.753.228		41.266.228.873	Rumah Sakit Umum	
	Belanja Langsung					13.220.719.058		27.968.066.026		33.783.702.651		64.565.768.469		34.034.304.000		173.572.560.204	Rumah Sakit Umum	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	2.493.052.020	75	3.144.116.005	80	3.059.909.650	85	3.153.142.069	90	3.194.304.000	90	15.044.523.744	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	108.225.000	40	119.700.000	45	206.000.000	50	40.000.000	55	300.000.000	55	773.925.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi	%	40	40	96.000.000	45	-	50	1.164.000.000	55	370.000.000	60	1.164.000.000	60	2.794.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	1.324.915.600	70	2.402.612.050	75	968.000.000	80	30.569.454.200	85	1.700.000.000	85	36.964.981.850	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya pelayanan kesehatan	%	70	75	2.909.658.276	80	10.141.054.200	85	11.731.387.000	90	7.212.672.200	95	3.700.000.000	95	35.694.771.676	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya pelayanan kesehatan	%	70	75		80	199.000.000	85	230.000.000	90	370.000.000	95	8.200.000.000	95	8.999.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Program perbaikan gizi masyarakat	Terlayani gizi pasien RSUD	%	100	100	295.200.000	100	345.870.000	100	401.106.000	100	460.000.000	100	500.000.000	100	2.002.176.000	Rumah Sakit Umum	

	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya buffer stok obat	%	100	100	2.204.600.000	100	2.474.922.139	100	3.628.800.000	100	2.192.700.000	100	4.000.000.000	100	14.501.022.139	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	-	-	60	408.282.500	65	300.300.000	70	100.000.000	75	350.000.000	75	1.158.582.500	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Mitra Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat	%	100	-	-	100	120.000.000	100	10.000.000.000	100	16.000.000.000	100	10.000.000.000	100	36.120.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		%	na	-	-	-	-	100	1.990.200.001	-	3.106.800.000	-	-	100	5.097.000.001	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Jaminan Kesehatan (JKA, Jamkesmas, Askes, dan pasien Umum)	Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat	%	100	100	3.686.008.162	100	8.474.013.632	-	-	-	-	-	-	100	12.160.021.794	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program pengadaan peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat		%	na	20	88.060.000	40	138.495.500	55	104.000.000	-	-	-	-	55	395.555.500	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		%	na	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu	Orang								1	626.000.000	1	626.000.000	1	1.252.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan	Terlaksananya pengendalian lingkungan RSUD		dok							1	300.000.000	1	300.000.000		600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1.3	PEKERJAAN UMUM					61.656.954.475		143.873.396.312		150.836.554.213		237.297.785.774		185.172.280.125		778.836.970.899	
	Belanja Tidak Langsung					2.901.711.565		3.033.523.302		2.892.170.526		3.330.660.983		3.663.727.081		15.821.793.457	Dinas Pekerjaan Umum
	Belanja Langsung					44.485.781.349		107.778.231.491		128.429.445.775		187.532.686.274		149.567.665.840		617.793.810.729	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.344.946.485	75	2.069.796.636	80	1.889.355.800	85	1.578.958.400	90	2.353.295.635	90	9.236.352.956	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	3.897.519.005	70	2.494.332.865	75	5.034.662.800	80	11.526.696.000	85	5.684.907.080	85	28.638.117.750	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	94.375.000	40	74.500.000	45	119.400.000			55	418.880.000	55	707.155.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	35.863.000	60	-	65	-			75	65.000.000	80	100.863.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas orang dan barang	Km	709,31	17	17.933.271.311	26,4	46.318.939.550	28,5	14.262.082.000	22,8	8.164.631.776	25	37.114.000.000	25	123.792.924.637	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas orang dan barang	Km Unit	709,31 5	48,7 8	8.544.321.527	45,3 13	23.897.047.300	53 5	56.753.807.500	60 5	101.813.896.388	60 5	44.999.000.000	60 5	236.008.072.715	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas orang dan barang	%	100	100	4.707.125.000	55,97	3.240.785.550	100	4.179.205.700	100	2.069.145.950	100	4.461.368.100	100	18.657.630.300	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Sarana dan Prasarana Kebinarmaraan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	%	100	100	1.093.253.083	100	777.959.800	100	888.065.500	100	659.833.800	100	720.738.701	100	4.139.850.884	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	7.896.000	70	21.552.640	80	12.132.500			100	16.200.000	100	57.781.140	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	%	100	100	2.650.349.000	100	3.365.561.450	100	12.607.960.800	100	29.419.606.460	100	15.006.200.000	100	63.049.677.710	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya informasi teknologi kepada masyarakat	%	100	100	-	100	-	100	-	100	25.000.000	100	35.000.000	100	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya sistem informasi data jalan	Tahun	1	1	203.474.000	1	-	1	-		1	250.000.000	1	453.474.000	Dinas Pekerjaan Umum	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	%	14	17	-	23	1.818.306.000	20	1.108.665.000	20	2.951.790.000	20	3.217.500.000	20	9.096.261.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	%	60	60	2.374.098.438	65	3.060.122.100	65	2.896.710.200	70	2.962.491.900	70	3.293.070.900	70	14.586.493.538	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga RTH	%	60	65	-	70	-	75	-			80	605.000.000	80	605.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	-	75	1.876.504.900	80	4.632.468.300	80	4.151.706.600	85	8.800.000.000	90	19.460.679.800	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat	%	5	8,82	1.249.635.500	41,18	10.352.370.500	29	3.618.098.400	24	4.198.835.000	25	3.727.455.424	25	23.146.394.824	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya ketersediaan air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah	%	100	100	-	100	4.935.804.900	100	11.310.661.975	100	8.481.377.000	100	9.809.750.000	100	34.537.593.875	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat	%	100	100	-	100	3.367.157.500	100	404.166.000	100	599.500.000	100	220.000.000	100	4.590.823.500	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	15.074.000	100	64.729.900	100	-			100	15.300.000	100	95.103.900	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya rumah layak huni	Unit	150	51	-	100	42.759.900	100	8.660.828.300	150	8.929.217.000	150	8.755.000.000	701	26.387.805.200	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	50	55	-	60	-	70	51.175.000			90	-	90	51.175.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya Perencanaan Pengembangan dan pengelolaan Air	%	na	100	136.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	136.772.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya perencanaan pengembangan kota	%	na	100	49.132.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	49.132.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan	%	na	100	83.676.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	83.676.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatnya infrastruktur perdesaan	%	na	100	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	65.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Belanja Tidak Langsung					1.464.442.056		1.746.984.037		1.724.267.904		2.018.988.367		2.220.887.204		9.175.569.568	Dinas Pengairan
	Belanja Langsung					12.805.019.505		31.314.657.482		17.790.670.008		44.415.450.150		29.720.000.000		136.045.797.145	Dinas Pengairan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.024.392.587	75	1.280.749.282	80	1.442.852.050	85	1.087.987.950	90	1.245.000.000	90	6.080.981.869	Dinas Pengairan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	458.057.400	70	4.696.295.800	75	1.156.087.450	80	346.490.000	85	2.100.000.000	85	8.756.930.650	Dinas Pengairan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	37.500.000	40	30.300.000	45	73.779.900			55	35.000.000	55	176.579.900	Dinas Pengairan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	56.683.900	70	46.351.100	80	15.022.000			100	50.000.000	100	168.057.000	Dinas Pengairan
	Program Pendataan, Perencanaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	tersedianya dokumen perencanaan pengawasan dan monitoring pengairan	Dok	1	-	-	-	-	1	472.761.400	1	489.847.000	1	1.970.000.000	4	2.932.608.400	Dinas Pengairan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	Ha	6000	6000	6.297.644.618	6000	22.481.352.500	6000	12.706.994.808	6000	22.745.660.000	6000	18.190.000.000	6000	82.421.651.926	Dinas Pengairan
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	Ha	6000	6000	-	6000	-	6000	1.923.172.400	-	-	6000	6.130.000.000	6000	8.053.172.400	Dinas Pengairan
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Meningkatnya infrastruktur pengairan	%	na	50	4.930.741.000	75	2.779.608.800							75	7.710.349.800	Dinas Pengairan
	Program Operasional dan pemeliharaan Irigasi dan P3A											13.787.795.200		13.787.795.200		27.575.590.400	Dinas Pengairan
	Program Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pengendalian Banjir, Turap/Talud/Bronjong, Pengembangan											5.957.670.000		5.957.670.000		11.915.340.000	Dinas Pengairan
1.4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					5.730.517.878		6.721.414.859		13.577.185.159		9.147.299.644		17.580.101.708		52.756.519.248	
	Belanja Tidak Langsung					1.701.974.832		1.539.465.159		1.426.122.159		2.762.610.644		3.038.871.708		10.469.044.502	Bappeda
	Belanja Langsung					4.028.543.046		5.181.949.700		12.151.063.000		6.384.689.000		14.541.230.000		42.287.474.746	Bappeda
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	620.728.883	75	873.042.816	80	891.775.000	85	1.149.400.000	90	1.237.230.000	90	4.772.176.699	Bappeda
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	230.151.663	70	334.540.700	75	203.585.000	80	1.194.500.000	85	430.000.000	85	2.392.777.363	Bappeda
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	45.700.000	40	28.800.000	45	71.400.000			55	80.000.000	55	225.900.000	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	77.044.800	60	39.882.300	65	50.000.000	70	70.000.000	75	50.000.000	75	286.927.100	Bappeda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	32.796.000	70	53.203.800	80	32.807.000			100	95.000.000	100	213.806.800	Bappeda
	Program Rencana Tata Ruang	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	%	100	100	330.507.000	100	148.700.000	100	5.504.555.000			100	5.000.000.000	100	10.983.762.000	Bappeda
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	100	427.305.000	100	1.718.497.734	100	3.193.417.000	100	1.329.097.000	100	1.500.000.000	100	8.168.316.734	Bappeda
	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	298.815.400	100	176.380.000	100	185.225.000	100	179.705.000	100	180.000.000	100	1.020.125.400	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	180.525.000	100	-	100	93.480.000	100	79.525.000	100	100.000.000	100	453.530.000	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana	%	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	600.000.000	50	600.000.000	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	1.055.861.000	100	890.343.296	100	1.340.569.000	100	1.876.067.000	100	3.019.000.000	100	8.181.840.296	Bappeda

	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang ekonomi	%	100	100	454.141.300	100	605.823.554	100	498.200.000			100	1.500.000.000	100	3.058.164.854	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang sosial dan budaya	%	100	100	-	100	93.705.500	100	86.050.000	100	318.360.000	100	150.000.000	100	648.115.500	Bappeda
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya keragaman budaya	na	100		15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Bappeda	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya administrasi laporan pengelolaan keuangan	%	na	60	249.967.000	100	219.030.000	-	-	-	-	-	-	100	468.997.000	Bappeda
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	na	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	Bappeda
	Program Pengendalian Ruang	Persentase pemanfaatan ruang/lahan sesuai dengan	%	na	-	-	-	-	-	100	188.035.000	100	600.000.000	100	788.035.000	Bappeda	
1.5	PERHUBUNGAN					5.210.464.299		7.047.828.656		6.852.639.000		8.406.525.081		14.685.850.589		42.203.307.625	
	Belanja Tidak Langsung					1.387.901.015		1.435.445.601		1.311.236.850		1.626.225.081		1.788.847.589		7.549.656.136	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Belanja Langsung					3.822.563.284		5.612.383.055		5.541.402.150		6.780.300.000		12.897.003.000		34.653.651.489	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.296.872.824	75	830.495.405	80	927.585.650	85	1.060.287.147	90	1.421.000.000	90	5.536.241.026	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	1.893.572.000	70	1.965.980.050	75	2.328.247.000	80	1.508.412.853	85	1.436.001.500	85	9.132.213.403	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	90.407.000	40	100.230.000	45	74.600.000			55	100.000.000	55	365.237.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	29.479.660	70	10.575.000	80	-			100	61.000.000	100	101.054.660	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	%	60	60	16.270.000	70	108.089.000	80	39.800.000	90	1.000.000.000	100	350.001.500	100	1.514.160.500	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan perhubungan	%	60	60	-	70	-	80	500.000.000			100	200.000.000	100	700.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	%	60	60	67.166.000	70	271.965.000	80	304.296.500	90	180.000.000	100	695.000.000	100	1.518.427.500	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	-	75	-	80	99.000.000			85	6.000.000.000	90	6.099.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Meningkatnya akses informasi	%	60	60	52.880.000	70	776.489.000	80	15.000.000			100	45.000.000	100	889.369.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	80	75	375.915.800	70	1.548.559.600	65	1.252.873.000	60	746.130.000	55	2.589.000.000	55	6.512.478.400	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersediannya sarana dan prasarana perhubungan	%								60	2.285.470.000	65	2.285.470.000	65	4.570.940.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
1.6	LINGKUNGAN HIDUP					3.021.874.000		7.947.063.439		3.452.582.593		4.483.777.855		5.065.559.641		23.970.857.528	
	Belanja Tidak Langsung							496.797.609		467.048.448		631.417.855		694.559.641		2.289.823.553	Kantor Lingkungan
	Belanja Langsung					3.021.874.000		7.450.265.830		2.985.534.145		3.852.360.000		4.371.000.000		21.681.033.975	Kantor Lingkungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	260.217.500	75	396.458.540	80	601.320.628	85	440.361.586	90	803.000.000	90	2.501.358.254	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	-	-	-	75	30.000.000	80	195.746.781	85	360.000.000	85	585.746.781	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	44.815.000	40	-	45	93.510.808			55	143.000.000	55	281.325.808	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	56.690.000	100	42.000.000	-	-			100	75.000.000	100	173.690.000	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	%	60	60	-	65	101.646.640	-	-	70	182.574.000	75	114.000.000	75	398.220.640	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan	Kec	11	11	450.500.000	11	851.335.000	11	198.997.832			11	1.121.000.000	11	2.621.832.832	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	Kec	11	11	1.689.243.000	11	4.193.565.720	11	1.809.616.842	11	2.137.584.038	11	1.300.000.000	11	11.130.009.600	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi lingkungan hidup	keg	1	1	88.092.500	1	116.557.720	1	100.103.055	1	221.608.863	1	410.000.000	5	936.362.138	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga RTH	%	60	65	432.316.000	70	1.748.702.210	75	151.984.980			85	45.000.000	85	2.378.003.190	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan	Kes								11	674.484.732	11	674.484.732		1.348.969.464	Kantor Lingkungan Hidup
1.7	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					3.005.248.906	2.783.062.310	2.839.887.886	3.288.215.744	3.172.223.418				15.088.638.264			
	Belanja Tidak Langsung					946.326.652	972.026.750	1.025.655.386	976.566.744	1.074.223.418				4.994.798.950			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Belanja Langsung					2.058.922.254	1.811.035.560	1.814.232.500	2.311.649.000	2.098.000.000				10.093.839.314			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	745.903.254	75	621.605.376	80	722.237.350	85	703.040.400	90	799.000.000	90	3.591.786.380	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	149.995.500	70	290.120.000	75	348.500.000	80	563.430.000	85	200.000.000	85	1.552.045.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	-	-	60	204.472.900	-	-	-	-	75	100.000.000	75	304.472.900	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	27.000.000	40	21.000.000	45	42.000.000	-	-	55	35.000.000	55	125.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Perencanaan tata Ruang	Tersedanya rencana tata ruang	%	na	100	197.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	197.715.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data perencanaan	%	na	-	-	-	-	50	15.000.000	-	-	100	15.000.000	100	30.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan adm kependudukan dan catbil	%	50	50	938.308.500	50,11	673.837.284	60	686.495.150	70	1.045.178.600	75	939.000.000	75	4.282.819.534	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.019.176.456	4.500.189.506	5.291.211.698	7.068.055.338	7.825.360.872				28.703.993.870			
	Belanja Tidak Langsung					1.115.881.006	1.174.312.293	1.100.659.698	1.314.025.338	1.445.427.872				6.150.306.207			Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Belanja Langsung					2.903.295.450	3.325.877.213	4.190.552.000	5.754.030.000	6.379.933.000				22.553.687.663			Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	477.475.350	75	700.870.713	80	574.101.491	85	669.021.000	90	735.923.100	90	3.157.391.654	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	1.362.212.000	70	758.157.600	75	1.543.743.409	80	3.616.856.000	85	3.978.541.600	85	11.259.510.609	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	19.600.000	40	35.650.000	45	23.800.000	-	-	55	27.500.000	55	106.550.000	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	%	20	30	173.008.100	35	247.102.500	40	134.667.800	50	101.355.000	60	111.490.500	60	767.623.900	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera	Meningkatnya akseptor KB	%	50	90	360.835.300	91,7	735.490.500	92	582.453.300	92,5	777.890.000	93	855.679.000	93	3.312.348.100	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja	Peningkatan pengetahuan bagi remaja	Sekolah	5	5	43.877.000	6	47.334.500	30	312.987.000	30	150.000.000	35	165.000.000	111	719.198.500	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	-	-	70	13.728.900	-	-	-	-	100	8.000.000	100	21.728.900	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	%	20	-	-	30	87.945.000	30	583.889.000	34	93.235.000	40	102.558.500	40	867.627.500	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	Tertangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0	80	298.748.400	80	291.626.000	100	284.910.000	-	145.673.000	100	160.240.300	100	1.181.197.700	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	100	24.827.000	-	-	-	-	100	15.000.000	100	39.827.000	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kependudukan

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	-	-	100	77.051.500	-	-	-	-	-	100	77.051.500	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung	%	na	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	%	na	100	68.750.000	-	-	-	-	-	-	-	100	68.750.000	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta gender dalam	%	40	40	68.789.300	40	306.093.000	45	150.000.000	45	200.000.000	50	220.000.000	50	944.882.300	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
1.9	SOSIAL					3.743.462.960		4.329.416.450		3.919.308.806		6.391.104.267		7.329.130.060		25.712.422.543	
	Belanja Tidak Langsung					1.354.737.798		1.288.328.434		1.412.318.353		1.476.595.065		1.624.254.572		7.156.234.222	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Belanja Langsung					2.388.725.162		3.041.088.016		2.506.990.453		4.914.509.202		5.704.875.488		18.556.188.321	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	407.147.042	75	793.714.255	80	641.064.065	85	826.600.088	90	909.260.097	90	3.577.785.547	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	18.852.000	70	35.980.000	75	335.510.500	80	651.830.000	85	717.013.000	85	1.759.185.500	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	24.069.520	40	-	45	23.700.000	-	-	55	28.677.000	55	76.446.520	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	32.648.000	70	111.964.011	80	49.940.798	-	-	100	60.428.366	100	254.981.175	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Menurunnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	23,38	22,33	670.670.000	-	-	-	-	-	-	R	-	22,33	670.670.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat	%	40	45	178.872.000	50	77.425.000	60	397.671.250	70	768.649.114	80	845.514.025	80	2.268.131.389	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Meningkatnya pelayanan panti asuhan	%	60	60	191.625.000	65	136.275.000	0	161.000.000	-	-	80	194.810.000	80	683.710.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penvakit Sosial Lainnya)	Jumlah PMKS yang dibantu	PMKS	1233	500	690.940.600	522	91.240.000	1000	99.258.000	1000	78.380.000	1000	86.218.000	5.255	1.046.036.600	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi pencari	BLK	1	-	-	1	1.651.139.750	1	639.510.840	1	2.447.300.000	1	2.692.030.000	1	7.429.980.590	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan wilayah Transmigrasi	Keg	1	1	75.925.000	1	143.350.000	1	148.575.000	1	141.750.000	1	155.925.000	6	665.525.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	10.760.000	-	-	100	15.000.000	100	25.760.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terbinanya para penyandang cacat dan trauma	%	na	100	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terbangunnya infrastruktur dasar kampung	%	na	100	97.851.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97.851.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
1.10	PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM					7.915.185.852		10.639.388.934		10.727.715.274		15.779.740.834		20.213.138.917		65.275.169.811	
	Belanja Tidak Langsung					1.402.711.380		1.380.277.321		1.314.691.674		1.305.580.834		1.436.138.917		6.839.400.126	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Belanja Langsung					6.512.474.472		9.259.111.613		9.413.023.600		14.474.160.000		18.777.000.000		58.435.769.685	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.105.220.472	75	1.533.304.423	80	1.609.353.600	85	1.569.413.500	90	1.094.000.000	90	6.911.291.995	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	40.800.000	-	-	45	197.100.000	-	-	-	-	45	237.900.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	341.722.000	70	357.330.283	75	60.000.000	80	663.953.000	85	448.000.000	85	1.871.005.283	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	36.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	55	36.500.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	10.000.000	-	-	-	-	-	-	100	172.000.000	100	182.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM

	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tersedianya fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	UKM	986	200	2.599.664.000	4.357	3.553.610.207	4.400	1.818.283.000	4.500	3.686.778.000	4.600	1.959.000.000	4.600	13.617.335.207	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan pengelolaan UMK/kop	Kop	37	135	317.800.000	141	-	141	1.370.558.000	141	322.877.000	141	802.000.000	141	2.813.235.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Unit	37	29	108.514.000	55	200.000.000	-	-	-	-	141	1.276.000.000	141	1.584.514.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya pengawasan barang dan jasa	%	100	100	218.334.000	100	343.000.000	100	220.744.000	100	1.000.524.000	100	536.000.000	100	2.318.602.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan	Pengaturan pedagang di pasar	keg	1	1	995.192.000	-	-	-	-	1	319.180.000	1	4.171.000.000	1	5.485.372.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing	IKM		50	32.200.000	-	-	70	1.094.500.000	90	2.135.860.000	105	1.109.000.000	105	4.371.560.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya industri potensial yang memiliki daya unkit tinggi	kec	11		227.353.000	-	-	11	542.485.000		11	210.000.000	11	979.838.000	Dinas Perindustrian Perdagangan	
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Meningkatnya infrastruktur dasar kampung	%	na	-	-	100	390.202.000	-	-	-	-	-	-	100	390.202.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	479.175.000	75	2.881.664.700	80	2.500.000.000			85	7.000.000.000	85	12.860.839.700	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil											118.618.000		118.618.000		237.236.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri											656.956.500		656.956.500		1.313.913.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan											4.000.000.000		4.000.000.000		8.000.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
1.11	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					3.528.083.423		10.815.636.302		24.579.224.617		8.064.348.229		14.393.572.332		61.380.864.903	
	Belanja Tidak Langsung					834.709.521		920.387.302		794.315.997		1.183.995.429		1.302.394.972		5.035.803.221	Dinas Pemuda Dan
	Belanja Langsung					2.693.373.902		9.895.249.000		23.784.908.620		6.880.352.800		13.091.177.360		56.345.061.682	Dinas Pemuda Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	676.139.000	75	819.603.000	80	565.049.660	85	739.895.500	90	683.710.089	90	3.484.397.249	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	336.800.000	70	35.000.000	75	48.676.000	80	93.995.000	85	58.897.960	85	573.368.960	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	22.500.000	40	16.200.000	45	39.200.000			55	47.432.000	55	125.332.000	Dinas Pemuda Dan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	-	-	70	9.600.000	80	2.000.000			100	2.420.000	100	14.020.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi		5	393.760.000	6	1.237.300.000	6	939.286.960	6	987.148.000	6	1.136.537.222	6	4.694.032.182	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga	Jumlah organisasi dan club Olah raga yang dibina	Club		50	783.494.902	66	1.160.488.000	70	1.774.529.000	70	1.452.614.300	70	2.147.180.090	70	7.318.306.292	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	-	-	75	157.928.000	80	6.092.000.000	-	991.600.000	85	9.000.000.000	85	16.241.528.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	100		100	14.514.000	-	-	100	15.000.000	100	29.514.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	Meningkatnya kualitas Stadion olahraga	%	50	55	480.680.000	60	6.459.130.000	65	14.309.653.000	70	2.615.100.000	-	-	70	23.864.563.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
1.12	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					7.793.178.167		10.903.546.796		12.598.160.794		12.596.544.300		17.706.965.430		61.598.395.487	
	Belanja Tidak Langsung					974.172.717		1.039.000.271		989.981.418		1.214.050.856		1.335.455.942		5.552.661.204	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Belanja Langsung					1.927.507.229		4.381.687.704		1.442.508.060		1.981.000.000		6.550.000.000		16.282.702.993	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	633.030.607	75	622.470.759	80	593.260.660	85	728.365.500	90	857.000.000	90	3.434.127.526	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	98.374.250	70	54.937.045	75	47.500.000	80	105.489.000	85	333.000.000	85	639.300.295	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	48.730.872	40	32.797.000	45	17.500.000			55	35.000.000	55	134.027.872	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	41.180.000	-	-	-	-	-	-	75	53.000.000	75	94.180.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	%	30	-	-	-	-	50	211.652.300			70	1.416.000.000	70	1.627.652.300	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan

	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	%	30	35	298.278.000	40	261.982.000	50		60	483.308.500	70	495.000.000	70	1.538.568.500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	%	20	25	-	-	-	35	90.332.800			45	550.000.000	45	640.332.800	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurun ketegangan dan ancaman konflik	%	20	20	249.175.000	25	277.148.400	25	170.058.100	25	291.821.000	25	1.153.000.000	25	2.141.202.500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	%	30	35	295.868.000	40	98.254.000	40	105.777.950	40	152.106.000	40	805.000.000	40	1.457.005.950	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya kenyamanan di lingkungan	%	30	35	262.870.500	35	2.073.909.600	40	191.426.250	45	219.910.000	50	838.000.000	50	3.586.116.350	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah	%	na	-	-	100	960.188.900	-	-	-	-	-	-	100	960.188.900	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	15.000.000	-	-	100	15.000.000	100	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
	Belanja Tidak Langsung					3.259.543.141		4.324.502.321		1.053.206.116		1.473.190.444		1.620.509.488		11.730.951.510	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Belanja Langsung					1.631.955.080		1.158.356.500		9.112.465.200		7.928.303.000		8.201.000.000		28.032.079.780	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	346.438.080	75	310.758.100	80	423.724.050	85	450.339.000	90	790.000.000	90	2.321.259.230	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	180.580.000	70	178.948.000	75	2.475.215.400	80	2.488.832.500	85	426.000.000	85	5.749.575.900	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	449.440.000	40	217.286.000	45	372.240.000	-	-	55	400.000.000	55	1.438.966.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	300.000.000	60	-	65	60.000.000	70	118.000.000	75	515.000.000	75	993.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Pengaturan pedagang di pasar	keg	1	1	153.600.000	1	176.145.000	1	312.998.000	1	130.800.000	1	200.000.000	1	973.543.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Penegakkan Kebijakan Pelaksanaan Syariah Islam	Berkurangnya penyakit masyarakat	%	70	65	201.897.000	50	119.619.400	40	593.766.800	50	215.855.000	40	260.000.000	40	1.391.138.200	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Penegakkan Kebijakan Daerah	Meningkat Disiplin Aparatur	%	40	-	-	45	155.600.000	50	133.795.950	-	95.570.950	55	250.000.000	55	634.966.900	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Menurunnya penyakit sosial masyarakat	%	na	-	-	-	-	-	-	-	-	70	200.000.000	70	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Koordinasi antar Lembaga	Meningkatnya koordinasi kedinasan	%	na	-	-	-	-	-	100	-	50.605.550	-	-	100	50.605.550	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya kenyamanan di lingkungan	%	30	-	-	-	-	40	4.740.725.000	-	4.378.300.000	50	5.160.000.000	50	14.279.025.000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan
1.13	OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					174.913.109.979		163.061.789.682		218.798.350.497		350.004.711.336		340.043.914.455		1.246.821.875.949	
	Belanja Tidak Langsung					329.908.798		386.784.377		457.823.294		460.031.491		329.908.798		1.964.456.758	KDH/WKDH
	Belanja Tidak Langsung					7.976.511.440		7.870.911.390		7.261.062.095		10.872.860.467		11.960.146.514		45.941.491.906	Sekretariat Daerah
	Belanja Langsung					24.316.972.733		20.920.486.027		40.807.607.875		38.138.579.460		31.131.359.029		155.315.005.124	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	6.698.049.385	75	7.728.982.230	80	7.019.791.685	85	9.686.278.725	90	7.493.947.939	90	38.627.049.964	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	10.238.223.908	70	5.575.363.762	75	22.329.098.000	80	12.316.263.240	85	5.018.208.580	55	55.477.157.490	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	181.770.000	40	145.600.600	45	364.030.000	50	120.000.000	55	440.476.300	55	1.251.876.900	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	424.064.110	60	484.807.850	65	1.093.720.690	70	726.715.010	75	1.323.402.035	80	4.052.709.695	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	80.060.000	70	78.285.000	80	81.250.750	90	262.619.000	100	98.313.408	100	600.528.158	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	%	80	85	2.098.114.340	85	2.338.658.735	90	3.955.901.000	95	3.416.719.085	100	4.786.640.210	100	16.596.033.370	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	100	142.551.000	100	136.969.500	100	35.875.000	100	238.409.000	100	43.408.750	100	597.213.250	Sekretariat Daerah
	Program Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya informasi teknologi kepada masyarakat	%	100	100	416.664.500	100	556.207.126	100	796.195.000	100	617.950.000	100	963.395.950	100	3.350.412.576	Sekretariat Daerah
	Program Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	%	23,38	22,33	421.924.800	24	462.600.000	23	482.440.750			21	583.753.308	21	1.950.718.858	Sekretariat Daerah

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya informasi prosedur, regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat	Keg	1	1	99.815.600	1	61.945.000	-	-	-	106.735.000	-	-	1	268.495.600	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat pelaksanaan gotong royong	%	45	50	446.713.000	50	100.096.000	-	-	-	-	-	-	50	546.809.000	Sekretariat Daerah
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Pengawasan barang dan jasa	keg	na	-	-	-	-	1	55.559.250	1	630.649.500	1	67.226.693	1	753.435.443	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	85	1.243.523.050	85	1.243.523.050	Sekretariat Daerah
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Meningkatnya akses informasi	%	60	60	258.600.000	70	251.400.000	80	373.097.000	90	679.889.000	100	451.447.370	100	2.014.433.370	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	50	55	527.183.000	60	727.702.180	70	1.225.961.750	80	1.597.727.500	90	1.483.413.718	90	5.561.988.148	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Tersedia pelayanan hukum	%	na	-	-	-	-	60	282.370.000	70	151.700.000	80	341.667.700	80	775.737.700	Sekretariat Daerah
	Program Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman Syariat Islam	kec	11	11	695.334.500	11	462.810.000	11	728.640.000			11	881.654.400	11	2.768.438.900	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	639.449.000	100	580.273.500	100	847.904.000	100	831.293.900	100	1.025.963.840	100	3.924.884.240	Sekretariat Daerah
	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya Koordinasi Pendidikan daerah	%	100	-	-	100	79.936.750	-	-	-	-	-	-	100	79.936.750	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	Meningkatnya koordinasi kedinasaan kecamatan	%	100	-	-	100	48.886.000	-	-	-	-	-	-	100	48.886.000	Sekretariat Daerah
	Program Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya koordinasi kelembagaan	%	100	100	60.122.090	-	-	-	-	-	57.539.000	-	-	100	117.661.090	Sekretariat Daerah
	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah	%	100	100	140.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	140.450.000	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya keterbukaan informasi daerah	%	100	100	620.445.000	100	968.033.794	100	1.027.705.000	-	1.259.336.000	-	-	100	3.875.519.794	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	40	45	127.438.500	45	131.928.000	50	108.068.000	55	684.602.000	60	130.762.280	60	1.182.798.780	Sekretariat Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi											368.197.000	368.197.000			736.394.000	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru											2.147.521.500	2.147.521.500			4.295.043.000	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah											34.640.000	34.640.000			69.280.000	Sekretariat Daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan											1.057.631.000	1.057.631.000			2.115.262.000	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											209.785.000	209.785.000			419.570.000	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya											714.915.000	714.915.000			1.429.830.000	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kinerja Pelayanan											221.464.000	221.464.000			442.928.000	Sekretariat Daerah
	Belanja Tidak Langsung					6.063.596.500		6.079.834.178		6.075.237.910		6.777.405.218		16.483.314.274		41.479.388.080	Sekretariat Dewan
	Belanja Langsung					9.748.137.154		6.640.091.637		12.500.236.500		17.427.820.000		10.044.298.150		56.360.583.441	Sekretariat Dewan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	2.153.525.794	75	2.806.623.922	80	2.958.349.450	85	3.844.973.780	90	3.041.010.350	90	14.804.483.296	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	2.927.100.400	70	591.816.976	75	4.314.134.200	80	6.603.790.000	85	1.018.200.000	85	15.455.041.576	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	570.625.000	40	316.975.000	45	329.200.000	50	211.450.000	55	400.000.000	55	1.828.250.000	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	76.461.000	60	142.674.200	65	160.000.000	70	267.000.000	75	160.000.000	75	806.135.200	Sekretariat Dewan
	Program Peningkatan Kapasitas dewan Perwakilan Rakyat	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat	%	80	85	4.020.424.960	90	2.782.001.539	90	4.738.552.850	95	6.500.606.220	100	5.425.087.800	100	23.466.673.369	Sekretariat Dewan
	Belanja Tidak Langsung					54.993.472.704		61.725.336.901		81.746.249.517		189.935.833.456		179.522.422.170		567.923.314.748	PPKD
	Belanja Langsung					453.024		12.030.000.000		12.030.000.000		12.030.000.000		12.030.000.000		12.030.453.024	PPKD
	Belanja Tidak Langsung					7.770.974.982		9.582.334.175		12.731.408.350		14.532.092.163		1.453.209.216		46.070.018.886	DPKD
	Belanja Langsung					19.971.232.636		12.665.230.680		13.101.855.972		15.232.181.408		18.249.651.571		79.220.152.267	DPKD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	1.671.620.253	75	2.614.400.788	80	2.565.709.004	85	2.841.830.410	90	3.999.208.649	90	13.692.769.104	DPKD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	1.901.392.500	70	1.394.931.452	75	2.660.383.125	80	1.319.223.245	85	680.103.105	85	7.956.033.427	DPKD

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	89.000.000	40	80.050.000	45	157.850.000		55	514.391.625	55	841.291.625	DPKD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	32.250.000	70	10.000.000	80	10.000.000		100	47.217.225	100	99.467.225	DPKD
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	8.854.990.250	75	4.120.259.900	80	2.086.681.100	80	85	2.862.886.636	85	21.275.831.986	DPKD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	SKPK	46	46	7.326.566.133	46	4.426.942.270	46	5.321.020.743	46	46	7.030.282.330	46	31.285.682.829	DPKD
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	-	-	-	-	100	15.000.000	-	-	-	100	15.000.000	DPKD
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	50	55	95.413.500	60	18.646.270	70	285.212.000	-	90	3.115.562.002	90	3.680.436.072	DPKD
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Kpg						144		373.640.000	14	373.640.000	144	747.280.000
	Belanja Tidak Langsung					630.625.537		675.031.719		639.961.848			1.353.717.145		3.434.707.964	KPPTSP
	Belanja Langsung					2.619.988.000		724.125.350		449.976.400			2.043.796.500		6.884.857.694	KPPTSP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	342.998.000	75	363.744.750	80	345.662.250	85	90	418.251.323	90	2.102.186.683	KPPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	1.135.790.000	70	261.010.000	-	-	80	85	302.500.000	85	2.713.922.000	KPPTSP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	13.800.000	40	12.600.000	45	14.300.000		55	17.303.000	55	58.003.000	KPPTSP
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	50	-	-	-	-	70	16.623.950	-	90	20.114.980	90	36.738.930	KPPTSP
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya minat investasi yang tercernin pada jumlah permohonan izin investasi	%	20	30	15.000.000	40	86.770.600	50	73.390.200	60	70	288.802.142	70	765.487.482	KPPTSP
	Program Peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan	%	20	-	-	-	-	-	60		-	-	60	18.519.600	KPPTSP
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	1.112.400.000	-	-	-	-	-	-	-	75	1.112.400.000	KPPTSP
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi											77.600.000		77.600.000		155.200.000
	Belanja Tidak Langsung					2.200.703.168		3.027.936.200		3.916.564.922			4.522.422.518		18.642.291.578	Inspektorat
	Belanja Langsung					2.213.279.362		1.878.444.567		3.036.617.848			2.700.000.000		13.414.591.777	Inspektorat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	704.699.362	75	703.724.367	80	914.020.000	85	90	930.000.000	90	4.063.215.479	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	197.960.000	70	87.380.200	75	350.511.303	80	85	158.250.000	85	926.969.753	Inspektorat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	25.800.000	40	20.250.000	45	56.100.000	50	55	300.000.000	55	402.150.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	15.000.000	70	15.000.000	-	-	-	100	48.000.000	100	78.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Menurunnya Penyelewengan Keuangan Daerah dan Mencegah teradinya KKN	%	50	40	1.121.220.000	30	904.790.000	20	1.715.986.545	10	5	1.850.000.000	5	7.239.276.545	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan	%	50	60	75.000.000	60	147.300.000	-	-	80	90	300.000.000	90	631.380.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur daerah	%	100	100	58.600.000	-	-	-	-	-	-	-	100	58.600.000	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan	%	100	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Inspektorat
	Belanja Tidak Langsung					1.290.541.392		1.064.729.097		971.714.826			1.181.830.027		5.808.828.372	Dinas Syari'at Islam
	Belanja Langsung					3.958.326.520		1.779.404.223		4.071.649.000			3.467.700.000		16.247.079.743	Dinas Syari'at Islam
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	660.585.520	75	490.672.023	80	569.852.000	85	90	640.000.000	90	3.056.394.543	Dinas Syari'at Islam
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	109.800.000	70	87.999.900	75	308.600.000	80	85	375.000.000	85	965.543.900	Dinas Syari'at Islam
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	25.600.000	40	18.000.000	45	31.000.000		55	20.000.000	55	94.600.000	Dinas Syari'at Islam

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa bersvari'at	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam desa bersvari'at	Kampung	144	144	204.052.000	144	175.867.000	145	255.055.000	145	179.210.000	145	265.000.000	145	1.079.184.000	Dinas Syari'at Islam
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Agama Islam	terlaksananya MTQ kec, kab dan prov	kali	3	3	1.036.800.000	3	403.608.000	3	699.458.000	3	573.796.000	3	600.000.000	3	3.313.662.000	Dinas Syari'at Islam
Program Penegakan Kebijakan Pelaksanaan Syari'at Islam	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat islam	%	na	20	230.000.000	30	230.756.800	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	-	-	65	2.460.756.800	Dinas Syari'at Islam
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam	Meningkatnya pemahaman Syariat Islam	kec	11	11	675.073.000	11	225.637.000	11	809.515.000	11	715.850.000	11	985.000.000	11	3.411.075.000	Dinas Syari'at Islam
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Berkurangnya penyakit masyarakat	%	70	65	337.730.000	60	27.435.500	-	-	-	-	-	-	60	365.165.500	Dinas Syari'at Islam
Program Pengembangan Nilai Budaya Islami	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai budaya Islami kepada	%	50	55	50.000.000	-	-	-	-	70	69.415.000	75	70.000.000	75	189.415.000	Dinas Syari'at Islam
Program Peningkatan Pemberian Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama	%	na	70	628.686.000	-	-	85	258.910.000	-	-	-	-	85	887.596.000	Dinas Syari'at Islam
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	50	-	-	60	119.428.000	70	124.259.000	-	-	-	-	70	243.687.000	Dinas Syari'at Islam
Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	15.000.000	-	-	100	15.000.000	100	30.000.000	Dinas Syari'at Islam
Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syari'at Islam											150.000.000				150.000.000	
Belanja Tidak Langsung					12.312.470.143		12.606.411.668		11.604.128.918		12.978.876.480		16.067.705.998		65.569.593.207	Kecamatan
Belanja Langsung					5.917.598.359		4.397.490.139		4.945.143.800		10.565.037.200		11.000.000.000		36.825.269.498	Kecamatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	2.386.814.675	75	2.482.790.186	80	2.878.974.270	85	4.290.366.000	90	2.200.000.000	90	14.238.945.131	Kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	2.390.038.475	70	595.515.828	75	760.082.000	80	1.523.928.400	85	1.925.000.000	85	7.194.564.703	Kecamatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	179.420.000	40	165.000.000	45	220.487.530			55	275.000.000	55	839.907.530	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan kecamatan	kec	11	11	385.696.749	11	380.792.000	11	405.500.000	11	4.750.742.800	11	6.600.000.000	11	12.522.731.549	Kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	100	17.350.000	-	-	100	121.500.000	-	-	-	-	100	138.850.000	Kecamatan
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam	Meningkatnya pemahaman Syariat Islam	Kec	11	11	12.000.000	11	50.725.000	11	83.600.000	-	-	-	-	11	146.325.000	Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung	Meningkatnya kapasitas aparatur desa	Kampung	144	144	197.004.207	144	52.000.500	144	95.000.000	-	-	-	-	144	344.004.707	Kecamatan
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Administrasi Kecamatan (PATEN)	%	na	-	-	100	295.594.500	-	-	-	-	-	-	100	295.594.500	Kecamatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat pelaksanaan gotong royong	%	45	50	349.274.253	50	375.072.125	55	380.000.000	-	-	-	-	60	1.104.346.378	Kecamatan
Belanja Tidak Langsung					1.663.265.957		2.156.916.128		2.008.485.797		2.339.274.048		2.573.201.453		10.741.143.383	BKPP
Belanja Langsung					5.351.589.810		2.509.172.668		3.408.332.950		3.304.945.000		3.075.292.450		17.649.332.878	BKPP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	949.711.160	75	935.502.718	80	1.463.239.450	85	1.148.546.000	90	1.043.885.000	90	5.540.884.328	BKPP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	241.325.000	-	-	75	49.650.000			85	45.000.000	85	335.975.000	BKPP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	79.025.000	40	24.625.000	45	72.250.000			55	85.000.000	55	260.900.000	BKPP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	-	-	-	-	65	99.347.000	70	135.000.000	75	105.201.500	75	339.548.500	BKPP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	-	-	70	9.900.000	80	4.870.000	90	5.358.500	100	23.870.000	100	43.998.500	BKPP
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	%	100	-	-	100	120.107.000	100	6.108.500			-	-	100	126.215.500	BKPP
Program Penilaian dan Penataan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur daerah	%	na	-	-	100	98.427.200	-	-	-	-	-	-	100	98.427.200	BKPP
Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data aparatur	%	na	-	-	-	-	100	18.700.000	-	-	-	-	100	18.700.000	BKPP
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Meningkat Disiplin Aparatur	%	40	45	4.081.528.650	45	1.320.610.750	50	1.694.168.000	55	2.016.040.500	60	1.772.335.950	60	10.884.683.850	
Belanja Tidak Langsung					967.612.080		1.073.193.272		1.022.847.542		1.205.784.117		1.326.362.529		5.595.799.540	BPBD
Belanja Langsung					2.412.936.680		1.625.471.700		4.156.764.180		5.937.692.000		5.291.288.000		19.424.152.560	BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	879.272.575	75	708.846.200	80	507.856.500	85	901.586.000	90	183.850.000	90	3.181.411.275	BPBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	267.444.400	70	218.995.500	75	184.000.000	80	3.854.514.000	85	212.000.000	85	4.736.953.900	BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	34.320.000	40	-	45	19.800.000			55	210.438.000	55	264.558.000	BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	137.323.000	60	-	-	-	-	-	75	150.000.000	75	287.323.000	BPBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	5.000.000	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	100	40.000.000	BPBD
Program Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya penanggulangan bencana daerah	%	na	100	1.089.576.705	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.089.576.705	BPBD
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100	-	-	100	697.630.000	100	3.445.107.680	100	1.014.500.000	100	4.500.000.000	100	9.657.237.680	BPBD
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	%	100							100	167.092.000			100	167.092.000	BPBD
Belanja Tidak Langsung					420.200.000		476.200.000		461.300.000		548.887.500		603.776.250		2.510.363.750	MPU
Belanja Langsung					935.531.000		480.975.000		571.190.000		1.363.500.000		1.245.000.000		4.596.196.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	442.511.500	75	348.956.000	80	410.807.600	85	993.820.000	90	532.000.000	90	2.728.095.100	MPU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	23.000.000	-	-	75	20.300.000	80	24.000.000	85	23.000.000	85	90.300.000	MPU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	61.500.000	40	40.500.000	45	39.100.000			55	65.000.000	55	206.100.000	MPU
Program Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya kualitas syariat islam	%	na	100	113.936.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	113.936.500	MPU
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa bersyariat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam desa bersyariat	%	na	100	174.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	174.157.000	MPU
Program Pemberian Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama	%	na	100	120.426.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	120.426.000	MPU
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Meningkatnya sumber daya ulama	Orang	70	-	-	70	66.107.000	80	100.982.400	90	200.530.000	100	450.000.000	100	817.619.400	MPU
Program Pemberdayaan dan peningkatan lembaga keagamaan	Jumlah sarana dan lembaga keagamaan per desa	Unit	3	-	-	3	25.412.000	3		3	28.740.000	3	175.000.000	3	229.152.000	MPU
Program Penegakkan kebijakan pelaksanaan syariat islam	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat islam	%								55	116.410.000	65	200.410.000	65	316.820.000	MPU
Belanja Tidak Langsung					-		274.349.607		337.036.271		403.959.577		444.355.535		1.459.700.990	Sekretariat Korpri
Belanja Langsung					280.000.000		476.284.000		368.900.000		400.000.000		645.359.000		2.170.543.000	Sekretariat Korpri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	161.525.000	75	112.039.500	80	183.705.500	85	198.840.000	90	222.283.655	90	878.393.655	Sekretariat Korpri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	-	-	70	200.980.000	-	-	-	-	85	55.000.000	85	255.980.000	Sekretariat Korpri
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	9.000.000	40	6.000.000	45	12.100.000			55	14.641.000	55	41.741.000	Sekretariat Korpri
Program Pembinaan dan Permasarakatan Olahraga	Jumlah organisasi dan club Olah raga yang dibina	Club	50	65	30.000.000	-	-	70	173.094.500			70	209.444.345	70	412.538.845	Sekretariat Korpri
Program Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman Syariat Islam	Kec	11	11	60.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11	60.850.000	Sekretariat Korpri
Program Peningkatan Keamanan dan Kenvamanan Lingkungan	Meningkatnya kenyamanan di lingkungan	%	30	35	18.625.000	35	157.264.500	-	-			50	143.990.000	50	319.879.500	Sekretariat Korpri
Program Pembinaan Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya											201.160.000				201.160.000	
Belanja Tidak Langsung					176.000.000		306.971.218		369.003.349		386.523.496		425.175.846		1.663.673.909	Sekretariat Baitul
Belanja Langsung					176.168.000		789.523.100		616.108.300		353.416.000		793.391.043		2.728.606.443	Sekretariat Baitul
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	176.168.000	75	525.546.100	80	572.468.300	85	309.616.000	90	692.686.643	90	2.276.485.043	Sekretariat Baitul Mal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	-	-	70	216.653.000	75	18.240.000	80	43.800.000	85	22.070.400	85	300.763.400	Sekretariat Baitul Mal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	-	-	40	12.600.000	45	15.400.000			55	18.634.000	55	46.634.000	Sekretariat Baitul Mal
Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan	Meningkatnya Zis sebagai PAD	Rp (juta)	2000	-	-	3.430	34.724.000	-	-			4500	50.000.000	4500	84.724.000	Sekretariat Baitul Mal
Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	10.000.000	-	-	100	10.000.000	100	20.000.000	Sekretariat Baitul Mal
Belanja Tidak Langsung					-		273.634.261		327.853.033		424.596.065		467.055.672		1.493.139.031	Sekretariat Majelis
Belanja Langsung					215.014.000		594.516.400		833.290.000		1.145.950.000		868.370.000		3.657.140.400	Sekretariat Majelis
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	172.014.000	75	195.686.400	80	342.030.250	85	762.861.000	90	367.870.000	90	1.840.461.650	Sekretariat Majelis Adat Aceh

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	31.000.000	70	192.630.000	75	27.681.000	80	25.000.000	85	30.500.000	85	306.811.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	12.000.000	40	7.200.000	45	7.200.000		358.089.000	55	20.000.000	55	46.400.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	25	-	-	30	199.000.000	-	-	-		-	-	30	557.089.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	4	-	-	-	-	4	456.378.750			4	450.000.000	12	906.378.750	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1.14	KEARSIPAN					1.227.668.087		4.427.987.137		2.544.110.448		1.443.409.413		1.761.950.354		11.405.125.439	
	Belanja Tidak Langsung					588.426.247		669.089.737		610.869.448		795.409.413		874.950.354		3.538.745.199	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Belanja Langsung					639.241.840		3.758.897.400		1.933.241.000		648.000.000		887.000.000		7.866.380.240	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	288.729.540	75	625.317.000	80	265.038.450	85	325.994.350	90	298.000.000	90	1.803.079.340	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	93.306.600	70	2.683.247.000	75	1.245.235.000	80	82.112.000	85	165.000.000	85	4.268.900.600	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	23.800.000	-	-	45	21.000.000			55	28.000.000	55	72.800.000	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat	%	30	35	158.112.300	40	347.302.700	45	341.634.600	50	193.694.550	60	172.000.000	60	1.212.744.150	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Meningkatnyakeselamatan dan kelestariandokumen/arsip	%	20	30	11.855.900	40	16.968.200	50	9.073.950	60	9.615.100	70	82.000.000	70	129.513.150	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	100	37.173.500	100	38.791.000	100	36.259.000			100	57.000.000	100	169.223.500	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan	%	20	30	26.264.000	40	47.271.500	-	-	60	36.584.000	70	70.000.000	70	180.119.500	Kantor Arsip Dan Perustakaan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	15.000.000			100	15.000.000	100	30.000.000	Kantor Arsip Dan Perustakaan
1.15	KETAHANAN PANGAN					5.772.521.125		6.957.662.828		6.897.074.014		8.605.771.616		11.631.645.478		39.864.675.061	
	Belanja Tidak Langsung					3.619.605.318		3.852.709.535		2.813.551.014		4.380.050.616		4.818.055.678		19.483.972.161	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Belanja Langsung					2.152.915.807		3.104.953.293		4.083.523.000		4.225.721.000		6.813.589.800		20.380.702.900	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	776.452.784	75	1.718.684.316	80	525.451.000	85	1.213.292.000	90	1.451.000.000	90	5.684.880.100	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	265.582.400	70	377.605.200	75	462.370.000	80	1.031.400.000	85	372.989.800	85	2.509.947.400	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	4.072.000	-	-	80	3.251.000			100	10.000.000	100	17.323.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	140.350.000	40	25.800.000	-	-			55	429.600.000	55	595.750.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya keterampilan petani dan pelaku angrbisnis	Orang	40	10	143.915.000	10	99.915.000	-	-	100	193.275.000	100	580.000.000	100	1.017.105.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	54,62	54,20	178.342.000	54,20	224.537.100	55	228.978.000	55	167.087.000	55	190.000.000	55	988.944.100	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil produksi perkebunan 2. Meningkatkan permintaan pasar terhadap	%	50	55	80.593.000	60	84.800.000	-	-	70	100.000.000	75	450.000.000	75	715.393.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	100	-	100	49.810.000	100	54.336.000			100	300.000.000	100	404.146.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kapasitas penyuluh	Orang	118	20	559.320.623	100	443.721.677	100	1.197.514.000	100	1.220.000.000	100	1.180.000.000	100	4.600.556.300	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	-	-	60	80.080.000	65	106.623.000	70	23.665.000	75	350.000.000	80	560.368.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	%	na	20	4.288.000	-	-	30	5.000.000			-	-	30	9.288.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	-	-	-	-	80	1.500.000.000			85	1.500.000.000	90	3.000.000.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan											232.992.000		252.992.000		485.984.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
	Program kerjasama informasi dengan mas media											44.010.000		50.010.000		94.020.000	Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
1.16	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					3.032.683.757		3.142.906.244		2.912.603.502		3.881.680.116		3.700.613.710			

	Belanja Tidak Langsung					1.144.899.040		1.152.480.073		1.094.623.682		1.267.280.116		1.394.008.128		6.053.291.039	Badan Pemberdayaan
	Belanja Langsung					1.887.784.717		1.990.426.171		1.817.979.820		2.614.400.000		2.306.605.582		10.617.196.290	Badan Pemberdayaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	808.487.317	75	816.084.539	80	893.536.490	85	931.864.278	90	1.081.179.153	90	4.531.151.777	Badan Pemberdayaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	73.880.000	70	327.970.000	-	-	80	294.890.822	85	80.000.000	85	776.740.822	Badan Pemberdayaan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	37.250.000	40	28.900.000	45				55	30.000.000	55	96.150.000	Badan Pemberdayaan
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat pelaksanaan gotong royong	%	45	50	331.661.000	50	208.539.564	55	223.892.770	60	350.000.000	65	270.910.252	65	1.385.003.586	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha ekonomi	Kampung	144	144	197.238.000	144	15.170.000	145	127.688.900	145	353.432.900	145	154.503.569	145	848.033.369	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Kampung	Cakupan persentase kualitas kelembagaan mukim dan kampung	Kampung	144	144	248.653.000	144	103.257.000	145	72.348.200			145	87.541.322	145	511.799.522	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kemampuan dan peran aktif dalam mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi tepat	kali	2	2	190.615.400	2	124.368.600	2	133.000.000	2	359.885.000	2	160.930.000	12	968.799.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung	Meningkatnya kualitas adm, laporan kelembagaan mukim dan kampung data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat	Kampung	144	-	-	144	95.282.000	145	352.513.460	145	324.327.000	145	426.541.287	145	1.198.663.747	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Meningkatnya infrastruktur dasar kampung	%	na	-	-	100	184.279.000	-	-	-	-	-	-	100	184.279.000	Badan Pemberdayaan
	Program Peningkatan Usaha Pendapatan Keluarga (UP2K)	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	%	na	-	-	100	86.575.468	-	-	-	-	-	-	100	86.575.468	Badan Pemberdayaan
	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya akses data dan informasi	%	100	-	-	-	-	100	15.000.000	-	-	100	15.000.000	100	30.000.000	Badan Pemberdayaan
2.	Urusan Pilihan					34.973.365.278		60.826.427.254		83.866.543.148		95.037.803.824		85.859.481.723		360.563.621.227	
2.1	PERTANIAN					25.725.314.588		33.582.803.057		34.461.306.712		53.072.911.030		43.332.299.592		190.174.634.979	
	Belanja Tidak Langsung					3.220.895.421		3.554.252.301		3.160.470.615		4.262.887.234		4.689.175.957		18.887.681.528	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Belanja Langsung					14.938.398.909		18.421.766.928		23.292.463.000		29.741.860.000		27.124.000.000		113.518.488.837	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	914.417.385	75	1.113.198.648	80	1.256.552.000	85	1.332.808.000	90	1.372.000.000	90	5.988.976.033	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	813.493.981	70	449.085.380	75	976.478.950	80	528.441.200	85	1.528.000.000	85	4.295.499.511	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	56.000.000	-	-	45	66.400.000			55	200.000.000	55	322.400.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	49.627.000	70	75.600.000	80	44.648.000			100	76.000.000	100	245.875.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersedia JUT dan JITUT	Km	40	10	3.395.149.000	8	2.953.024.000	-	-	6	1.064.400.000	7	2.700.000.000	71	10.112.573.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tersedianya infrastruktur drainasi pertanian	m	na	600	67.797.000	-	-	-	-	-	-	-	-	600	67.797.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	43	47	1.344.286.000	50	660.170.000	55	545.300.000	60	1.143.000.000	65	1.300.000.000	65	4.992.756.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian/ perkebunan				1.897.555.000		3.177.221.600		2.902.768.000		600.000.000		2.870.000.000		11.447.544.600	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan Dan
		1. Padi		3	4,5		4		5		5,5		6		6		
		2. Jagung	Ton/ ha	6	4,6		5		5		5,5		6		6		

		3. Kedelai		5	1,3		3		3		4		4		4		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi tahunan untuk komoditi Pangan Utama:	Ton			1.352.800.000			3.299.859.500		7.374.325.750		3.993.000.800		4.625.000.000	20.644.986.050	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
		1. Padi		64.000	54.732		63.756		75.000		75.000		80.000		80.000		
		2. Jagung		11.000	9675		12.400		14.000		15.000		16.000		16.000		
		3. Kedelai		108	84		86		100		110		120		120		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kapasitas penyuluh	Orang	118	60	429.119.843	-	-	-	-	-	-	60	90.000.000	60	519.119.843	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	Ha	6000	-	-	-	-	6000	1.198.670.000	6000	8.453.625.500	6000	2.500.000.000	6000	12.152.295.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman	Tersedia sarana dan prasarana pengendalian hama	%	100	100		100		100	255.700.000	100	576.200.000	100	490.000.000	100	1.321.900.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan hewan dan meningkatnya derajat	%	100	100	259.293.500	100	1.036.246.500	100	1.476.479.700	100	1.126.450.000	100	2.915.000.000	100	6.813.469.700	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan pada peternak	Orang		-	-	-	-	80	170.000.000	70	126.100.000	100	200.000.000	100	496.100.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah peternakan				1.525.150.000		1.179.437.000		854.538.600		4.257.750.000		800.000.000		8.616.875.600	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
		- Sapi		53.603	56.283	-	55.240	-	56.000	-	57.000	-	58.000	-	58.000		
		- Kerbau		50.135	52.642	-	56.402	-	57.000	-	58.000	-	58.000	-	58.000		
		- Kambing		3.33	3.497	-	5.348	-	5.500	-	5.600	-	5.700	-	5.700		
		- Domba		2.329	2.445	-	4.262	-	4.500	-	5.000	-	5.500	-	5.500		
		- Ayam Buras		37.443	39.315	-	16.521	-	43.345	-	45.512	-	47.788	-	47.788		
		- Ayam Ras Petelur		35.432	37.204	-	411	-	41.017	-	43.068	-	45.221	-	45.221		
		- Ayam Ras Pedaging		36.644	38.476	-	28.789	-	42.420	-	44.541	-	46.768	-	46.768		
		- Itik		40.253	46.926	-	6.507	-	46.598	-	48.928	-	51.374	-	51.374		
		- telur		444.061	469.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.264		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	tersedianya sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan	Unit	1	1	89.775.000	1	1.145.534.000	2	2.516.881.000	2	90.800.000	2	800.000.000	9	4.642.990.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan Populasi ternak per tahun				156.117.200				395.000.000		700.000.000		570.000.000		1.821.117.200	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
		- Sapi		5.134	5.391	-	5.356	-	5.500	-	5.600	-	5.700	-	5.700		
		- Kerbau		18.379	19.298	-	8.855	-	9.000	-	9.100	-	9.200	-	9.200		
		- Kambing		4.372	5.12	-	4.020	-	4.500	-	4.600	-	4.700	-	4.700		
		- Domba		428	4.071	-	2.977	-	3.000	-	3.150	-	3.200	-	3.200		
		- Ayam Buras		64.391	67.611	-	59.887	-	62.000	-	64.000	-	65.000	-	65.000		
		- Ayam Ras Petelur		411	432	-	-	-	480	-	510	-	530	-	530		
		- Ayam Ras Pedaging		15.412	19.183	-	20.172	-	21.000	-	22.000	-	22.000	-	22.000		
		- Itik		41.35	43.418	-	41.065	-	42.000	-	43.000	-	44.000	-	44.000		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya target produksi budidaya perikanan	Ton	4,356	3,273	1.784.948.200	2.611	2.694.689.300	3.325	2.456.062.000	3.619	3.492.068.000	3.970	2.025.000.000	3.970	12.452.767.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Ton	4,356	3,273	355.763.000	2.611	34.790.000	3.325	43.979.000	3.619	122.200.000	3.970	1.168.000.000	3.970	1.724.732.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Berkembangnya usaha pengolahan ikan	Kelompok	25	50	447.106.800			50	50.100.000	50	1.342.532.000	50	95.000.000	50	1.934.738.800	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Beroperasinya pasasr ikan hidup	Unit	na	-	-	-	-	1	708.580.000			1	800.000.000	2	1.508.580.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	-	-	75	602.911.000	-	-	-	-	-	-	75	602.911.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bibit	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah potong hewan	paket								1	792.484.500	1	792.484.500	1	1.584.969.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

	Belanja Tidak Langsung					1.765.987.382		1.803.351.589		1.724.323.744		1.851.203.304		2.036.323.634		9.181.189.653	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Belanja Langsung					5.800.032.876		9.803.432.239		6.284.049.353		17.216.960.492		9.482.800.000		48.587.274.960	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	713.801.586	75	778.497.669	80	841.982.000	85	994.938.600	90	979.000.000	90	4.308.219.855	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	92.970.000	70	329.970.000	75		80	8.000.000	85	312.000.000	85	742.940.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	43.163.000	40	91.000.000	45	42.600.000			55	-	55	176.763.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	-	60	-	65	-			75	-	80	-	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	105.866.500	70	7.000.000	80	6.000.000	90	107.757.500	100	130.000.000	100	356.624.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnyapemanfaatan hasil hutan tanaman rakyat dan non kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat	%	30	35	216.790.000	40	493.605.000	45	450.000.000	50	621.263.639	55	992.000.000	55	2.773.658.639	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersedianya perencanaan pengembangan perkebunan	%	na	-	-	100	299.200.000	-	-	-	-	-	-	100	299.200.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Meningkatnya kualitas lingkungan	%	50	55	249.350.000	60	633.267.500	65	365.450.000	70	3.132.283.000	75	370.000.000	75	4.750.350.500	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya kelestarian sumber daya hutan	%	50	55	812.089.000	60	263.945.000	65	339.548.000	70	1.204.583.000	75	152.300.000	75	2.772.465.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS	%	40	45	942.254.000	50	879.415.000	55	801.230.000			65	745.500.000	65	3.368.399.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya keterampilan petani dan pelaku angrbisnis	Kali	48	10	53.337.000	10	99.876.000	10		5	4.219.983.853	5	4.312.000.000	5	8.685.196.853	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya kualitas bahan baku	%	na	-	-	100	2.242.417.000	-	-	-	-	-	-	100	2.242.417.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Penanganan Pasca Panen Bahan Baku	Meningkatnya kualitas pasca panen bahan baku	%	na	-	-	100	290.000.000	-	-	-	-	-	-	100	290.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Tembakau	Meningkatnya kapasitas kelompok tani tembakau	%	na	-	-	40	598.255.000	60	1.919.983.853	-	-	-	-	60	2.518.238.853	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertanian/ perkebunan.				2.570.411.790		2.796.984.070		1.517.255.500		3.374.250.900		1.490.000.000		11.748.902.260	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		1. Sere Wangi	Ton	975	2188		2.280	2.270		2.300		2.500		2.500			
		2. Kakao	Ton	888	888		3.601	1.083		1.161		1.239		1.239			
		3. Kopi	Ton	1.118	1.118		1.500	1.274		1.334		1.394		1.394			
		4. Tembakau	Ton	1.31	1.31		1.580	2.195		2.726		3.346		3.346			
		5. Kemiri	Ton	4.242	4.242		4.253	4.390		4.464		4.538		4.538			
		6. Karet	Ton	7,5	7,5		77,5	72,5		97,5		122,5		122,5			
		7. Nilam	Ton	41	41		85	48,8		51,4		54		54			
		8. Jahe	Ton	156	156		216	276		336		396		396			
		9. Kelapa	Ton	79	79		113	137		161		185		185			
	Program peningkatan penerapan teknologi	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan pada								70		3.553.900.000	100	3.553.900.000	100	7.107.800.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.2.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI					4.215.313.118		24.016.426.161		45.962.406.394		37.485.812.269		34.813.046.634		146.493.004.576	
	Belanja Tidak Langsung					987.450.891		1.051.424.013		990.870.494		1.169.005.769		1.344.356.634		5.543.107.801	Dinas
	Belanja Langsung					3.227.862.227		22.965.002.148		44.971.535.900		36.316.806.500		33.468.690.000		140.949.896.775	Dinas
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	759.072.045	75	1.316.788.523	80	1.112.734.900	85	1.342.120.000	90	3.377.000.000	90	7.907.715.468	Dinas Pertambangan Dan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	287.126.000	70	307.230.000	75	413.450.000	80	175.280.000	85	1.335.000.000	85	2.518.086.000	Dinas Pertambangan Dan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	20.400.000	40	24.000.000	45	28.600.000			55	140.000.000	55	213.000.000	Dinas
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	50	55	-	-	-	-	-			75	70.000.000	75	70.000.000	Dinas Pertambangan Dan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	60	14.751.860	-	-	-	-			100	30.000.000	100	44.751.860	Dinas Pertambangan Dan Energi
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya ijin usaha tambang	%	70	75	80.024.000	75	80.623.000	80	17.900.000			85	18.690.000	85	197.237.000	Dinas Pertambangan Dan

	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan	kec	11	11	54.000.000	-	-	-	-	-	11	365.000.000	11	419.000.000	Dinas Pertambangan Dan Energi	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Tercapainya masyarakat hemat energi	%	70	75	2.005.563.322	75	1.706.126.725	80	4.884.421.000	85	1.760.400.000	85	7.250.000.000	85	17.606.511.047	Dinas Pertambangan Dan Energi
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Jumlah kampung yang berlistrik	Kampung	80	144	6.925.000	144	19.530.233.900	145	38.514.430.000	145	33.039.006.500	145	20.883.000.000	145	111.973.595.400	Dinas Pertambangan Dan Energi
2.3	PARIWISATA					5.032.737.572		3.227.198.036		3.442.830.042		4.479.080.525		7.714.135.496		23.895.981.671	
	Belanja Tidak Langsung					780.875.812		842.089.677		776.602.359		1.039.410.525		2.000.000.000		5.438.978.373	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Belanja Langsung					4.251.861.760		2.385.108.359		2.666.227.683		3.439.670.000		5.714.135.496		18.457.003.298	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	65	70	399.865.700	75	485.483.359	80	578.533.683	85	862.134.400	90	700.025.756	90	3.026.042.898	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	60	65	55.000.000	70	294.297.000	-	-	-	30.000.000	-	-	70	379.297.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	30	35	35.788.760	40	12.600.000	45	35.600.000			55	43.076.000	55	127.064.760	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	%	50	-	-	70	2.500.000	-	-	-	2.675.000	-	-	70	5.175.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan manca negara dan nusantara	Orang	8027	1.164	2.715.787.000	1.253	636.356.800	1500	1.657.547.000	1500	69.135.000	1500	2.005.631.870	6.917	7.084.457.670	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	%	20	20	232.214.300	30	123.655.000	40	244.876.000	50	606.505.000	60	296.299.960	60	1.503.550.260	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya persentase fasilitas pendukung pariwisata yang menjadi mitra	%	30	30	35.430.000	35	18.846.000	40	149.671.000	45	141.730.000	50	181.101.910	50	526.778.910	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	25	30	227.776.000	30	70.098.500	-	-	35	412.490.600	35	1.750.000.000	35	2.460.365.100	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tersedianya fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	UKM	986	200	150.000.000	3.499	140.071.700	-	-	-		3.499	720.000.000	3.499	1.010.071.700	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	%	70	75	400.000.000	75	601.200.000	-	-	-	1.300.000.000	-	-	75	2.301.200.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										65	15.000.000	75	18.000.000	75	33.000.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	TOTAL					510.889.241.609		670.409.514.950		810.018.188.270		1.141.604.081.478		1.116.702.505.705		4.232.953.044.683	

BAB IX
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Gayo Lues

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja awal periode RPJMD	Realisasi/Target Kinerja				
				Realisasi			Target	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indikator Makro							
	Pertumbuhan PDRB	%	5.29	4,64	4.13	4.4	4.6	5.0
	Pengeluaran per kapita	Juta	7.65	7.71	7.74	7.80	7.86	8.10
	Angka kemiskinan	%	23.38	22,33	21.43	20.12	19.1	18.50
	Indek Pembangunan Manusia		62.85	63.22	63.34	64.25	65.75	67.00
2	Pendidikan							
	Angka melek huruf	%	87.38	88.19	90.37	92.50	94.10	96.23
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6.88	7.00	7.04	7.22	7.5	8.0
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	77.13	92.7	94	96	97	100
	APM SD/MI/PaketA	%	99.76	100	95	100	100	100
	APM SMP/MTs/ Paket B	%	96.34		95,75	97	97.25	97.50
	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	%	80.69		90	90.25	90.50	90.75
	Pendidikan Dasar							
	Angka Partisipasi Sekolah	%	98,54	98,9	99.18	99.80	99.90	100
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah	Sekolah / pddk	80	85	79	80	85	85
	Rasio guru terhadap murid	Guru / Murid	12	16,58	16	16	16	16

	Pendidikan Menengah pertama/SLTP							
	Angka Partisipasi Sekolah	%	92.47	97,42	97.95	98.5	98.7	99
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah	Sekolah / pddk	63	65	55	60	65	70
	Rasio guru terhadap murid	Guru / Murid	16	12,29	14	15	16	16
	Pendidikan menengah atas/SLTA							
	Angka Partisipasi Sekolah	%	76.92	81,88	85.55	87.15	89.25	92.40
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah	Sekolah / pddk	37	34	25	30	36	40
	Rasio guru terhadap murid	Guru / Murid	10	9,93	10	11	12	12
	Angka Kelulusan							
	Angka kelulusan SD/MI	%	99,15	98,84	98,84	99.25	99.28	99.31
	Angka kelulusan SMP/MTs	%	99,82	99,94	99,94	99.88	99.90	99.92
	Angka kelulusan SMA/SMK/MA	%	99,83	99,74	99,74	99.90	99.92	99.94
3	Kesehatan							
	Angka Harapan Hidup	Tahun	64.38	64.42	64.44	64.80	65.00	65.25
	Angka Kematian Bayi	orang	14,49	18	15,6	11	10	9
	Jumlah Gizi Buruk Yang Ditemukan	Orang	4	4	8	2	1	0
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Bh/1000	14.85	15,01	16,02	16.00	16.00	16.00
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Bh/1000	0.01	0,01	0,01	0.02	0.02	0.02
	Rasio dokter per satu an penduduk	Org/1000	0.22	0,26	0,44	0.25	0.25	0.25
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Org/1000	10.01	4,38	4,6	12.75	12.75	12.75
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	35	71,1	36,28	65	75	85
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,6	95,5	100	92	94	96
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	66,7	82	85.42	100	100	100
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100

	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29	31,4	45	65	70	75
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kunjungan bayi	%	86,1	85,8	89	92	94	96
	Jumlah Puskesmas	Unit	12	12	12	12	12	12
	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	41	41	41	41	41	41
	Jumlah Poskesdes	Unit	80	94	97	97	98	103
4	Pekerjaan Umum							
	Panjang jalan dan jembatan kabupaten	Km	709.31	48,772	45	53	60	60
		M	1.884	158.7	194.9	300	250	250
	% jalan yang direhap	%	100	89,35	55,97	48	50	50
	% jembatan yang direhap	%		24,84	27,33	32,92	40,37	40,37
	Kondisi jalan baik	Km	450,66	509,95	572,24	633,44	642,24	672,24
	Kondisi jalan rusak ringan	Km	185,49	165,49	140,49	99,99	49,99	0
	Kondisi jalan rusak berat	Km	153,4	123,4	93,4	53,4	27,4	0
	Kondisi jembatan baik	M		158,7	194,9	300	250	250
	Kondisi jembatan rusak ringan	M	742,4	640,1	550	400	200	0
	Kondisi jembatan rusak berat	M	1034,4	767,1	500	300	150	0
	Persentase darinas dalam kondisi baik	%		7,23	12,6	12,05	30,12	30,12
5	Pengairan							
	Peningkatan Saluran irigasi	M	275	800	800	800	800	800
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	30	26,89	39	45	50	55
6	Perumahan							
	Rumah tangga pengguna air bersih	%	84.03	82,21	83,85	89	91	93
	Rumah tangga pengguna listrik	%	91.86	93,25	95,5	96	98	99
	Rumah tangga bersanitasi	%	38.93	61,46	62,69	63	64	65
	Rumah tidak layak huni	Rumah	1000	51	100	500	250	50
7	Perhubungan							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Buah	11	7	8	8	8	8
	rasio Ijin trayek	Bh/Or		7	8	8	8	8

	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	78	20	25	30	30	30
	Jumlah Pelabuhan udara dan Terminal Bis	Buah	0	0	1	1	1	1
			3	3	3	3	3	3
8	Lingkungan Hidup							
	Persentase penanganan sampah	%	60	84	84,62	65	65	70
	Persentase penduduk berakses air minum	%	84.03	85.4	86	89	91	93
	Persentase luas pemukiman yang tertata	%	30	40	45	55	60	70
	Pencemaran status mutu air	%	10	10	8	8	7	5
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	40	40	40	43	43	45
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	5	100	100	15	18	20
	% Rumah tangga yang memiliki tempat pembuangan sampah	%	34	36,4	39,56	41,96	44,36	46,76
9	Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Pertambangan tanpa ijin	Buah	7	5	4	4	3	2
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kampung berlistrik	Kpg	80	144	144	145	145	145
10	Penataan ruang							
	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0.03	0,05	0,05	0.03	0.03	0.03
	Luas wilayah produktif	%	17.54	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52
	Luas wilayah perkotaan	%	1.18	1,41	1,41	1.41	1.41	1.41
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
12	Perencanaan							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/Tidak	Tidak	Ada	-	-	-	-
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-	Ada

	Qanun							
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perbub	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Kependudukan							
	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	%	34,06	40	42,18	50	55	60
	Kepemilikan E-KTP	%	44,06	58,04	58,04	70	95	100
14	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera							
	Rata – rata jumlah anak per keluarga	Orang	3	3	4	3	2	2
	Rasio akseptor KB	%	85.22			87	87.5	88
	Cakupan peserta KB aktif	%	70	91.73	91,99	92	94	95
	Jumlah panti sosial yang dikelola swasta	Unit	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah PMKS yang dibantu	Orang	8630	1576	1701	1980	1691	1682
	Anak Yatim (1578)	Orang	1578	233	266	315	409	355
	Cacat (684)	Orang	684	136	146	239	82	81
	WRSE (1331)	Orang	1331	266	276	334	228	227
	RTLH (498)	Orang	498	51	100	100	100	147
	Fakir Miskin (2181)	Orang	2181	436	436	436	436	437
	Eks Kusta (232)	Orang	232	32	50	50	50	50
	ODKB (32)	Orang	32	4	9	18	1	0
	Lansia/Jompo (2094)	Orang	2094	418	418	488	385	385
16	Ketenagakerjaan							
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	65.24	74.78	75	75	76	78
	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.4	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	Rasio ketergantungan	%	60,86	60,8	60.75	60.70	60.65	60.60
17	Pembangunan rumah tidak layak huni	Rumah	50	51	288	500	250	50

18	Perkembangan Sektor Perkoperasian							
	Jumlah Koperasi	Unit	131	135	141	144	144	144
	- Aktif	Unit	37	37	55	140	144	144
	- Tidak Aktif	Unit	94	104	86	31	-	-
	- Jumlah UKM	Unit	1036	250	4573	4470	4590	4705
19	Otonomi daerah							
	Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa	Orang		90	94	90	90	90
	Nilai LAKIP SKPK dan Pemerintah Kabupaten	Nilai	B	CC	CC	B	B	BB
	usulan dalam RKPD yang diakomodir dalam APBK	%	90	99	99	100	100	100
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penyusunan rancangan APBD tepat waktu	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Laporan keuangan pemda yang sesuai SAP dan tepat waktu	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Cakupan patroli petu gas Satpol PP	%	40	45	50	55	60	65
	% kualifikasi pendidikan aparatur pemerintah kampung tamatan SLTA	%	75	75	75	75	80	85
	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Cakupan sarana pra sarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik	Kampung	144	144	144	145	145	145
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP	SKPK	9	9	9	36	36	36
	SKPK yang telah memiliki Web Site	SKPK	18	18	18	20	25	30
	% pembahasan Qanun yang dilaksanakan	%	100	100	55	100	100	100
	% qanun yang diselesaikan dalam prolegda	%	100	100	33,3	100	100	100
	Regulasi daerah yang diterbitkan:							
	a. Qanun	Qanun	-	8	3	4	4	4
	b. Perbup	Perbub	-	24	27	25	25	25

	c. Keputusan Bupati	Kepbup	-	200	701	700	700	700
	d. MOU Bupati				16	15	15	15
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan lembaga eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	Kasus			50	40	30	20
	Persentase Produk hukum yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kampung yang memiliki RKPKp dan APBkp	Kampung		136	136	145	145	145
	Persentase kampung berstatus swasembada terhadap total kampung	%	20,83	21	21,5	22,91	23,61	23,61
20	Lama proses perizinan	Hari	5	5	5	4	4	4
	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Keagamaan							
	Angka Melek Al-Qur'an	%	60	60	65	70	75	80
	Kemakmuran rumah ibadah	%	70	70	75	75	80	85
	Jumlah Imam/ulama	Orang	70	70	70	75	75	75
	Masyarakat yang menunaikan zakat	%	75	75	76	100	100	100
	Meningkatnya ZIS sebagai PAD	Rp (juta)	2.000	1.800	3.430	3.500	3.800	4.000
	Jumlah sarana peribadatan per kampung	Unit	2	2	2	2	2	2
	Jumlah lembaga keagamaan per kampung	Unit	1	1	1	1	1	1
	Jumlah pelanggaran Syariat Islam	Perkara	298	294	173	120	100	80
	Rasio poskamling per Kampung	Unit	1	1	1	1	1	1
	Rasio Jumlah hansip per kampung	Org/Kpg	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Organisasi partai politik	Parpol	15	15	15	15	15	16
	Jumlah Organisasi Masyarakat	Ormas		50	56	56	56	56
	Pelaksanaan adat istiadat Gayo yang masih dilaksanakan	%	90	90	90,62	90	90	90
	Frekuensi sosialisasi adat istiadat dan budaya Gayo	Kali	2	2	2	2	2	2
22	% partisipasi masyarakat dalam	%	88.43	88.43	88,43	88,43	88,43	90

	pemilihan legislatif							
	% partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden	%	76.88	76.88	76,88	76,88	76,88	76,88
23	Kesetaraan Gender							
	Jumlah kasus KDRT	Kasus		5	6	5	4	3
	% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan hukum	%	80	80	80	85	85	90
	% Tingkat keterwakilan perempuan lembaga eksekutif	%	6	6	6,7	7	10	10
	% Tingkat keterwakilan perempuan lembaga Legislatif	%		0	10	10	10	10
24	Industri							
	Jumlah Industri Rumah Tangga (Home Industri)	Unit	986	200	4.357	4.400	4.500	4.600
	Jumlah Industri Berbasis Teknologi	Unit	50	50	216	70	90	105
25	Pendapatan Asli daerah	Rp (juta)	12	20,213	28,294	29	30	32
26	Ketahanan Pangan							
	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	4	0	0	1	1	1
	Pola Konsumsi Pangan Harapan	Skor PPH	60	72	75	75	80	90
	Daerah Rawan Pangan	Klp/Kampung	77	74	71	47	37	27
	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Gapoktan	63	0	0	15	15	15
	Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok	7	7	0	3	3	3
	Desa Mandiri Pangan	Kampung	4	0	2	1	1	1
	Tenaga penyuluh THL-TBPP	Orang	114	119	130	6	6	8
	Tenaga Penyuluh Kehutanan	Orang	1	3	1	2	2	2
	Tenaga Penyuluh Perikanan	Orang	3	6	6	3	3	3
27	Pemuda dan Olahraga							
	Jumlah Atlit yang dikirim ke event Olahraga di luar daerah	Orang	122	122	210	250	250	250
	Jumlah penyelenggaraan event olahraga di Gayo Lues	Event	7	7	7	7	7	7
	Jumlah prestasi olahraga Gayo Lues tingkat provinsi	Medali						

	a. Emas		0	0	1	2	2	3
	b. Perak		0	0	4	6	6	6
	c. Perunggu		0	0	4	8	8	8
	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	18	18	18	20	20	20
	Jumlah Organisasi Masyarakat/Pemuda	Organisasi	5	5	6	7	7	7
	Jumlah Klub Olahraga	Klub	60	60	60	60	60	60
	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	3	3	3	3	3	3
	Jumlah pembinaan kepemudaan	Kali	1	1	2	2	2	2
28	Jumlah kajian budaya Gayo	Kali	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Event seni dan Budaya di Gayo Lues	Kali	6	6	6	6	6	6
	Jumlah promosi kebudayaan	Kali	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Prestasi seni dan budaya	Piagam	2	2	2	2	2	2
	Jumlah kelompok seni	Kelompok	144	144	144	145	145	145
	Jumlah SDM penggiat seni dan budaya	Orang	-	27	27	27	27	27
29	Statistik							
	Buku GLDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Informasi dan Komunikasi							
	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	1	1	1	1	1	1
	jumlah wartel/warnet terhadap penduduk	Buah	5	7	9	6	6	6
	Jumlah surat kabar Nasional/lokal	Kali	1	1	1	1	1	1
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	3	3	2	2	2	2
	Webside milik pemerintah daerah	Buah	1	2	2	2	2	2
	Pameran/Expo	Kali	2	1	2	2	2	2
31	Kearsipan							
	Pengelolaan arsip secara buku	%	25	2	3	25	25	25
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	2	2	2	2	2	2
32	Perpustakaan							

	Jumlah perpustakaan daerah dan kampung	Buah	0	30	35	1	1	1
33	Pertanian							
	Produksi tanaman pangan dan hortikultura pertahun							
	- Padi	Ton	64.000	54.732	63.180	75.000	75.000	80.000
	- Jagung	Ton	11.000	9675	12.400	14.000	15.000	16.000
	- Kedele	Ton	108	84	87,5	100	110	120
	- Nenas	Ton	300	520	350	400	450	500
	- Cabe	Ton	3.070	3.051	4.660	11	5.000	5.100
	- Bawang Merah	Ton	1.300	1.275	1.400	1.500	1.600	1.700
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar							
	- Padi	Ton/Ha	3	4,5	4	5	5,5	6
	- Jagung	Ton/Ha	6	4,6	5	5	5,5	6
	- Kedele	Ton/Ha	3	1,3	3	3	4	4
	- Nenas	Ton/Ha	6	9,5	10	10	10	10,5
	- Cabe	Ton/Ha	10	6,1	10	11	11	11
	- Bawang Merah	Ton/Ha	4	4,6	5	6	6,5	7
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	43	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2
	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	%	37	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	4	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	2	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
	Perluasan areal luas baku lahan sawah	Ha						
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Km	10	0	0	12	40	25
	Peningkatan Saluran irigasi	M	275			4238	1750	1500
34	Peternakan							
	Luas ketersediaan pakan ternak	Ha	25		5	5	5	5
	Jumlah pasar hewan	Unit	1	1	1	2	2	2
	Jumlah laporan peta penyakit hewan	Laporan	12	12	12	12	12	12

	Jumlah laporan data statistic data pertahun	Laporan	12	12	12	12	12	12
	Produksi daging pertahun							
	- Sapi	Ton	53.603	53.570	55.240	56.000	57.000	58.000
	- Kerbau	Ton	50.135	41.400	56.402	57.000	58.000	58.000
	- Kambing	Ton	3.330	5.658	5.348	5.500	5.600	5.700
	- Domba	Ton	2.329	6.820	4.262	4.500	5.000	5.500
	- Ayam buras	Ton	37.443	75.836	16.521	43.345	45.512	47.788
	- Ayam ras petelur	Ton	35.432		411	41.017	43.068	45.221
	- Ayam ras pedaging	Ton	36.644	113.339	28.789	42.420	44.541	46.768
	- Itik	Ton	40.253	61.404	6.507	46.598	48.928	51.374
	Produksi telur per tahun							
	- Ayam buras	Butir	16.000	19.789	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Ayam ras petelur	Butir	410		450	450	450	450
	- Itik	Butir	28.000	30.408	30.000	30.000	30.000	30.000
	Populasi ternak pertahun							
	- Sapi perah	Ekor	-		11	5	5	5
	- Sapi potong	Ekor	5.194	-	5.356	5.500	5.600	5.700
	- Kerbau	Ekor	18.379	9.177	8.855	9.000	9.100	9.200
	- Kuda	Ekor	428	328	336	350	370	380
	- Kambing	Ekor	4.372	3.950	4.020	4.500	4.600	4.700
	- Domba	Ekor	3.473	2.924	2.977	3.000	3.150	3.200
	- Ayam buras	Ekor	64.391	35.975	59.887	62.000	64.000	65.000
	- Ayam ras petelur	Ekor	411	-	-	480	510	530
	- Ayam ras pedaging	Ekor	15.412	-	20.172	21.000	22.000	22.000
	- Itik	Ekor	41.350	40.583	41.065	42.000	43.000	44.000
35	Perikanan							
	Jumlah rumah tangga perikanan menurut tempat usaha							
	- Kolam	RTP	3.000	3.709	3.474			
	- Sawah	RTP	3.000	4.220	3.634			
	Produksi ikan melalui tempat usaha							
	- Kolam	Ton	1.180	1.589	1.271			
	- Sawah	Ton	6.500	7.988	6.390			
	Produksi ikan pertahun		2.065	3.273	2.611	3.325	3.619	3.970
	- Ikan mas	Ton	800	1.168	934,4	1.225	1.310	1.475
	- Ikan mujair	Ton	615	921,4	737,1	875	920	985
	- Ikan lele	Ton	550	843,5	667,6	825	889	910

	- Ikan gabus	Ton	100	340,2	272,2	400	500	600
36	Perkebunan							
	Produksi komoditi unggulan perkebunan							
	Sere Wangi	Ton	2188	2.200	2.280	2.270	2.300	2.500
	Kakao	Ton	888	1.000	3.601	1.083	1.161	1.239
	Kopi	Ton	1.118	1.200	1.500	1.274	1.334	1.394
	Tembakau	Ton	1.310	1.500	1.580	2.195	2.726	3.346
	Kemiri	Ton	4.242	4.242	4.253	4.390	4.464	4.538
	Karet	Ton	7,5	22,5	77,5	72,5	97,5	122,5
	Nilam	Ton	41	56	85	48.8	51,4	54
	Jahe	Ton	156	156	216	276	336	396
	Kelapa	Ton	79	79	113	137	161	185
37	Kehutanan							
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	9.720	12.180	12.530	0	0	0
	Kerusakan kawasan hutan	Ha	21.000	8.820	8.470	0		0
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	5,64	5,14		8,25	9,12	10
	Rehabilitasi lahan Rakyat	Ha	9.720	0	0	13.625	14.270	15.760
	Kerusakan Lahan	Ha	21.000	0	0	17.095	16.450	14.960
38	Kehutanan		154940	92937	162755	193444	204562	220129
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	9.720	2.460	350	13.625	14270	15.760
	Kerusakan kawasan hutan	Ha	21.000	12.500	12.150	17095	16450	14960
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	5,64	5,14		5,14	5,14	5,14
39	Pariwisata	Orang						
	Kunjungan wisata (Asing)	Orang	147	147	158	200	200	200
	Kunjungan wisata (Lokal)	Orang	1000	1017	1095	1150	1250	1300
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Juta	8	10,5	11	11	11	11
40	Sumber daya Manusia							
	Jumlah PNS Yang mengikuti Tugas belajar/ ijin belajar	Orang	5	5	5	5	66	
	% jabatan struktural yang terisi	%	73,2	73,2	73,2	75	80	100
	% PNS yang menduduki jabatan sesuai kompetensi	%	83,2	100	100	100	100	100
	Jumlah PNS yang mengikuti							

	pendidikan dan pelatihan							
	a. Diklat Kepemimpinan	Orang	0	80	135	0	70	70
	b. Diklat Teknis	Orang	0	-	138	0	100	100
	c. Diklat Fungsional	Orang	0	-	94	95	100	100
	PNS yang dilantik dalam jabatan Fungsional tertentu	Orang	100	100	100	100	100	100

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN
KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. RPJMD Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 memiliki titik sambung dengan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya. Demikian pula halnya RPJMD ini akan memiliki kesinambungan dengan RPJMD periode selanjutnya. Karena itu, di akhir RPJMD ini juga membuka ruang adanya periode transisi untuk berjalannya program-program pembangunan pemerintahan selanjutnya.

Ruang transisi semacam itu dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Kabupaten Gayo Lues. Melalui adanya RPJMD transisi, bisa berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD transisi akan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gayo Lues pada tahun transisi, juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku pembangunan daerah (stakeholders) untuk mewujudkan tujuan bersama. RPJMD transisi semacam itu juga bisa berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam tahun transisi

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada pada periode 2017-2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPK menyusun Renstra SKPK dan pedoman untuk menyusun RKPD. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPK beserta bagi seluruh pemangku pembangunan daerah (stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 dengan sebaik-baiknya.
2. SKPK berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPK setiap tahun;
3. SKPK berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Gayo Lues 2012-2017 dengan Renstra SKPK.

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Renstra SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Keberhasilan pembangunan Gayo Lues dalam mewujudkan visi Kabupaten Gayo Lues "*Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai, Bertaqwa, dan Bermartabat*" perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan Gayo Lues yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif

